

**SABDA DAN DAWUH SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X TENTANG
PENGANGKATAN GKR PEMBAYUN MENJADI GKR MANGKUBUMI SEBAGAI
SUKSESI TAKHTA RAJA
STUDI POWER AUTHORITY LEGITIMACY MAX WEBER**

DISERTASI



**Karya tulis ini sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
Program Doktor Ilmu Komunikasi
Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid**

**Oleh
SIGIT SURAHMAN
201632014
(Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi)**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Disertasi saya yang berjudul **"Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR Mangkubumi Sebagai Suksesi Takhta Raja (Studi *Power Authority Legitimacy* Max Weber)"** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dengan bimbingan dan pengawasan dari Promotor, Co-Promotor 1, dan Co-Promotor 2.

Saya menyatakan bahwa karya Disertasi ini adalah asli tanpa ada unsur plagiarisme, dan semua sumber tertera di dalamnya telah dicantumkan dalam daftar pustaka sebagaimana kaidah dalam penulisan karya ilmiah.

Jakarta, Agustus 2023

Yang Menyatakan

Sigit Surahman

**UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI**

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

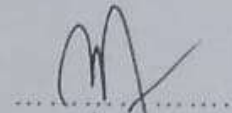
Nama : Sigit Surahman
NPM : 201632014
Judul Disertasi : Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X
Tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR
Mangkubumi Sebagai Suksesi Takhta Raja
Studi Power Authority Legitimacy Max Weber

Menyetujui :

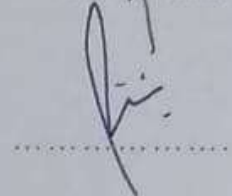
Promotor : Prof. Dr. Ahmad Sihabudin., M.Si



Co-Promotor 1 : Dr. Fahrudin Faiz., M.Ag



Co-Promotor 2 : Dr. Ridzki Rinanto Sigit., M.M



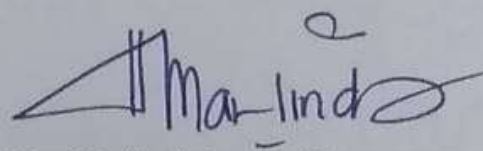
Jakarta, 24 Agustus 2023

Ketua Program Studi DIK

Direktur SPs-Usahid Jakarta



(Dr. Ridzki Rinanto Sigit., M.M)



(Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., MM)

UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

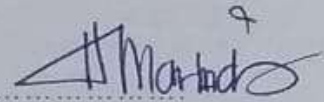
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Sigit Surahman
NPM : 201632014
Judul Disertasi : Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X
Tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR
Mangkubumi Sebagai Suksesi Takhta Raja
Studi Power Authority Legitimacy Max Weber

Telah dipertahakan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 14:00 s.d 16:00 dan dinyatakan LULUS dengan predikat *Sangat Memuaskan*.

DISAHKAN OLEH PANITIA PENGUJI DISERTASI :

Ketua Sidang : Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., MM



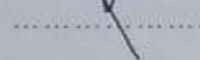
Promotor : Prof. Dr. Ahmad Sihabudin., M.Si



Co-Promotor 1 : Dr. Fahrudin Faiz., M.Ag



Co-Promotor 2 : Dr. Ridzki Rinanto Sigit., M.M



Penguji : Prof. Dr. Sunarto., M.Si



Dr. Andi Mirza Ronda., M.Si



Dr. Dewi Widowati., M.Si



Sekretaris Sidang : Dr. Gloria Angelita., M.Si

ABSTRAK

SABDA DAN DAWUH SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X TENTANG PENGANGKATAN GKR PEMBAYUN MENJADI GKR MANGKUBUMI SEBAGAI SUKSESI TAKHTA RAJA STUDI POWER AUTHORITY LEGITIMACY MAX WEBER

Oleh

Sigit Surahman

201632014

(Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi)

Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX menimbulkan kontroversi. Hal tersebut diakibatkan karena tidak ada komunikasi yang baik oleh Sri Sultan HBX kepada keluarga dan masyarakat Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengangkatan GKR Pembayun sebagai GKR Mangkubumi serta memahami fenomena melalui perspektif *power*, *authority*, *legitimacy*, dan *Social Judgment Theory*. Metode penelitian campuran dijadikan cara mengumpulkan data. Hasil menunjukkan Sultan HBX masih memiliki *power* dalam beberapa aspek, namun tidak lagi memiliki *authority* yang mencakup seluruh rakyat Yogyakarta. Sebagai Raja, otoritas Sultan hanya berlaku untuk struktur di kesultanan dan sebagian masyarakat yang memiliki kepentingan secara langsung. Legitimisasi Sultan didasarkan pada sejarah dan tradisi yang mengakui keluarga Keraton Yogyakarta sebagai pemimpin dan penguasa yang sah. Sedangkan penilaian masyarakat menunjukkan sebesar 17% menyatakan setuju, 38% menyatakan tidak setuju, dan 45% menyatakan netral. Berdasar diskusi teori antara *Power*, *Authority*, *Legitimacy* dan *Social Judgment Theory* menghasilkan rekomendasi konsep baru yaitu *Power and Social Appraisal* yang di dalamnya memuat konsep: komunikasi memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan kekuasaan dan otoritas, serta bagaimana penilaian sosial; komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian sosial individu terhadap kekuasaan dan otoritas yang ada; dan komunikasi yang kurang efektif atau manipulatif dapat mengganggu *Power*, *Authority*, dan *Legitimacy*. Diharapkan hasil penelitian memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang suksesi takhta Raja dan dinamika politik kekuasaannya dari perspektif komunikasi. Penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana keputusan pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dipengaruhi oleh faktor komunikasi kekuasaan, otoritas, legitimasi, dan penilaian sosial masyarakat.

Kata Kunci: Sabda, Dawuh, Suksesi, Takhta, Raja

ABSTRACT

**SABDA AND DAWUH OF SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X REGARDING THE
APPOINTMENT OF GKR PEMBAYUN TO GKR MANGKUBUMI AS SUCCESSION OF THE
KING'S THRONE
STUDY OF POWER AUTHORITY LEGITIMACY MAX WEBER**

by

Sigit Surahman

201632014

(Doctoral Program in Communication Science)

Sabda and Dawuh Sri Sultan HBX caused controversy. This was caused by the lack of good communication by Sri Sultan HBX to the family and people of Yogyakarta. This study aims to analyze the appointment of GKR Pembayun as GKR Mangkubumi and understand the phenomenon through the perspectives of power, authority, legitimacy, and Social Judgment Theory. Mixed methods research is used as a way of collecting data. The results show that Sultan HBX still has power in several aspects, but no longer has authority that includes all the people of Yogyakarta. As King, the Sultan's authority only applies to structures in the empire and some people who have a direct interest. The legitimacy of the Sultan is based on history and tradition which recognizes the Yogyakarta Palace family as the legitimate leader and ruler. Meanwhile, the community's assessment of y showed that 17% agreed, 38% disagreed, and 45% stated neutral. Based on the theoretical discussion between Power, Authority, Legitimacy and Social Judgment Theory, it produces recommendations for a new concept, namely Power and Social Appraisal which includes the concept: communication plays an important role in strengthening or weakening power and authority, as well as how social judgments are; effective communication can influence individual social perceptions and assessments of existing power and authority; and ineffective or manipulative communication can undermine Power, Authority, and Legitimacy. It is hoped that the research results will provide an important contribution in deepening understanding of the succession to the throne of the King and the political dynamics of his power from a communication perspective. This research also provides an understanding of how the decision to appoint GKR Pembayun to become GKR Mangkubumi is influenced by factors of communication of power, authority, legitimacy, and social judgments of the people.

Keywords: Sabda, Dawuh, Succession, Throne, King

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Jalajalaluh, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul "Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR Mangkubumi Sebagai Suksesi Takhta Raja (Studi *Power Authority Legitimacy* Max Weber)" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta Program Doktoral Ilmu Komunikasi.

Disertasi ini merupakan hasil penelitian yang panjang dan penuh tantangan. Penulisan ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, yang memberikan kontribusi dalam menuntaskan perjalanan akademik ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua, istri, anak, dan keluarga yang mendo'akan dan mendukung untuk studi lanjut Strata Tiga (S3). Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sihabudin., M.Si selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pengerjaan disertasi ini.
2. Dr. Fahrudin Faiz., M.Ag selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan wawasan lebih luas tentang fokus penelitian disertasi ini.
3. Dr. Ridzki Rinanto Sigit., M.M selaku Co-Promotor sekaligus Kaprodi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta.
4. Prof. Dr. Sunarto., M.Si selaku penguji yang telah memberikan masukan-masukan sehingga disertasi ini menjadi lebih baik lagi.
5. Dr. Andi Mirza Ronda., M.Si selaku penguji yang telah memberikan masukan, dan kesediaan diskusinya sehingga disertasi ini menjadi lebih baik lagi.
6. Dr. Hj. Dewi Widowati., M.Si selaku penguji yang telah banyak membuka pikiran dan pencerahan dalam telaah teori sehingga disertasi ini menjadi lebih baik.
7. Rully, Ignasius Liliek Senaharjanta, Media Sucahya, Ajeng Iva Febriana, Anton Ardiansyah dan semua rekan-rekan seangkatan, seperjuangan mojik kenangan.
8. Prof.Dr.Ir. Kholil, M.Kom., IPU selaku Rektor Universitas Sahid Jakarta,
9. Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., MM selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta.
10. Bapak/Ibu Dosen Program Doktoral Ilmu Komunikasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid Jakarta yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan inspirasi.
11. Terima kasih juga untuk Pak Edi, Pak Kiman, Pak Eko, Mba Gina dan semua pihak yang telah membantu semua urusan administratif.

12. Tim pencari data lapangan, Vero, Triyanto, Yuli, Herda, terima kasih atas kerja kerasnya dalam proses pengumpulan data kuantitatif di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Terima kasih untuk semua informan dan responden atas kesediaannya memberikan opini, pendapat, dan pernyataan sikapnya atas isu dalam disertasi ini.
14. Terima kasih juga rekan-rekan Zulisih Mariani, Siska Mardiana, Pagi Muhamad, Yudhistira Ardi Poetra, Novrian, Irfan Hakim, dan Ganjar Wibowo.
15. Kolega sejawat di FIKOM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan dan diskusinya selama pengerjaan disertasi.

Disertasi ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi. Semoga hasil penelitian ini menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama atau lebih luas lagi. Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan disertasi ini. Semoga dengan kerendahan hati, disertasi ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang berarti bagi semua pihak.

Terima Kasih

Jakarta, Agustus 2023

Sigit Surahman

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	16
1.2.1 Identifikasi Masalah	16
1.2.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	17
1.3.1 Maksud Penelitian	17
1.3.2 Tujuan Penelitian	18
1.4 Kegunaan Penelitian	18
1.4.1 Kegunaan Teoritis	18
1.4.2 Kegunaan Praktis	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	21
2.1 Kajian Pustaka	21
2.1.1 Penelitian Terdahulu	21
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	59

2.2.1	Teori Organisasi Max Weber	59
2.2.2	<i>Power</i>	62
2.2.3	<i>Authority</i>	63
2.2.4	<i>Legitimacy</i>	65
2.2.5	<i>Social Judgment Theory</i>	68
2.2.5.1	<i>Latitude of Acceptance</i>	71
2.2.5.2	<i>Latitude of Rejection</i>	72
2.2.5.3	<i>Latitude of Noncommitment</i>	72
2.3	Kerangka Konseptual	73
2.3.1	Kekuasaan Keraton Yogyakarta	73
2.3.2	Ruang Publik	74
2.3.3	Persepsi	75
2.3.4	Struktur Masyarakat Yogyakarta	79
2.4	Diskusi Antar Teori	80
2.5	Kerangka Pemikiran	86
2.6	Hipotesis	87
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	88
3.1	Metode Penelitian	88
3.2	Paradigma Penelitian	89
3.3	Pendekatan Penelitian Metode Campuran	91
3.4	Teknik Pengumpulan dan Jenis Data	92
3.4.1	Data Primer	93
3.4.2	Data Sekunder	96
3.5	Objek Penelitian	96
3.6	Subjek Penelitian	98
3.7	Populasi dan Sampel	98

3.8	Penelitian Formatif Menggunakan <i>Social Judgment Theory</i>	101
3.9	Analisis Data	102
3.9.1	Analisis Data Kualitatif	102
3.9.2	Analisis Data Kuantitatif	103
3.10	Interaksi Data	104
3.11	Interpretasi Data	104
3.12	Penyajian Data	104
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		106
4.1	Hasil Penelitian	106
4.2	Pembahasan	118
4.2.1	Power Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi	118
4.2.2	Authority Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi	121
4.2.3	Legitimacy Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi	124
4.3	Persepsi Masyarakat Yogyakarta	128
4.3.1	Pertanyaan Pengetahuan Responden pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan KGR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja	129
4.3.2	Pertanyaan Pengetahuan Responden pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan KGR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja	129
4.3.3	Pernyataan Sikap Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Power Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta.	130
4.3.4	Pernyataan Sikap Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Authority Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi	131

4.3.5	Pernyataan Sikap Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Legitimacy Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Magkubumi.	132
4.3.6	Sikap Masyarakat Yogyakarta pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun KGR Mangkubumi.	133
4.3.7	Latitude of Accepcence Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembaun Mendai GKR Mangkubuni sebagai Suksesi Takhta	135
4.2.7	Latitude Acceptence pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.	135
4.3.8	Latitude of Rejection pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR Mangkubumi	139
4.3.9	Latitude of Noncommitment pada Sada Dan Dawuh Sri Sultan tentag pengangkatan Puteri Mahkita	145
4.3.10	Pengaruh Kekuasan dan Penilaian Sosial Masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjdai GKR Mangkubumi.	149
4.4	Kemungkinan-Kemungkinan yang Terjadi Jika Kesultanan Yogyakarta Dipimpin Seorang Ratu	150
4.5	Refleksi Teoritis	154
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		160
5.1	Kesimpulan	160
5.2	Saran	160

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Stratifikasi Sabda, Fatwa, Undang-Undang, Dekrit, dan Perintah	55
Tabel 2.2	Rentang Sikap <i>Social Judgment Theory</i>	72
Tabel 2.3	<i>Social Judgment Process</i>	73
Tabel 2.4	Bagan Diskusi Antar Teori	88
Tabel 3.1	Rancangan metode campuran <i>Embeddeb</i>	95
Tabel 4.1	Data Responden	135
Tabel 4.2	Pengetahuan Responden	136
Tabel 4.3	<i>Latitude of Acceptence</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Power</i>	138
Tabel 4.4	<i>Latitude of Acceptence</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Authority</i>	138
Tabel 4.5	<i>Latitude of Acceptence</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Legitimacy</i>	138
Tabel 4.6	<i>Latitude of Rejection</i> Sabda dan Dawuh Sultan memiliki <i>Power</i>	141
Tabel 4.7	<i>Latitude of Rejection</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Authority</i>	142
Tabel 4.8	<i>Latitude of Rejection</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Legitimacy</i>	142
Tabel 4.9	<i>Latitude of Noncommitment</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Power</i>	147
Tabel 4.10	<i>Latitude of Noncommitment</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Authority</i>	148
Tabel 4.11	<i>Latitude of Noncommitment</i> Sabda dan Dawuh Sultan dari <i>Legitimacy</i>	148

Daftar Lampiran

1. Verbatim Wawancara Informan Penelitian
2. Verbatim Pernyataan Sikap Dan Tindakan Masyarakat Yogyakarta
3. Olah Data Kuesioner
4. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem kerajaan di Nusantara yang dipimpin oleh ratu pada masa kolonial atau era klasik nusantara dapat ditemui di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Beberapa kerajaan di Nusantara memiliki tradisi matriarki di mana kekuasaan kerajaan diwariskan melalui garis keturunan perempuan, sehingga penguasa kerajaan adalah seorang ratu (Carey, 1986).

Beberapa contoh kerajaan di Nusantara yang dipimpin oleh ratu pada masa kolonial/era klasik Nusantara, terdapat beberapa tokoh perempuan yang menjadi ratu sebuah kerajaan diantaranya: pertama, Ratu Sima (Kerajaan Sriwijaya) juga dikenal sebagai Shri Indradevi, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Ia merupakan permaisuri dari Raja Balaputradewa, penguasa Sriwijaya pada masa itu. Berdasarkan bukti sejarah Ratu Shima memerintah kerajaan Kalingga sekitar abad ke-7 M. Ratu wanita ini sangat termashyur, sebagai pemimpin yang dikenal adil, jujur dan tegas, sehingga seluruh rakyat sangat mencintai sekaligus hormat dan segan kepadanya. Salah satu yang paling di ingat oleh masyarakat adalah hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Hukuman ini tidak pandang bulu berlaku bagi seluruh rakyat termasuk bagi keluarga kerajaan. Kejujuran bagi Sang Ratu adalah segalanya dan ini diajarkan kepada seluruh rakyatnya (Soekmono, 1988).

Kedua; Ratu Kalinyamat (Kerajaan Demak) bernama asli Raden Ayu Inten, adalah istri dari Pangeran Hadiri, salah satu pemimpin Kerajaan Demak pada abad ke-16. Setelah kematian suaminya, ia mengambil alih pemerintahan

sebagai ratu dan memerintah dengan bijaksana. Ratu Kalinyamat, kemasyhurannya bergema dan terekam dalam kitab-kitab bangsa seberang. Penulis berkebangsaan Portugis Diego De Conto menjuluki Sang Ratu sebagai "*Rainha de Jepara senhora Poderosa e rice*". Artinya "Ratu Jepara yang gagah, berani dan berkuasa". Ratu Kalinyamat adalah tokoh wanita Indonesia yang penting peranannya pada abad ke-16. Ia menjadi tokoh sentral yang menentukan dalam pengambilan berbagai keputusan. Selama 30 tahun berkuasa, dia telah berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaannya. Sejak terjadinya konflik perebutan takhta di Demak, tokoh historis legendaris ini muncul dalam panggung sejarah Indonesia, khususnya sejarah Jawa. Popularitasnya jauh melebihi Sultan Prawata Raja Demak ke empat. Kiprah Sang Ratu dalam menghadapi Portugis misalnya, memberikan pelajaran tersendiri bagi bangsa ini akan arti persatuan dan kesatuan. Meski kala itu Pancasila belum lahir sebagai lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika pun belum muncul, namun Ratu Kalinyamat telah memperlihatkan semangat dan arti sesungguhnya dari semboyan pengikat semua elemen bangsa yang majemuk ini.

Karena kecerdasannya, sejak masih gadis dia memperoleh kepercayaan untuk memangku jabatan Adipati Jepara. Saat itu wilayah kekuasaannya meliputi Jepara, Pati, Kudus, Rembang, dan Blora. Sang ratu ini lah yang mendirikan kerajaan kecil di Mantingan, Jepara, Jawa- Tengah. Walaupun ia seorang wanita, putri Raja Demak ini dapat bersikap jauh lebih arif dibanding penguasa dan pola pikirnya jauh melampaui zamannya. Sepeninggal mendiang suaminya, internal kerajaan Demak diwarnai konflik kekuasaan. Karakternya yang kuat membuat ia dipercaya menjadi tokoh sentral dalam penyelesaian konflik keluarga tersebut. Peran yang dilakukan ini menunjukkan kemampuannya yang melebihi tokoh lain dalam menghadapi disintegrasi Kerajaan Demak. Namanya semakin populer di santero Jepara. Mendiang suaminya tidak

meninggalkan anak ketika ia pergi. Di tangan Ratu Kalianyamat, Jepara menjadi Kerajaan Bahari dimana rakyatnya hidup dengan mengandalkan lautan sebagai sumber utama penghidupannya. Ratu Kalinyamat yang berhasil mendirikan kerajaan Maritim yang kuat. Di bawah kekuasaannya Jepara mengalami perkembangan yang amat pesat yaitu menjadi pelabuhan terbesar di tanah Jawa serta memiliki armada laut yang besar dan kuat. Selama 30 tahun masa pemerintahannya, Jepara mencapai masa puncak kejayaannya.

Ratu yang ketiga di Nusantara: Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi (Kerajaan Majapahit) yang memerintah sebagai ratu Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi menggantikan ayahnya, Raja Hayam Wuruk, setelah ia turun takhta. Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi dikenal sebagai salah satu penguasa wanita terkuat dalam sejarah Nusantara. Majapahit sebagai sebuah kerajaan terus mengalami perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Sri Gitarja yang bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi ini (memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1328 hingga 1350 M), meletus pemberontakan Sadeng (1331 M). Kerajaan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi (Notosusanto, 1990).

Sistem kerajaan dengan kepemimpinan ratu ini telah berubah atau mengalami perubahan selama periode kolonial karena interaksi dengan kekuatan kolonial. Kolonial Belanda dapat mempengaruhi atau mengubah sistem pemerintahan tradisional di beberapa kerajaan. Pada masa peralihan kolonial di Jawa, terdapat perubahan besar dalam sistem pemerintahan kerajaan akibat datangnya kekuasaan kolonial Belanda.

Sebelum kedatangan Belanda, kerajaan-kerajaan di Jawa umumnya mengikuti sistem pemerintahan monarki atau kerajaan absolut, di mana kekuasaan berpusat pada seorang raja atau sultan yang memiliki otoritas mutlak. Namun, pada masa peralihan kolonial, Belanda mulai mendominasi wilayah Jawa dan menjalankan politik ekspansi dan kolonialisasi. Banyak kerajaan di Jawa menjadi negara-negara boneka di bawah penguasaan Belanda, yang berarti raja atau sultan tetap mempertahankan gelar dan simbol kekuasaan, tetapi keputusan penting dan kebijakan utama ditentukan oleh penguasa kolonial Belanda.

Setelah masa kolonial berakhir, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pemerintahan di Jawa dan di seluruh Indonesia berubah secara radikal. Indonesia membentuk negara demokrasi dengan sistem pemerintahan republik, di mana kekuasaan berada di tangan presiden dan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum. Kerajaan-kerajaan tradisional dihapuskan sebagai entitas politik dan penguasaan feodal berakhir. Sejak kemerdekaan, pemerintahan di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Kerajaan-kerajaan di Jawa kini umumnya berfungsi sebagai simbol budaya dan warisan sejarah, tetapi tidak lagi memiliki peran politik yang signifikan dalam pemerintahan nasional. Pada masa peralihan kolonial dan pasca kolonial, Kerajaan Mataram Islam mengalami perubahan dalam sistem pemerintahannya. Sebelum masa kolonial, Kerajaan Mataram Islam berada di bawah penguasaan Kesultanan Demak dan kemudian Kesultanan Pajang, sebelum akhirnya menjadi Kerajaan Mataram Islam yang lebih besar di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645).

Pada masa peralihan kolonial, terjadi konflik antara Kesultanan Mataram dengan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Pada masa ini, sistem pemerintahan di Mataram mengalami perubahan karena

campur tangan dan pengaruh dari penguasa kolonial Belanda. Belanda pada awalnya mencoba menjalin hubungan perdagangan dengan Mataram, tetapi konflik dan perang pecah akibat ambisi politik dan ekonomi kedua pihak. Akhirnya, kesultanan terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I dan Kesultanan Surakarta di bawah Pakubuwono II, sebagai bagian dari Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini juga menandai pengakuan Belanda atas kedaulatan kesultanan (Poesponegoro, 1983).

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pemerintahan di Indonesia berubah secara fundamental. Penguasaan kolonial Belanda berakhir, dan negara Indonesia menjadi negara merdeka yang berdiri di atas prinsip negara kesatuan. Sistem pemerintahan monarki atau kerajaan tidak lagi memiliki peran politik yang signifikan di tingkat nasional. Meskipun begitu, Keraton Yogyakarta dan Surakarta masih ada hingga saat ini dan menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia. Penguasa-penguasa di Keraton Yogyakarta dan Surakarta tetap memegang peran sosial dan kebudayaan yang penting, meskipun mereka bukan lagi pemimpin politik negara (Nasution, 2018).

Yogyakarta merupakan “daerah istimewa”, sistem monarki di Yogyakarta diakui keberadaannya. Hal ini telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2012 mengharuskan Gubernur Yogyakarta adalah orang yang memegang jabatan Raja Keraton Yogyakarta. Keberadaan UU tersebut pada satu sisi terlihat sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengatur sistem pemerintahan di Yogyakarta. Penetapan gubernur dan wakil gubernur tanpa pemilu di Yogyakarta telah memunculkan permasalahan kultural di dalam internal keluarga Keraton Yogyakarta. Hal itu menjadi modal untuk mengamankan takhta Kesultanan Yogyakarta dan tampuk kepemimpinan daerah (Gubernur). Terlebih sangat jelas tindakan tersebut dijamin oleh hak tradisional yang dimiliki Kesultanan

Yogyakarta secara legal formal diakui dalam Undang-Undang Negara (Surahman, 2017). Sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamnengku Buwono X (HBX) memiliki tanggung jawab yang besar, terlebih tanggung jawab moral ketika harus memosisikan pada dua hal kekuasaan yang berbeda.

Berdasar penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Octastefani dan Azizah tahun 2018 menunjukkan Sabda dan dawuh Raja dan Dawuh Raja, membuka peluang bagi Ratu pertama untuk DIY dan dengan demikian menyangkal politik warisan, terutama dengan menantang praktik patriarki. Perempuan telah diberikan kesempatan untuk menduduki posisi tertinggi dalam hierarki budaya Jawa-Islam, sebuah kesempatan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Kemampuan Sri Sultan HBX untuk menyelesaikan konflik internal keluarga kerajaan akan menentukan masa depan keraton dan struktur politik modern wilayah tersebut. Di sisi lain, penetapan Puteri Mahkota dapat dianggap sebagai strategi mempertahankan kekuasaan Sultan dalam menghadapi arus modernitas yang melanda DIY. Keterbukaan ruang bagi seorang Sultan perempuan akan menawarkan peluang baru dan lebih besar bagi dukungan publik di DIY, terutama bagi keberadaan Keraton dan Kesultanan.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan Rizal pada tahun 2019, memaparkan bahwa dalam konsep Jawa, kekuasaan politik bukanlah sesuatu yang bisa diganggu gugat. Kekuasaan politik adalah sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung diturunkan dari wahyu Yang Maha Kuasa. Raja Jawa tidak tahu istilah persaingan kekuasaan. Meminjam istilah Daoed Joesoef, kekuasaan tertinggi takhta diberikan oleh kediktatoran berkat Tuhan, sedangkan kediktatoran kekuasaan tertinggi presidensi dengan restu rakyat (*by the great of people*). Keduanya melambangkan kekuasaan seseorang yang secara formal berada di puncak pemerintahan. Kekuasaan takhta

mengacu pada monarki dan kursi presiden mengacu pada republik, tulis Daoed Joesoef dalam Kedaulatan Rakyat, 24 November 2008.

Sri Sultan adalah seorang raja yang masih sangat dekat dengan ajarannya. Dari perjalanan spiritualnya, Sri Sultan diyakini telah menangkap sifat-sifat yang dibutuhkannya untuk menciptakan momentum dengan menghilangkan pemisahan antara Mataram Hindu dan Mataram Muslim. Penghapusan kesenjangan juga pada akhirnya membuka peluang dimulainya kembali ajaran Dharma di Jawa. Perubahan hanya akan terjadi jika Sri Sultan memiliki keberanian dan keteguhan. Perubahan yang dilakukan oleh sultan akan berdampak besar, yang setara dengan dampak transformasi masa Mataram Hindu menjadi Mataram Islam. Pihak yang akan paling aktif dalam konflik ini adalah pihak-pihak yang bekerja keras untuk menjaga proses Islamisasi serta pihak-pihak yang menguasai singgasana.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati dan Santoso tahun 2021. Sri Sultan HBX mengubah tradisi suksesi gender dengan memberikan kesempatan kepada istri dan putrinya untuk menjadi aktivis di luar Keraton. Mereka juga diberi peran dan jabatan untuk menduduki jabatan di lembaga internal, yang pada awalnya ditempati oleh kerabat laki-laki. Misalnya, yang tertua diberi kesempatan untuk memimpin organisasi di luar istana. Sultan juga mengeluarkan Sabda dan dawuh Raja untuk mematahkan tradisi suksesi diikuti dengan penghapusan simbol-simbol tradisional yang terkait dengan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan putrinya menggantikannya sebagai Sultan dan Gubernur.

Sri Sultan HBX sebagai Kepala Daerah memiliki tugas memimpin masyarakat Yogyakarta dan mempertanggungjawabkan kepada Presiden. Sri Sultan HBX sebagai Raja, memimpin Kesultanan Yogyakarta dan rakyat Yogyakarta yang memiliki kekuasaan penuh, otoritas penuh, dan juga legalitas penuh atas segala keputusan yang

diambilnya. Kekuasaan, otoritas, dan legalitas Sri Sultan HBX mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Termasuk di dalamnya ketika Sri Sultan HBX mengeluarkan perintah, sabda, ataupun dawuh Raja yang sifatnya harus ditaati oleh semua rakyat Kesultanan Yogyakarta.

Sabda dan dawuh merupakan sebuah teks, jika sebuah pesan tulisan yang dipahami sebagai bentuk wacana. Jika teks tulisan diperluas lagi berarti semua bentuk “produk” dari diskursus, apakah ucapan, tulisan, gambar, atau bahkan benda. Pada perluasan makna tersebut, sabda sebagai sebuah pesan, yang sama sama dipandang sebagai teks, meskipun dengan sifat sifatnya yang otonom (Howard, 2000).

Sabda dan dawuh secara epetimologi merupakan teks atau tulisan, baik dalam pengertian sabda Tuhan, maupun sabda tersebut sudah dituangkan dalam kitab suci (alqur'an). Sebagai sebuah teks, setidaknya ada tiga konsep dasar: 1) apakah kandungan kitab suci sebagai sebuah tulisan melalui tangan manusia sama dengan ucapan atau sabda Tuhan, dalam pengertian apakah kitab suci merupakan *mirror image* dari sabda Tuhan. 2) karena sabda ditulis oleh manusia (atas perintah rasul) menggunakan bahasa manusia, apakah didalam sabda itu terbuka ruang bagi interpretasi manusia atas sabda Tuhan. 3) apakah sebuah sabda dapat mengalami perubahan makna, ketika berada dalam konteks sosial politik, ekonomi dan budaya yang berbeda, sehingga membuka ruang berbagai kemungkinan (Fitria, 2016).

Sabda dan dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X (HBX) tentang pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dikaitkan dengan suksesi takhta Raja di Kesultanan Yogyakarta. Banyak pihak yang menafsirkan isi dari sabda dan dawuh Sri Sultan HBX sesuai dengan perspektif masing-masing penafsir sesuai dengan kepentingan yang dibawanya. Pro dan kontra muncul setelah Sri Sultan HBX mengeluarkan “Sabda Raja dan Dawuh Raja” yang berisikan

Perubahan gelar Sri Sultan dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono, penghilangan gelar “Khalifatullah” dan pemberian gelar pada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi.

Berikut isi Sabda Raja Sri Sultan HBX pada 30 April 2015

Gusti Allah Gusti Agung Kuasa cipta paringana sira kabeh adiningsun sederek dalem sentolo dalem lan Abdi dalem. Nampa welinge dhawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta lan rama ningsun eyang eyang ingsun, para leluhur Mataram Wiwit waktu iki ingsun Nampa dhawuh kanugrahan Dhawuh Gusti Allah Gusti Agung, Kuasa Cipta Asma kelenggahan Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing tata Panatagama. Sabda Raja iki perlu dimengerteni diugemi lan ditindake yo mengkono.

Dalam bahasa Indonesia, Sabda Raja tersebut artinya:

Allah, Tuhan yang Agung, Maha Pencipta, ketahuilah para adik-adik, saudara, keluarga di Keraton dan abdi dalem, saya menerima perintah dari Allah, ayah saya, nenek moyang saya dan para leluhur Mataram, mulai saat ini saya bernama Sampean Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langgenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo. Sabda Raja ini perlu dimengerti, dihayati dan dilaksanakan seperti itu sabda saya.¹

Dari diumumkannya sabda tersebut mulai bermunculan protes dari segenap keluarga keraton dan abdi dalem. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan nama “Buwono” menjadi “Bawono” dan penghilangan gelar “Khalifatullah” dari Sri Sultan HBX.

Beberapa spanduk telah dipasang di berbagai lokasi, termasuk Titik Nol Kilometer, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Kauman, Pasar Ngasem, dan Simpang Gondomanan, yang menandakan bahwa itu adalah wilayah Warga Kauman. Kauman adalah kampung yang dihuni oleh warga Muhammadiyah di Yogyakarta, berdekatan dengan Keraton Yogya. Muhammad Muslih, seorang koordinator paguyuban parkir di area Alun-alun Utara berusia 32 tahun, menyatakan bahwa spanduk tersebut adalah bentuk protes terhadap Raja Keraton Yogyakarta yang dianggap telah melanggar adat-istiadat keraton.

Muslih telah mencetak sekitar 200 spanduk serupa sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap Sabda Raja. Spanduk tersebut dipasang di seluruh kabupaten dan kota DIY agar warga tidak hanya diam, tetapi juga berani menyuarkan ketidaksetujuan ketika ada masalah semacam ini.

¹ <http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664761/Berikut-Isi-Utuh-Sabda-Raja-Yogya> diakses 29 April 2019

Muslih menyatakan bahwa gerakan menolak Sabda Raja akan terus digencarkan dalam aksi yang lebih besar di masa depan. Walaupun mereka menyadari bahwa Sabda Raja tidak mungkin dicabut, namun aksi tersebut dimaksudkan untuk mencegah pelaksanaannya. Muslih berencana untuk mengumpulkan perwakilan dari 60 pondok pesantren di DIY untuk menggelar aksi menolak Sabda Raja, yang bertujuan untuk mendesak Raja agar tidak mengubah paugeran keraton, termasuk wacana raja perempuan.

Sebuah aksi Pisowanan Agung di komplek Pagelaran Keraton Yogya akan diadakan oleh sejumlah elemen masyarakat, yang dipimpin oleh kerabat keraton, Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat atau Romo Tirun, dan melibatkan perwakilan dari masing-masing kabupaten-kota DIY sekitar 100 orang. Tujuan dari aksi ini adalah untuk mendesak Raja agar tidak melakukan perubahan terhadap paugeran keraton².

Satu minggu kemudian Sri Sultan HBX mengeluarkan Dawuh Raja, yang isinya sebagai berikut:

Berikut isi Dawuh Raja yang dikeluarkan Sultan pada 5 Mei 2015:

Siro adi ingsun, sekseono ingsun Sampean Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo Kadawuhan netepake Putri Ingsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun tak tetepake Gusti Kanjeng Ratu GKR Mangkubumi. Mangertenono yo mengkono dawuh ingsun.

Dalam bahasa Indonesia, Dawuh Raja tersebut artinya:

Saudara semua, saksikanlah saya Sampean Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo mendapat perintah untuk menetapkan Putri saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mengertilah, begitulah perintah saya.³

Sri Sultan HBX dalam konteks kesultanan Yogyakarta merupakan wakil Tuhan. Dalam hal ini Sabda dan Dawuh yang disampaikan merupakan perintah langsung dari Tuhan kepada Sultan untuk disampaikan ke seluruh keluarga keraton, abdi dalem, dan masyarakat Yogyakarta tanpa harus mengkomunikasikan kepada siapapun.

"Ora ono ukoro ndadak. Dawuh iku kehendak Gusti Allah. Meniko keterangan inggang saged kulo tampi sangking dawuh. Dados sedoyo wau miturut

² <https://nasional.tempo.co/read/664906/pasca-sabda-raja-keraton-yogya-dikepung-spanduk-protes>, diakses 15 Juli 2023

³ <http://www.tribunnews.com/regional/2015/05/09/apa-isi-sabdaraja-dan-dawuh-raja-sri-sultan-Hamengku-Buwono-x> diakses 29 April 2019

pemanggil kulo. (Tidak ada perkara yang mendadak. Perintah itu kehendak Tuhan YME. Keterangan yang saya sampaikan tadi itulah yang saya terima dari perintah Gusti Allah. Jadi semua penjelasan tadi menurut hasil penggalian rasa saya)," kata Sri Sultan dalam konferensi pers di pendopo kediaman Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi di Keraton Kilen, Yogyakarta. Jadi, menurut Sultan, sebagai Raja Yogyakarta dirinya hanya melaksanakan perintah Gusti Allah, Gusti Agung yang Maha Kuasa dan Pencipta. "Karena saya takut dimarahi Tuhan YME. Buat adik-adik dan saudara yang tidak mengerti sejatinya Sabda Raja dan Dawuh Raja, saya tidak akan bereaksi apa-apa. Bagi saya itu tidak apa apa, daripada saya dimarahi Gusti," ujar Sultan⁴.

Setelah bermunculan rekasi dari keluarga, abdi dalem, dan masyarakat Yogyakarta, Sri Sultan HBX baru melakukan klarifikasi terkait sabda dan dawuh bertempat di Ndalem Wiranegaran, Jumat (8/5/2015) sore, Sri Sultan HBX menyampaikan jika dua hal itu merupakan dawuh (perintah) dari Allah melalui para leluhur sehari sebelum Sabdaraja dan Dawuhraja disampaikan. Penjelasan ini untuk meluruskan informasi mengenai Sabdaraja yang dinilai tersebar tidak lengkap dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Saya akan menyampaikan dua hal yang bagi saya menjadi polemik biarpun "bener ning ra pener", karena yang diotak-atik lima hal yang sepenuhnya belum tentu benar dengan apa yang saya lakukan. Sabda Raja ini nggak pakai assalamualaikum, bukan berarti di Keraton tidak boleh pakai assalamualaikum, tapi saya merasa bahwa ini dawuh Allah dan leluhur saya, saya sampaikan. Titah ini kepada orang lain. Masa kalau dari Allah pakai assalamualaikum.

Ada apa, kenapa Buwono pun gantos Bawono. Buwono kuwi jagat alit, bawono jagat ageng, ibarat menawi Buwono niku nasional, bawono niku internasional, kinten-kinten ngaten. Kasepuluh, Ka dasare lirgumanti, koyo conto kasapisan, kapindo, katelu lan sakteruse, ora iso disebut kasedoso. Keno opo ora iso disebut kaping sedoso amargo kaping kuwi itungan tambahan, sanes lir gumanti. Suryaning Mataram, dasare perjanjian Ki Ageng Pemanahan kalian Ki Ageng Giring sampun Rampung, mboten pun iwai, rampung saking menopo. Wontennipun Mataram lami saking jaman Ken Arok singosari dumungi Pajang, niko ugi Mataram niko ingkang pun sebat Mataram lami. Mataram enggal niko soko jaman eyang Panembahan Senopati dumugi sakmeniko, sampun manunggal dasaripun lir gumanti. Dados wonten Mataram Lami, lajeng wonten perjanjian Pemanahan kalian Giring, niko misahaken kalian Mataram Enggal. Nah sakmeniko amargi perjanjian niko sampun rampung, pramilo saking jaman Ken Arok dumugi Pajang, Pajang dumugi Mataram, Mataram jaman Eyang Panembahan dumugi sakmeniko, niko dasaripun keturunan ingkang pun maksud lir gumanti, mboten pun pisahaken malih anata ingkang lami, ingkang enggal sebab wonten ing tangan enten perjanjian. Lajengipun nami kulo ingkah lami kulo

⁴ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/623721-alasan-sultan-keluarkan-sabda-raja>

mboten Sri Sultan, nanging Kanjeng Sultan. Kanjeng diganti Sri miningko kundur sampurnaning jagat lan kuncaraning jagat, ugo kanggo ngandeng gathuking jagat karo ukoro asmo utowo gelar kalenggahan kang maringi Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipto. Khalifatullah Sayidin di ganti Langgening Tata Panatagama, LANGgeng kang didawuhake Gusti Allah Gusti Kuasa Cipta, ngagem prnakane jagat. Kahanan saiki ira iso dianggep sepele kaya Raja sakdurunge, amargo wes malik jaman. Dados kulo niko kebagian mboten kening perjanjen, mago ikang kadawuhan nika jaman enggal. Menyangkut masalah Pembayun, pokoknya saya netepaken kanti gelar yang tadi sudah saya baca, yaitu. Lakone mengko piye haiyo aku yo ra ngerti. Aku mung dawuhi netepake kok, yo tak tetepake. Kuwi klasifikasine opo yo aku rawani, aku salah, karena ora nono klasifikasi itu, ha nanti kita tunggu aja, saya tidak mau melangkah, kalau saya melangkah lebih dari itu, berarti itu kepentingan saya. Sedangkan itu bukan, jadi pertanyaan itu tidak bisa saya jawab sepenuhnya. Saya hanya menetapkan putri saya yang tertua menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi dan seterusnya⁵.

Dalam penjelasannya tentang pengangkatan putri mahkota melalui sabda dan dawuh, kekuasaannya terlihat melalui penggunaan kata-kata bijaksana dan penuh makna dalam sabda yang diucapkan di depan seluruh hadirin. Sri Sultan HBX memiliki authority yang diakui oleh rakyat dan bangsawan karena kedudukannya sebagai pemimpin resmi dan pewaris takhta kerajaan. Sabda dan dawuhnya menjadi bentuk penggunaan authority yang sah, karena sebagai Sultan, dia memiliki hak untuk menentukan penerus takhta dengan pertimbangan yang mendalam dan berdasarkan ajaran dan etika kerajaan. Pengangkatan putri mahkota melalui sabda dan dawuh Sri Sultan HBX membawa unsur legitimasi karena keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan disampaikan dengan penuh kearifan.

Penjelasan Sri Sultan HBX tentang sabda dan dawuh dalam pengangkatan putri mahkota mencerminkan penggunaan *power* melalui kata-kata bijaksana dan penuh makna, *authority* sebagai seorang Sultan yang berhak menentukan penerus takhta, dan *legitimacy* karena keputusannya diterima dan diakui oleh rakyat sebagai sesuatu yang sah dan sesuai dengan ajaran kerajaan. Kombinasi ketiga konsep ini membantu memperkuat

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=g3utzBjFkY8&t=23s>

dan menjaga stabilitas kekuasaan Sri Sultan HBX serta memastikan bahwa pengangkatan putri mahkota menjadi langkah agar sabda dan dawuh tersebut diakui dan diterima.

Sebagai raja, Sri Sultan HBX memiliki *power, authority, dan legitimacy*. Termasuk dalam hal ini adalah mengeluarkan sabda dan dawuh yang sifatnya memaksa serta harus ditaati oleh semua masyarakat Yogyakarta. Sri Sultan HBX sebagai raja mempunyai power untuk membentuk tujuan-tujuan superordinat yang diorientasikan untuk rakyatnya, dengan demikian rakyat akan tunduk dan patuh pada kekuasaan. Tindakan sosial masyarakat Yogyakarta dibatasi dan dimungkinkan oleh kehendak, perintah, atau aturan dari penguasa. Kekuatan perintah bisa saja terlepas dari rasa kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi. Ketika kewajiban itu ada, maka perintah itu bisa dirasakan sebagai kewajiban yang sah sebagai suatu otoritas. Dengan sara kewajiban, kekuasaan ditransformasikan menjadi otoritas, di mana legitimasi atau aturan diterima.

Kekuasaan bisa juga didefinisikan sebagai pemaksaan kehendak yang tidak sah, hal ini terjadi di mana kekuasaan kehilangan rasa kewajiban yang menaungi dominasi. Penilaian tentang legitimasi atau sebaliknya dari aturan, otoritas bukanlah hak prerogatif dari penguasa, tetapi dari rakyat yang diperintah. Alasan inilah kekuasaan dianggap sebagai suatu relasi sosial yang secara inheren akan bersifat dinamis. Sementara klaim tentang kekuasaan bisa ditunjukkan melalui kebiasaan, diucapkan, tertulis, diatur, atau ditafsirkan dengan cara-cara lain, artinya akan selalu ada kemungkinan bahwa perintah bisa mendapatkan perlawanan. Perlawanan yang terjadi bisa karena konteks di mana ditafsirkan oleh masyarakat yang tunduk pada perintah atau ditafsirkan oleh masyarakat yang tidak tunduk pada perintah.

Weber (1978) mengemukakan, perintah dapat diinterpretasikan dengan cukup fleksibel. Organisasi berusaha untuk menggantikan perlunya intervensi yang sering ke

dalam tubuh politik melalui kekuasaan yang melembagakan dominasi rasionalitas formal; yaitu kemungkinan bahwa suatu perintah dengan konten spesifik akan dipatuhi. Dengan demikian, otoritas adalah hubungan aturan yang sah, di mana kebermaknaan hubungan sosial bertumpu pada asumsi yang diterima tanpa pemaksaan oleh semua pihak. Baik hubungan kekuasaan maupun aturan yang sah harus terjadi dalam lingkup tertentu, suatu struktur dominasi yang dipahami sebagai suatu tatanan yang dianggap oleh aktor sebagai suatu keharusan atau teladan yang mengatur organisasi.

Menjadi penting untuk tidak menafsirkan sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX terlalu harfiah; sebuah perintah dalam hal ini sabda dan dawuh raja bukan hanya sesuatu yang hanya diungkapkan melalui ucapan atau tulisan. Sri Sultan HBX mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam suatu hubungan sosial untuk melakukan kemauannya sendiri sekalipun mendapatkan penolakan-penolakan. Sampai saat ini sebagian besar pendekatan terhadap legitimasi telah dikaitkan dengan konsepsi otoritas berbasis Weberian. Dalam pengertian ini legitimasi dihasilkan melalui rasionalitas formal dan struktur yang mewakili baik “hak untuk eksis” (pembenaran diri) dan kesesuaian budaya dengan lingkungan (evaluasi dari luar). Seperti yang dikatakan Hardy dan Clegg (1996) “kekuatan yang tertanam dalam hierarki telah dipandang sebagai “normal” dan “tidak terhindarkan” mengikuti desain formal organisasi.

Dalam pandangan Weber, kekuasaan Sultan dibagi menjadi tiga tipe utama: tradisional, rasional-hukum, dan karismatik. Dalam konteks "sabda sultan," dengan mempertimbangkan aspek karismatik, otoritas tradisional, dan legitimasi. Otoritas karismatik melibatkan kekuasaan yang didasarkan pada kekarismanya pemimpin yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks "sabda dan dawuh Sultan," sultan juga dapat memiliki kekarismanya sendiri yang dilihat oleh rakyatnya sebagai sumber otoritas dan legitimasi. Kepercayaan pada kemampuan sultan untuk memberikan sabda atau petunjuk

yang dianggap memiliki kekuatan atau kebenaran khusus, dapat menjadi sumber otoritas dan kekuasaan karismatik.

Otoritas tradisional berkaitan dengan kekuasaan yang didasarkan pada tradisi dan keturunan. Dalam hal ini, "sabda dan dawuh Sultan" dapat dianggap sebagai wujud dari otoritas tradisional. Sultan dalam konteks ini adalah pemimpin yang memegang kekuasaan turun-temurun berdasarkan warisan dan garis keturunan, dan otoritasnya diterima karena adanya keyakinan dan norma-norma tradisional di masyarakat yang mengakui kedudukannya sebagai Sultan.

Legitimasi Weber memandang legitimasi sebagai dasar keabsahan atau penerimaan oleh masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Legitimasi bisa bersumber dari tradisi, hukum, atau karisma pemimpin. Dalam konteks "sabda dan dawuh Sultan," legitimasi Sultan didasarkan pada keyakinan dan pengakuan dari masyarakat bahwa sultan adalah pemimpin yang sah dan memiliki otoritas untuk memberikan sabda atau petunjuk yang harus diikuti.

Sabda dan dawuh Sri Sultan HBX memiliki *power*, *authrity*, dan juga *legitimacy* yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat Yogyakarta. Sabda dan dawuh Sri Sultan HBX memiliki kekuasaan untuk memerintah masyarakat Yogyakarta agar tunduk dan patuh terhadap isinya. Sedangkan dari sisi wewenang atau otoritas, tentu saja Sabda dan dawuh Sri Sultan HBX mempunyai otoritas yang kuat dan berlaku bagi seluruh masyarakat Yogyakarta. Kemudian dari legalitas atau legitimasi Sabda dan dawuh Sri Sultan HBX sendiri memiliki kekuatan hukum atau aturan keraton karena sifat dari sabda dan dawuh tersebut wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Yogyakarta.

Semenjak sabda dan dawuh Sri Sultan HBX diumumkan, selama periode 2015-2018, konflik ini semakin memanas ketika beberapa pihak mulai menafsirkan sabda dan dawuh dengan cara yang berbeda. Pengikut setia dan para intelektual mendukung

interpretasi tertentu, sementara kelompok lain memperdebatkan arti yang lebih dalam dan kontekstual dari sabda dan dawuh tersebut.

Pada tahun-tahun awal konflik, komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat mulai mengalami hambatan, dan berbagai rumor dan spekulasi menambah kerumitan situasi. Kedua kubu merasa semakin yakin dengan pandangan masing-masing, yang akhirnya menyebabkan ketegangan yang lebih besar di dalam keraton dan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018, upaya mediasi dan dialog mulai dilakukan oleh pihak-pihak yang prihatin dengan situasi tersebut. Berbagai pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan anggota keraton bekerja sama untuk mencoba meredakan ketegangan dan mengembalikan harmoni. Pada titik ini, tampaknya konflik tersebut mulai mereda dan masyarakat berharap bahwa perdamaian akan tercapai.

Namun, pada tahun 2021, konflik tiba-tiba mencuat kembali ke permukaan ketika adik Sri Sultan HBX, yang menjabat sebagai pengageng di keraton, dipecat dari jabatannya. Keputusan ini memicu gelombang protes dan kontroversi di kalangan pengikut setia, yang melihat langkah ini sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan prinsip keadilan. Pada akhirnya, situasi ini menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas dalam menjaga harmoni dan tradisi dalam keraton.

Teks yang terdapat di dalam sabda dan dawuh tersebut merupakan pesan dan perintah dari seorang Raja kepada seluruh rakyatnya, tidak terkecuali anggota keluarga keraton, dan abdi dalem keraton.

“Kalau diprosentase itu 75% abdi dalem menolak atau tidak setuju dengan Sabda dan dawuh Raja. Abdi dalem yang senior atau yang sudah sepuh (tua) cenderung menolak, tetapi abdi dalem yang muda-muda karena orang-orangnya Wironegoro dan Notonegoro, serta karena pragmatisme, ya menerima saja” (Nardi, Abdi Dalem, Guru Kesenian di Keraton Yogyakarta, Wawancara, 20 Oktober, Seberapa Besar Penolakan Abdi Dalem Terhadap Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX, 2021).

Gejala-gejala perlawanan tersebut tampak pada beberapa kegiatan budaya yang digelar oleh Keraton Yogyakarta. Misalnya pada pagelaran seni tari, yang di mana ketika ada undangan yang ditujukan kepada abdi dalem dan tertera tanda tangan Sri Sultan HBX, maka Sebagian besar abdi dalem yang senior tidak mau menghadiri undangan tersebut. Kemudian banyak abdi dalem yang akhirnya berprinsi mengabdikan untuk kebudayaan, bukan untuk Sri Sultan HBX.

“Posisioning yang strategis itu yang kebanyakan menolak Sabda Raja ini, Pengageng-Pengageng katakanlah, hampir semua menolak sabda raja, hanya karena ewuh pekewuh tadi itu, jadi penolakannya terjadi tidak kasat mata. Paling tiba-tiba sakit terus mati. Banyak yang sakit dan terus meninggal karena tidak kuat menanggung/menahan beban, itu yang terjadi demikian“ (Nardi, Abdi Dalem, Guru Kesenian di Keraton Yogyakarta, Wawancara, 20 Oktober 2021, Bagaimana Abdi Dalem Menyikapi Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX).

Penolakan-penolakan yang muncul tersebut berasal dari golongan abdi dalem atau kelompok-kelompok masyarakat Yogyakarta yang sudah sepuh. Kecenderungan masyarakat Yogyakarta yang sudah sepuh dan masih memegang tradisi enggan menerima sabda dan dawuh Sri Sultan HBX. Sedangkan generasi muda baik abdi dalem maupun masyarakat Yogyakarta lebih cenderung tidak terlalu mementingkan baik secara tekstual maupun kontekstual dari isi sabda dan dawuh Sri Sultan HBX.

Kekuasaan merupakan sesuatu yang dipegang dan dikendalikan oleh penguasa dan yang mereka tidak berdaya mencoba merebut kontrolnya. Kekuasaan dipekerjakan dan dilakukan melalui jaring organisasi individu adalah kendaraan kekuasaan, bukan miliknya poin aplikasi pertama bahwa kekuasaan dikonseptualisasikan sebagai rantai atau sebagai jaring adalah sistem hubungan yang menyebar ke seluruh masyarakat, bukan hanya sebagai seperangkat hubungan antara yang tertindas dan penindas. Kedua, individu tidak harus dilihat hanya sebagai penerima kekuasaan, tetapi sebagai 'tempat' kekuasaan diberlakukan dan tempat di mana dilawan. Dominasi tersebut tidak mencakup

hanya wilayah personal, tetapi masuk juga wilayah yang lebih luas seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, pendidikan, dan lain-lain.

Kondisi ini memosisikan manusia sebagai konstruktor yang bebas dalam mengkreasi dan menstrukturkan dunia berdasarkan penafsiran subjektif masing-masing atas realitas sosial yang terjadi. Seperti dikemukakan oleh (Berger, 1989) manusia adalah pencipta realitas sosial yang objektif dan dilakukan melalui eksternalisasi, seperti halnya realitas objektif mempengaruhi manusia melalui internalisasi. Manusia yang berpikir dengan dialektis, mempunyai tesis, antitesis, dan juga sintesis, sehingga melihat masyarakat dipahami sebagai sebuah produk, begitupula sebaliknya manusia sebagai produk masyarakat. Masyarakat seperti halnya demokrasi, telah mengenal banyak makna pada instrumen di seluruh temporalitas, sosiopolitik dan geopolitik yang berbeda. Ketika ruang sosial tersebut dilihat ulang, penting untuk memahami bahwa masyarakat sipil, "dalam bentuk jaringan inisiatif sipil yang tumpang tindih dan apa yang disebut gerakan sosial baru, telah berpaling dari politik dan kebijakan. Masyarakat mulai bertindak atas kemauannya sendiri pada isu-isu yang ada.

Melalui uraian permasalahan tersebut, dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan memosisikan Sri Sultan HBX sebagai Raja di Kesultanan Yogyakarta dan sebagai aktor komunikasi atau komunikator yang menyampaikan pesannya dalam bentuk Sabda dan Dawuh. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR Mangkubumi Sebagai Suksesi Takhta Raja (Studi *Power, Authority, Legitimacy* Max Weber).

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Banyak terjadi pro dan kontra di masyarakat atas isi pesan sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi Takhta Raja.
2. Banyak terjadi pro dan kontra di kalangan Abdi Dalem Keraton atas isi pesan sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi Takhta Raja.
3. Banyak terjadi multi tafsir dari isi sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi Takhta Raja.
4. Banyak terjadi perbincangan di publik terkait polemik sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi Takhta Raja.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang ada, peneliti merumuskan penelitian ini pada bagaimana *Power, Authority, Legitimacy*, dan *Social Judgment* dalam konteks Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX mengenai pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi mempengaruhi sikap masyarakat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dibutuhkan beberapa pertanyaan yang kemudian dituangkan dalam pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana dinamika pro dan kontra Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dari perspektif *Power, Authority, dan Legitimacy* Max Weber?
2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dari perspektif *Social Judgment Theory*?

3. Seberapa kuat pengaruh dari kekuasaan Sri Sultan HBX terhadap penilaian masyarakat pada Sabda dan Dawuh tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memahami berbagai fakta sosial melalui observasi, wawancara, dan survey sehingga mampu menjelaskan dan menjawab secara akademis terkait interpretasi power, otoritas, legitimasi serta sikap masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan bagaimana dinamika pro dan kontra Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dari perspektif *Power, Authority, dan Legitimacy* Max Weber.
2. Untuk menguraikan sikap masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dari perspektif *Social Judgment Theory*.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari kekuasaan dan penilaian masyarakat pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan ilmu komunikasi pada umumnya dan komunikasi sosial di ruang publik pada khususnya. Kajian dalam penelitian ini berfokus

pada analisis *power, authority, legitimacy*, serta sikap masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta Raja pada Masyarakat Yogyakarta.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan melakukan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan pandangan baru secara praktis tentang bagaimana sebaiknya sebuah Kesultanan yang masih lekat dengan paugeran atau aturan tradisi yang kuat menyikapi tuntutan perkembangan zaman. Baik secara pemikiran maupun secara tindakan. Dalam hal ini khususnya Kesultanan Yogyakarta mampu menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat pelestari kebudayaan sebagai identitas keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mencoba menawarkan pembahasan dalam beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah. Permasalahan yang peneliti ungkap adalah analisis wacana makna sosial pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Sehingga peneliti menemukan alasan perlunya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bagian awal dalam penelitian ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada tahapan bab awal ini penulis memperkenalkan secara singkat konteks dan permasalahan yang akan penulis angkat sebagai cerminan atas isi disertasi ini secara menyeluruh.

Bab 2. Tinjauan Konseptual dan Kerangka Pemikiran. Pada bab ini penulis melakukan penjelasan dan ulasan mengenai ide dasar kebutuhan teori dan konsep untuk pijakan utama penulis dalam penelitian. Kemudian penulis mengurai berbagai fenomena perbincangan interpretasi masyarakat tentang kekuasaan, otoritas, legitimasi, dan sikap masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi pada Masyarakat Yogyakarta.

Bab 3. Metode dan Paradigma Penelitian. Pada bab ini penulis mencoba menguraikan perihal metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian disertai. Ulasan dan implementasi paradigma dalam melihat realitas yang sedang diteliti. Metodologi ini adalah bagian penting karena mempengaruhi hasil dan olahan data. Sehingga kejujuran peneliti sangat diutamakan, terutama kejujuran berbasis identifikasi penelitian. Sekilas Gambaran Umum Kesultanan Yogyakarta. Pada bab ini penulis berusaha lebih mendalam untuk mengenalkan objek penelitian. Kesultanan Yogyakarta sebagai simbol tradisi, budaya yang “Adi Luhung” dan menjadi tolok ukur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bab 4. Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab 5. Kesimpulan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian pernah dilakukan berkaitan dengan suksesi takhta Raja, Sri Sultan HBX, mulai dari *public sphere*, semiotika, gender, *power authority legitimacy*, dan *social judgment theory*. Sebagai rujukan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini, perlu mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan yang dibaca oleh peneliti:

Penelitian pertama berjudul “*The Dynamics of Women and Political Heritage in Yogyakarta: A Critical Reflection in Welcoming the Next Leader*” oleh Theresia Octastefani dan Nur Azizah Universitas Gadjah Mada, di Muwazah, Jurnal Kajian Gender, 2018, Volume 10:2, DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1783>. Hasil dari penelitian menjelaskan konteks sosial politik Kesultanan Yogyakarta atau DIY, diperlukan kehati-hatian dalam membaca manifestasi politik pusaka. Sabda dan dawuh Raja, membuka peluang bagi Ratu pertama untuk DIY dan dengan demikian menyangkal politik warisan, terutama dengan menantang praktik patriarki. Perempuan telah diberikan kesempatan untuk menduduki posisi tertinggi dalam hierarki budaya Jawa-Islam, sebuah kesempatan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.

Bagi yang kontra dengan Sabda dan dawuh Raja menekankan, dalam argumen mereka, tradisi patriarki yang diwariskan yang membatasi posisi sultan hanya kepada laki-laki. Kemampuan Sri Sultan HBX untuk menyelesaikan konflik internal keluarga kerajaan akan menentukan masa depan keraton dan struktur politik modern wilayah tersebut. Di sisi lain, penetapan Puteri Mahkota dapat dianggap sebagai strategi mempertahankan kekuasaan Sultan dalam menghadapi arus modernitas yang melanda DIY. Keterbukaan ruang bagi seorang Sultan perempuan akan menawarkan peluang

baru dan lebih besar bagi dukungan publik di DIY, terutama bagi keberadaan Keraton dan Kesultanan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pencarian data perlu melakukan pengumpulan data primer, penulis mengumpulkan dengan cara: wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci; *Focus Group Discussion* (FGD), prosedur pengumpulan data dilakukan untuk melengkapi wawancara mendalam dengan key informan; dan observasi, yang dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengumpulkan data kontekstual mengenai kondisi sosial politik di DIY. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder, penulis mengumpulkan data dari literatur dan laporan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah, jurnal, dan dokumen penelitian sebelumnya, serta berbagai kebijakan yang terkait dengan topik ini.

Penelitian terdahulu kedua berjudul "*Succession of King Hamengku Buwono X Ngayogyakarta*" yang dilakukan oleh Rizal, A.N.S., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada Jurnal *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 2019, vol. 24, núm. Esp.6. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa dalam konsep Jawa, kekuasaan politik bukanlah sesuatu yang bisa diganggu gugat. Kekuasaan politik adalah sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung diturunkan dari wahyu Yang Maha Kuasa. Raja Jawa tidak tahu istilah persaingan kekuasaan. Tidak seperti kekuasaan dalam konsep demokrasi modern, rakyatlah yang memutuskan. Tanpa dukungan rakyat, sulit merebut kekuasaan. Sistem politik modern dan demokratis, jabatan politik dapat diperjuangkan oleh siapa saja, bukan oleh kelompok keluarga yang eksklusif. Oleh karena itu, ada persaingan dan kontestasi, dan rakyat diberi hak untuk memilih.

Meminjam istilah Daoed Joesoef, kekuasaan tertinggi takhta diberikan oleh kediktatoran berkat Tuhan, sedangkan kediktatoran kekuasaan tertinggi presidensi

dengan restu rakyat (*by the great of people*). Keduanya melambangkan kekuasaan seseorang yang secara formal berada di puncak pemerintahan. Kekuasaan takhta mengacu pada monarki dan kursi presiden mengacu pada republik, tulis Daoed Joesoef dalam *Kedaulatan Rakyat*, 24 November 2008.

Sri Sultan adalah seorang raja yang masih sangat dekat dengan ajarannya. Dia masih aktif dalam kegiatan sehari-hari termasuk puasa dan meditasi. Dari perjalanan spiritualnya, Sri Sultan diyakini telah menangkap sifat-sifat yang dibutuhkannya untuk menciptakan momentum dengan menghilangkan pemisahan antara Mataram Hindu dan Mataram Muslim. Penghapusan kesenjangan juga pada akhirnya membuka peluang dimulainya kembali ajaran Dharma di Jawa. Perubahan hanya akan terjadi jika Sri Sultan memiliki keberanian dan keteguhan. Perubahan yang dilakukan oleh sultan akan berdampak besar, yang setara dengan dampak transformasi masa Mataram Hindu menjadi Mataram Islam. Pihak yang akan paling aktif dalam konflik ini adalah pihak-pihak yang bekerja keras untuk menjaga proses Islamisasi serta pihak-pihak yang menguasai singgasana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang difokuskan pada penelusuran dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan baik data primer maupun data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan historis-sosiologis dengan menelusuri sejarah perkembangan (detail sejarah) dari isu yang disajikan. Selain itu, penyelenggara menggunakan pendekatan politik yang bertujuan untuk memahami perjalanan sejarah kegiatan politik tokoh politik yang cara-cara mencapai tujuan politik kebutuhan yang diciptakan oleh situasi politik dan kewajiban yang dihasilkan dari tujuan politik tersebut.

Penelitian yang ketiga berjudul "*Sexuality and Religion in the Public Sphere. Opinions of French Students on Mediatization of Intimate Sphere*" oleh Mihaela

Alexandra Tudor dan Stefan Bratosin, Université Paul Valéry Montpellier, Zer, Universidad del País Vasco, 2020, 25 (49), pp.111-128. 10.1387/zer.21612 . halshs-03080660. Studi ini menggunakan perspektif sosiologis interaksionisme simbolik (Strauss, 1992) yang memenuhi syarat (domain tatap muka sebagai domain analitis yang layak, yang menggunakan metode analisis mikro Goffman (1988: 191). Oleh karena itu, dalam kerangka yang dibatasi oleh pendekatan teoretis yang diumumkan sebelumnya, peneliti mempertimbangkan untuk penelitian melibatkan kapasitas refleksif pikiran manusia untuk mempromosikan partisipasi pasif dalam pembangunan opini publik yang sudah ada melalui praktik konstruksi sosial. Tidak bertujuan menyebarkan, maupun mengontrol pendapat ini, karena “masyarakat tidak perlu diinternalisasikan ke dalam individu dalam bentuk representasi, tetapi secara inheren terbukti sejak awal hingga individu dalam bentuk akal sehat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mediasi ruang intim mengingat partisipasi pasif mereka dalam konstruksi opini ini memberi dua skenario yang meninjau kembali kehadiran seksualitas dan agama di ruang publik. Skenario pertama adalah privatisasi ruang publik. Pertanyaan-pertanyaan seksualitas dan agama, yang sebelumnya hanya untuk ranah privat, menjadi tema pilihan siswa yang dialihkan terutama ke ranah publik karena fasilitas untuk ekspresi individu dan instan yang diinduksi oleh teknologi inovatif yang terkait dengan media baru. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami isu politik mediatisasi dan bahwa keintiman dapat digunakan sebagai senjata dan sengaja diekspos di ruang publik karena dengan kekuatan emosional dan transgresifnya, ia mencoba mengubah moral atau hukum. Skenario besar kedua yang meninjau kembali kehadiran seksualitas dan agama di ruang publik adalah komodifikasi ruang intim. Penolakan terhadap mediasi ruang intim yang diungkapkan oleh hasil menunjukkan kurang kesetiaan budaya

terhadap praktik sosial tradisional dan lebih dari itu pemahaman bahwa ekonomi menjadi taruhan dari mediasi seksualitas.

Penelitian yang keempat berjudul “*Gender Politics of Sultan Hamengku Buwono X in the Succession of Yogyakarta Palace*” oleh Ratnawati dan Purwo Santoso, Universitas Gajah Mada, Journal Cogent Social Sciences, 2021, Volume 7:1, 1976966, DOI: 10.1080/23311886.2021.1976966. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengkaji kebijakan dan politik terhadap suksesi gender di keraton Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, FGD, dan pengumpulan data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan manuskrip di jurnal dan media massa (baik cetak maupun internet) yang berkaitan dengan politik gender Sultan HBX. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Sultan HBX mengubah tradisi suksesi gender dengan memberikan kesempatan kepada istri dan putrinya untuk menjadi aktivis di luar Keraton. Mereka juga diberi peran dan jabatan untuk menduduki jabatan di lembaga internal, yang pada awalnya ditempati oleh kerabat laki-laki. Misalnya, yang tertua diberi kesempatan untuk memimpin organisasi di luar istana. Sultan juga mengeluarkan Sabda dan dawuh Raja untuk mematahkan tradisi suksesi diikuti dengan penghapusan simbol-simbol tradisional yang terkait dengan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan putrinya menggantikannya sebagai Sultan dan Gubernur.

Penelitian kelima berjudul “*The Representation of the Spanish Crown in the Public Sphere Through Institutional Acts*” oleh Pulido Polo, M., Sánchez González, M.a D. Del M. Dan Luque Crespo, L., Universidad de Sevilla, 2021, Communication & Society, 34(2), 315-332. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengamati tindakan yang disiarkan oleh House of H. M. The King, antara tahun 2015 dan 2019,

sebagai strategi komunikasi dan manajemen hubungan utama antara Mahkota dan opini publik Nasional dan Internasional. Berdasarkan sistem produksi citra diri, strategi ini berorientasi pada representasi dan konsolidasi publik dari sifat konstitusional Kepala Negara dan Keluarga Kerajaan dan, akibatnya, dari Mahkota. Analisis yang dilakukan menegaskan bahwa representasi dan konsolidasi publik dari sifat konstitusional Markas Besar Negara dan Mahkota sangat didukung oleh sistem strategis produksi sendiri (dan diseminasi) gambar yang berasal dari profitabilitas kehadiran publik. Keluarga Kerajaan dalam tindakan, baik mereka sendiri maupun orang lain, yang membentuk agenda institusional mereka. Seperti yang ditetapkan Sánchez, “setiap masyarakat menggunakan berbagai simbol dan ritual untuk mewakili (dan menegaskan kembali) kekuasaan ritual adalah tindakan yang tidak hanya menandakan realitas, tetapi dengan tindakan yang sama mengubah realitas yang mereka tandai” Dengan kata lain, upacara tidak hanya membantu memposisikan realitas yang mereka komunikasikan di ruang publik, tetapi, karena daya persuasifnya yang tinggi, upacara juga memberikan persepsi publik yang nyaman kepada pengirim (*the convening entity*) dan partisipan utama (penerima langsung). Hubungan dengan pesan strategis tertentu yang memungkinkan mereka untuk memulai dan memelihara proses komunikasi dua arah dalam lingkaran tak terbatas di mana legitimasi mereka diumpangkan kembali ke opini publik dalam hal reputasi.

Penelitian ini menunjukkan tidak hanya bahwa hubungan masyarakat mengelola hubungan kekuasaan antara organisasi dan audiens di lingkungannya, tetapi juga bahwa manajemen ini mencapai eksponen maksimumnya di ranah resmi dalam kaitannya dengan representasi dari Mahkota. Hal ini disebabkan oleh perkembangan tujuan institusional yang secara alami dan formal ditujukan untuk

memuluskan kerangka relasional institusi monarki dengan lingkungan politik dan sosialnya.

Penelitian keenam dengan judul “*Cultural Semiotics and the Related Interpretation*” yang dilakukan oleh Jinshun Long, School of Foreign Languages, Jimei University, Xiamen, Fujian, dan Jun He School of Architecture and Civil Engineering, Jingtangshang University, Ji’an, Jiangxi, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 586, *Proceedings of the 2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences (ICPRSS 2021) Atlantis*. Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan beberapa konsep kunci dalam semiotika budaya, menganalisis karakteristik dan fungsi semiotika budaya, dan menunjukkan pentingnya analisis semiotik. Ini mendefinisikan interaksi antara semiotika dan budaya melalui simbol-simbol bahasa, menunjukkan hubungan antara semiotika dan budaya, dan membahas penandaan tingkat yang berbeda, semiosfer, ruang semiotik, dll. Menawarkan visi semiotika budaya yang lebih seragam dan dinamis, yang sangat bagus. signifikan bagi kita untuk memperbaharui dan memperdalam pemahaman kita tentang ruang budaya dan untuk mengenali budaya manusia pada dasarnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kunci dalam semiotika budaya, menganalisis karakteristik dan fungsi semiotika budaya, dan menunjukkan pentingnya analisis semiotik. Ini menguraikan kerangka teoritis Roland Barthes dari tiga tingkat berdasarkan fenomena sosial atau budaya, yang menemukan sistem isomorfisme atas mitos dalam budaya, sehingga menganalisis fitur sistematis dan struktural budaya dengan kode budaya. Semiosfer Lotman adalah konsep ruang budaya, di mana simbol membentuk teks, teks membentuk budaya, dan budaya membentuk semiosfer. Semiosfer adalah budaya dari semua budaya. Pemikiran asli Lotman tentang teori

semiosfer sangat penting bagi kita untuk memperbarui dan memperdalam pemahaman kita tentang ruang budaya dan untuk mengenali budaya manusia pada dasarnya.

Singkatnya, semiotika budaya penting karena mengajarkan kita bahwa karya kita tidak memiliki makna di luar rangkaian faktor budaya yang kompleks. Faktor-faktor ini tidak statis, melainkan terus berubah karena kita mengubah dan menciptakannya. Semakin kita memahami dan mengenali faktor-faktor ini, semakin besar kendali yang akan kita miliki atas keberhasilan produk yang kita buat.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh H.M. Hopfl dengan judul “*Power, Authority, and Legitimacy*” yang dipublikasikan Routledge pada tahun 2014 dalam Jurnal Human Resource Development International, Volume 2 Nomor 3. Hopfl membahas manajemen, sumber daya manusia, organisasi, kontrol, kepemimpinan, dll, tampaknya hanya begitu banyak eufemisme untuk kekuasaan, dan ini menunjukkan wacana manajemen dan organisasi yang menyebut segala sesuatu dengan nama yang tepat. Pada penelitian ini sebaliknya menekankan kebutuhan untuk menyelesaikan konsep 'kekuasaan' itu sendiri menjadi gagasan yang lebih berbeda, dan mengusulkan bahwa klarifikasi dapat diturunkan dari perbedaan yang pernah eksplisit dalam kosakata zaman Klasik, tetapi hilang dalam bahasa Eropa modern. Hopfl berpendapat bahwa tidak ada apa pun kecuali kebingungan dalam berpikir tentang organisasi, manajemen, dan legitimasi yang dapat dihasilkan dari kegagalan untuk mengenali bahwa fenomena yang diidentifikasi dan dibedakan oleh kosakata yang sangat berbeda.

Penelitian kedelapan oleh Mark Hiron pada tahun 2015 dengan judul “*Trees for development? Articulating the ambiguities of power, authority and legitimacy in governing Ghana’s mineral rich forests*”. Berfokus pada ilustrasi kasus Ghana, makalah ini mengartikulasikan dinamika kekuasaan, otoritas dan legitimasi

perusahaan swasta, otoritas tradisional dan lembaga negara kunci dalam mengatur kegiatan pertambangan di hutan. Analisis ini menyoroti bagaimana perusahaan pertambangan dan donor mempromosikan model pengelolaan sumber daya neoliberal yang memperkuat kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi mineral dan meminggirkan peran lembaga negara dan otoritas tradisional dalam pengambilan keputusan. Hal ini kemudian mengikis otoritas dan legitimasi negara dan memperparah sifat yang diperebutkan dari legitimasi otoritas tradisional. Diperlukan pemeriksaan yang lebih bernuansa terhadap pertanyaan-pertanyaan tata kelola yang mendasar mengenai peran relatif negara, otoritas tradisional, dan kepentingan pribadi. Penelitian ini menggunakan studi interpretif dengan metode Kualitatif. Teori yang digunakan adalah Power, Authority, dan Legitimacy. Penelitian ini telah mengeksplorasi tata kelola kegiatan pertambangan dan hutan di zona hutan tinggi Ghana. Dengan mengkaji interaksi antar sektor lintas skala, ditunjukkan bahwa di tingkat nasional, hubungan yang relatif kooperatif antar lembaga memberikan kesan bahwa penyelesaian konflik dan prioritas sektor yang berbeda adalah masalah teknis negosiasi trade-off. Tetapi secara lokal, pengelola sumber daya dihadapkan pada konflik yang lebih nyata yang diperburuk oleh koordinasi sektoral yang buruk, tetapi berpotensi lebih dapat diterima oleh individu dan kelompok yang menjalankan lembaga mereka.

Penelitian kesembilan dilakkan oleh Lada Homutiv pada tahun 2018 dengan judul "*Vietnamese Political Power, Authority and Legitimacy in the Context of Emulation Movements*". Disertasi ini berpusat pada stabilitas dan ketidakstabilan rezim komunis Vietnam, dan bagaimana memahami topik ini hari ini. Masalah ini dieksplorasi dengan bantuan alat politik impor, yang diadopsi Vietnam dari Uni Soviet, melalui Cina, pada akhir 1940-an, dan yang mengalami kebangkitan di

Vietnam modern yang diliberalisasi secara ekonomi: gerakan emulasi. Disertasi ini mengasumsikan bahwa gerakan emulasi historis dan saat ini dirancang untuk mengontrol, tetapi juga untuk membawa legitimasi atau 'efek legitimasi' (dan stabilitas terkait), melalui fungsinya yang berbeda. Ini menanyakan bagaimana mereka berhasil dalam tugas ini secara komparatif, dalam inkarnasi historis dan saat ini. Disertasi ini mengguakan kajian interpretif dengan metode kualitatif. Kerangka fungsi gerakan emulasi di Vietnam yang dipadukan dengan konsep teoritis David Beetham, Max Weber dan Robert Lamb dijadikan sebagai prinsip dasar teori dalam disertasi ini.

Disertasi ini menyimpulkan bahwa emulasi memang membantu menciptakan legitimasi rezim yang mendasar dan menawarkan kemungkinan kaitan dengan doktrin komunis baru. Disertasi menunjukkan bahwa dominasi keberhasilan legitimasi, dikombinasikan dengan efek legitimasi dan karisma Ho Chi Minh, membantu menstabilkan rezim DRV, terutama sampai tahun 1954. Analisis gerakan emulasi saat ini, bagaimanapun, menunjukkan kelemahan VCP saat berjuang. Untuk memenuhi kriteria otoritas 'legitimasi', sehingga semakin bergantung pada efek legitimasi dan paksaan. Seiring kemajuan dan kualitas hidup semakin menjadi tujuan yang dituntut oleh penduduk, dan VCP menavigasi bentrokan antara nilai-nilai kapitalisme dan komunisme yang kontras, benturan antara nilai patriotisme dan ketergantungan pada Cina, dan benturan efektivitas mekanisme pasar dan inefisiensi alat dan institusi komunis, ia semakin berjuang dengan oposisi. Berdasarkan data asli yang dikumpulkan di Vietnam, disertasi ini juga menunjukkan bagaimana hal ini sesuai dengan gambaran yang lebih luas tentang kekuasaan, otoritas dan legitimasi di Vietnam.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Vaishnavi Singh pada tahun 2021 dengan judul *“Concept Power and Authority”*. Penelitian ini menggambarkan kekuasaan berarti kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mengendalikan tindakannya. Seperti orang-orang kerah putih yang sangat kaya secara ekonomi sehingga mereka mencoba dan mengendalikan sistem dengan efek karismatik mereka sendiri. Kewenangan di lain pihak kita melihat hak-hak hukum yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu lembaga. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak formal yang diberikan kepada orang-orang yang memegang jabatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan kajian deskriptif interpretif dengan metode kualitatif. Dalam tulisan ini kita akan melihat cara kerja kekuasaan dan otoritas dapat dipertukarkan dalam masyarakat, atau bagaimana kekuasaan bersifat memaksa. Dalam makalah ini kita akan menemukan teori Max Weber. Dan terakhir jelas dengan menetapkan garis pembeda antara kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan dan wewenang bekerja dan di tangan sebagian besar waktu dan Kekuasaan memiliki multi dimensi, itu memaksa tetapi sah ketika datang ke Negara.

Penelitian kesebelas dengan judul *“The ‘Field’ in the Age of Intervention: Power, legitimacy, and authority versus the ‘local’* yang dilakukan oleh Oliver P. Richmond, Stefanie Kappler, & Annika Björkdahl pada tahun 2015. Artikel ini menyoroti makna semantik dan sosio-politik dari 'lapangan', sebagai ruang geografis dan material, bukan disipliner, seperti yang digunakan dalam penelitian akademis dan praktik kebijakan, terkait dengan bentuk intervensi dalam hubungan internasional. Kami berpendapat bahwa gagasan 'lapangan' membawa beban kolonial dalam hal menunjukkan 'keterbelakangan' dan praktik konfliktual, serta melegitimasi perlunya intervensi oleh aktor pembangunan perdamaian, pembangunan negara dan pembangunan yang berada di luar lapangan. Kami juga menunjukkan bagaimana

praktik akademik cenderung menciptakan kerangka semiotik di mana penghuni ruang penelitian dan intervensi dijauhkan dari peneliti, dilucuti secara diskursif dari agensi mereka. Sejalan dengan itu, praktik kebijakan telah memperkuat gagasan bahwa lapangan membutuhkan intervensi dan membuatnya tunduk pada kontrol eksternal.

Artikel ini menantang hal ini dan menyarankan bahwa agensi penduduk 'lapangan' harus diakui kembali dan dikolonisasi agar legitimasi politik dapat dipulihkan dari 'intervensi'. Penelitian ini mengguakan kajian kritis dengan metode kualitatif. Dalam artikel ini kami telah menjelajahi struktur kekuatan yang mendasari yang melekat pada label ruang. 'Lapangan' dan 'kerja lapangan' tidak alami, tetapi politik, kategori yang mencerminkan jaringan akademisi dan pembuat kebijakan yang memiliki kepentingan implisit untuk mempertahankan hubungan dominasi antara mereka dan subyek intervensi mereka. Dengan melabeli tempat-tempat investigasi sebagai 'bidang', para aktor memberi yang terakhir arti sebagai terbelakang, diliputi masalah dan membutuhkan analisis dan dukungan eksternal. ini mengunggulkan epistemologi barat-sentris dan memperkuat hierarki, apakah itu berdasarkan binari subjek-objek, laki-laki - perempuan, atau korban-penyelamat. Fields adalah situs data yang akan dipanen untuk produksi teori utara, dan di mana pada gilirannya, eksperimen dalam pengembangan, pembangunan perdamaian, atau pengembangan dapat dilakukan.

Pada akhirnya, tujuannya adalah pembentukan pemerintahan global dalam istilah metropolitan; bentuk pasca-modern dari administrasi pribumi dalam istilah pasca-kolonial, sementara tampaknya merugikan sesedikit mungkin. Berbagai praktik intervensi mempertahankan hubungan kekuasaan top-down dengan secara bersamaan mengubah dan mempertahankan lapangan. Proyek yang meragukan secara etis seperti itu sejalan dengan progresivisme Pencerahan, tetapi itu juga merupakan penolakan

terhadap perubahan, agensi non-Barat, politik, dan tujuan emansipatoris apa pun yang mungkin mereka klaim.

Penelitian kedua belas yang dilakukan oleh Roy Gordon & Martin Kornberger pada tahun 2011 dengan judul *“Power, Authority and Legitimacy”*. Makalah ini mengilustrasikan bagaimana proses di mana hal-hal dikaitkan dengan legitimasi menjadi bermasalah oleh struktur dominasi yang tertanam dalam sistem sosial organisasi: legitimasi dibingkai oleh kekuasaan dan wacana. Makalah ini memperkenalkan kerangka teoretis dan metodologi yang digunakan, melaporkan temuan penelitian empiris dan menyimpulkan dengan membahas temuan, menguraikan agenda penelitian masa depan dan mengembangkan beberapa implikasi studi untuk praktik organisasi.

Makalah ini memajukan pemahaman tentang hubungan antara kekuasaan, rasionalitas dan legitimasi dengan menunjukkan bagaimana struktur dominasi secara rekursif membentuk, dan dibentuk oleh, legitimasi. Bagaimana hubungan ini mencegah perubahan organisasi kepolisian – mematahkan pola rekursif dominasi dan legitimasi – diilustrasikan secara empiris

Penelitian ketiga belas dengan judul *“Power, Legitimacy, and Institutions in the October 2019 Uprising in Chile”* yang dilakukan oleh César Guzmán-Concha pada tahun 2022. Artikel ini berfokus pada penyebab terpencil pemberontakan, dengan fokus pada cara ketegangan struktural dan proses institusional mengonfigurasi situasi kerentanan terhadap kerusuhan sosial besar-besaran. Sumber ekonomi dari konflik (misalnya, ketidaksetaraan, pengangguran, resesi) belum dihilangkan, tetapi ada bukti bahwa pemerintah dan pemimpin politik dapat menggalang dukungan warga bahkan selama kondisi ekonomi yang buruk (pandemi COVID-19 memberikan contoh terbaru), dan kita tahu bahwa ekonomi moral dan norma budaya berkontribusi

dalam membentuk keluhan dan tuntutan. Tidak ada yang namanya efek langsung ekonomi terhadap politik. Ekonomi “disaring” oleh politik dengan berbagai cara. Analisis pembentukan institusi politik menawarkan wawasan tentang cara hasil ekonomi terhubung dengan keputusan politik yang dibuat di masa lalu atau inersia yang diwarisi dari keputusan tersebut. Dengan mempelajari legitimasi kita dapat memperoleh pengetahuan tentang proses yang menghubungkan pengalaman warga dan kelompok dengan konteks kelembagaan dan ekonomi yang lebih luas di mana pengalaman ini terbentuk. Penelitian lebih lanjut terutama yang bersifat komparatif akan diperlukan untuk membongkar proses dan mekanisme ini secara rinci. Selain itu, penelitian baru harus fokus pada interaksi antara penyebab struktural yang jauh dan yang terdekat (pemicu). Mengapa peristiwa-peristiwa tertentu (misalnya, protes terhadap kenaikan biaya transportasi) dan tidak yang lain menyebabkan pergolakan besar-besaran? Bagaimana reaksi pemerintah (represi, kooptasi, negosiasi) masuk ke dalam dinamika konflik? Apa yang dikatakan penelitian etnografi kepada kita tentang mikroproses mobilisasi dan bagaimana mereka bergabung dengan meso dan proses makro?

Pendekatan institusionalis historis yang diadopsi dalam artikel ini mengembangkan hubungan antara literatur yang diilhami oleh argumen decoupling (yang terutama mempelajari politik sebagai kesesuaian antara warga dan institusi) dan argumen orang baru (yang berfokus pada pembuatan politik dari bawah). Pendekatan ini mengatasi keterbatasan interpretasi tersebut dengan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang pemberontakan yang mengintegrasikan bentuk-bentuk politik formal dan populer ke dalam satu kerangka tunggal.

Artikel ini berargumen bahwa kita dapat menjelaskan episode kerusuhan sosial yang masif dengan melihat interaksi institusi, legitimasi, dan kekuasaan.

Masalah legitimasi yang berlarut-larut dapat mengganggu stabilitas tatanan politik. Legitimasi tergantung pada cara kekuasaan didistribusikan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Distribusi kekuasaan dibentuk pada saat-saat kritis dan kemudian direproduksi melalui pengaturan formal dan praktik informal. Institusi membangun legitimasi mereka dengan menyediakan sarana bagi warga negara untuk mempengaruhi keputusan dan dengan dasar material untuk menilai kesetiaan mereka. Institusi tertutup dan konsentrasi kekuasaan menimbulkan ketidakstabilan karena warga negara tidak memiliki saluran untuk mempengaruhi keputusan politik secara substantif (misalnya, untuk menghasilkan barang kolektif atau kebijakan sosial). Episode konflik sosial yang masif dan intens dapat dilihat sebagai upaya popular.

Pemberontakan Guzmán-Concha/THE OKTOBER 2019 DI CHILE 13 untuk menyeimbangkan kembali distribusi kekuasaan yang sangat miring, dan hal itu lebih mungkin terjadi ketika pengaturan politik formal gagal untuk memasukkan aktor-aktor ini dan menyalurkan tuntutan mereka untuk menghasilkan hasil yang signifikan (kohesi, integrasi, kesetaraan). Mereka berpotensi membuka titik kritis sejauh mereka berhasil menghasilkan dan mengkonsolidasikan keseimbangan kekuatan baru.

Penelitian keempat belas yang dilakukan oleh Robert S Wigton pada tahun 1996 dengan judul "*Social Judgement Theory and Medical Judgement*". Penelitian ini menunjukkan SJT sangat cocok untuk studi penilaian medis. penilaian medis secara khas melibatkan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian baik kesalahan yang tak terelakkan dan banyak petunjuk yang salah. dalam kedokteran, seperti di bidang lain, penelitian SJT telah menemukan variasi yang luas di antara para pengambil keputusan dalam penilaian mereka dan bobot informasi klinis. strategi dan bentuk sketsa kasus berbeda dari strategi yang dijelaskan sendiri oleh dokter dan dari bobot yang disarankan oleh para ahli. Pengamatan ini paralel dengan temuan

terbaru dari variasi yang tidak dapat dijelaskan dalam diagnosis dan manajemen dalam praktik klinis yang telah menjadi sumber perhatian dalam komunitas medis. umpan balik kognitif kurang berhasil sebagai alat pengajaran praktis daripada yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif dan paradigma post-positivis. Hasil menunjukkan Skala alternatif yang dipersonalisasi dibuat untuk menilai garis lintang penerimaan, penolakan, dan non-komitmen berkaitan dengan kepercayaan berbagai persentase siswa yang minum lima atau lebih sedikit minuman saat mereka berpesta. Sembilan pertanyaan diajukan sebagai alternatif; responden diminta untuk menanggapi batang berikut untuk setiap persentase 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 90%: "Tolong tunjukkan apakah anda menemukan pernyataan itu menjadi sangat dapat dipercaya, agak dapat dipercaya, atau tidak dapat dipercaya sama sekali. Persentase siswa MSU yang biasanya minum lima atau lebih sedikit minuman saat berpesta adalah _____." Skor 1 menunjukkan sangat dapat dipercaya, sedangkan skor 2 menunjukkan agak dapat dipercaya, dan skor 3 menunjukkan tidak dapat dipercaya pada semua. Hasil memberikan rata-rata dan standar deviasi skor kepercayaan untuk semua variabel dalam penelitian ini.

Penelitian kelima belas dengan judul "*Social Judgment Theory Based Model on Opinion Formation, Polarization and Evolution*" yang dilakukan oleh H. F. Chau, C. Y. Wong, F. K. Chow, and Chi-Hang Fred Fung pada tahun 2014. Artikel ini mengajukan asal usul polarisasi pendapat yang dinamis di dunia nyata adalah topik yang menarik yang mungkin dapat dipahami oleh para ilmuwan fisika. Untuk memodelkan dinamika dengan benar, teori harus sepenuhnya kompatibel dengan temuan psikolog sosial tentang perubahan opini mikroskopis. Di sini kami

memperkenalkan model umum pembentukan opini dengan agen homogen berdasarkan teori penilaian sosial terkenal dalam psikologi sosial dengan memperluas model serupa yang diusulkan oleh Jager dan Amblard. Opini agen pada akhirnya akan mengelompok di sekitar opini ekstrem dan/atau moderat membentuk tiga fase dalam ruang parameter dua dimensi yang menggambarkan respons opini mikroskopis dari agen. Dinamika model ini dapat dipahami secara kualitatif dengan analisis *mean-field*. Lebih penting lagi, transisi fase orde pertama dalam distribusi opini diamati dengan mengembangkan sistem di bawah perubahan lambat dalam parameter sistem, menunjukkan bahwa keseimbangan bersela dalam opini publik dapat terjadi bahkan dalam jaringan sosial yang sepenuhnya terhubung.

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif. Pada setiap langkah waktu, kami secara acak memilih dua agen tetangga, katakanlah, a dan b , dalam jaringan dan mensimulasikan perubahan pendapat mereka setelah mereka bertemu dan berdiskusi dengan aturan *assimilation rule*, *boomerang effect rule*, dan *neutral rule*. Hasil penelitian ini telah mengusulkan model berbasis agen dan SJT kompatibel dengan memperluas karya Jager dan Amblard dan Crawford et al. Model kami dapat berfungsi sebagai cetak biru untuk mempelajari dinamika pembentukan opini. Dalam model kami, pembentukan kluster opini ekstrem dan/atau moderat serta ekuilibria bersela diamati bahkan dalam kasus agen homogen dalam jaringan lengkap. Selain itu, kami mengidentifikasi kondisi yang paling penting untuk membentuk kelompok opini ekstrem dan moderat dengan analisis *mean-field*. Pekerjaan lebih lanjut harus dilakukan, termasuk penambahan noise pada respons agen dan model yang lebih detail tentang bagaimana d_1 dan d_2 berubah, untuk membuat model kami lebih realistis. Tujuan kami selanjutnya adalah memodelkan pemisahan kluster opini.

Penelitian keenam belas dilakukan oleh Ramesh Shakya pada tahun 2014 dengan judul *“The Social Judgment Theory Consumer Behavior”*. Artikel ini fokus pada studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk membeli (mengkonsumsi), dan membuang produk dan jasa. Definisi yang lebih mendalam juga akan mencakup bagaimana proses itu berdampak pada dunia. Perilaku konsumen menggabungkan ide-ide dari beberapa ilmu termasuk psikologi, biologi, kimia, komunikasi, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan kajian deskriptif interpretif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perubahan sikap (persuasi) adalah hasil dari proses dan efek penilaian. Persuasi terjadi pada akhir proses di mana individu memahami pesan, membandingkan dengan posisinya saat ini pada masalah itu, tergantung pada posisi titik jangkar, lintang penerimaan, penolakan dan non-komitmen dengan tingkat keterlibatan ego.

Penelitian ketujuh belas dengan judul *“A Social Judgment Theory Approach to Conducting Formative Research in a Social Norms Campaign”* pada tahun 2006 yang dilakukana oleh Sandi W. Smith, Charles K. Atkin, Dennis Martell, Rebecca Allen, & Larry Hembroff. Fokus penelitian ini membahas pendekatan norma sosial memprediksi bahwa pesan kampanye yang memberikan informasi normatif yang benar tentang perilaku kesehatan yang disalahpahami secara luas akan mengurangi kesenjangan antara persepsi terdistorsi versus praktik aktual dan akibatnya mengurangi perilaku berdasarkan norma yang dilebih-lebihkan. Evaluasi formatif pesan yang dirancang untuk secara efektif menyampaikan norma-norma yang benar yang diinformasikan oleh teori penilaian sosial (SJT) harus mengukur batas-batas garis lintang penerimaan, non-komitmen, dan penolakan untuk informasi normatif. Studi ini menemukan bahwa garis lintang ini berbeda secara signifikan satu sama lain dalam hal kepercayaan. SJT memperkirakan bahwa kampanye yang didasarkan pada

norma yang berada dalam garis lintang non-komitmen kemungkinan akan efektif. Serangkaian pesan yang menggunakan norma yang sebenarnya, yang termasuk dalam garis lintang non-komitmen, adalah bagian dari kampanye. Kesenjangan dalam minum yang dirasakan versus yang sebenarnya dan perbedaan dalam jumlah minuman yang dirasakan berkurang, sementara laporan diri tentang konsumsi lima minuman atau lebih sedikit meningkat secara signifikan. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif dan paradigma post-positivis.

Skala alternatif yang dipesan dibuat untuk menilai garis lintang penerimaan, penolakan, dan non-komitmen berkaitan dengan kepercayaan berbagai persentase siswa yang minum lima atau lebih sedikit minuman saat mereka berpesta. Sembilan pertanyaan diajukan sebagai alternatif; responden diminta untuk menanggapi batang berikut untuk setiap persentase 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 90%. Persentase siswa MSU yang biasanya minum lima atau lebih sedikit minuman saat berpesta adalah _____." Skor 1 menunjukkan sangat dapat dipercaya, sedangkan skor 2 menunjukkan agak dapat dipercaya, dan skor 3 menunjukkan tidak dapat dipercaya pada semua. Hasil memberikan rata-rata dan standar deviasi skor kepercayaan untuk semua variabel.

Penelitian kedelapan belas dengan judul "*Changing resistant audience attitudes using social judgment theory's "anchor" point perspectives*" yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Leslie Ramos Salazar. Artikel ini bereksperimen setiap kelompok juga akan menerima tiga kartu 4×6 yang bertuliskan "lintang penolakan", "lintang non-komitmen", dan "lintang penerimaan". Kartu-kartu ini akan menunjukkan garis lintang audiens tertentu yang relevan dengan topik yang ada (misalnya, perjudian online harus legal) yang perlu diayunkan ke kanan kontinum garis lintang. Siswa akan diinstruksikan untuk mengembangkan argumen persuasif

dengan contoh pendukung untuk mengubah garis lintang yang tercantum pada kartu yang mereka terima secara acak oleh instruktur. Jika seorang siswa mendapat kartu “lintang penolakan”, maka siswa ini perlu membuat argumen publik yang meyakinkan untuk mengubah lintang ini. Setiap kelompok juga akan menerima tiga kartu 4×6 yang bertuliskan “lintang penolakan”, “lintang non-komitmen”, dan “lintang penerimaan”. Kartu-kartu ini akan menunjukkan garis lintang audiens tertentu yang relevan dengan topik yang ada (misalnya, perjudian online harus legal) yang perlu diayunkan ke kanan kontinum garis lintang. Siswa akan diinstruksikan untuk mengembangkan argumen persuasif dengan contoh pendukung untuk mengubah garis lintang yang tercantum pada kartu yang mereka terima secara acak oleh instruktur. Jika seorang siswa mendapat kartu “lintang penolakan”, maka siswa ini perlu membuat argumen publik yang meyakinkan untuk mengubah lintang ini menjadi netral. Atau jika seorang siswa mendapat "lintang non-komitmen", maka siswa ini akan menyusun argumen untuk mengubah lintang menjadi sedikit penerimaan. Terakhir, jika seorang siswa mendapatkan kartu “lintang penerimaan”, maka siswa ini akan mengembangkan argumen untuk memperkuat posisi yang sudah mapan ke salah satu mempraktikkan perilaku tertentu seperti menyumbangkan uang ke organisasi atau lembaga nirlaba, atau menandatangani petisi.

Artikel ini menggunakan metode eksperimen untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan argumen persuasif dalam aktivitas teori penilaian sosial kelas tunggal ini untuk meningkatkan kemampuan mereka mengubah sikap audiens yang resisten. Secara keseluruhan, latihan kelas ini memungkinkan siswa untuk menggunakan teori penilaian sosial (Sherif et al., 1965) untuk membangun argumen persuasif, mengingat tiga garis lintang yang berbeda (yaitu, penerimaan, penolakan, dan non-komitmen). Siswa akan belajar untuk menghargai konsep teori penilaian

sosial dengan cara yang relevan dan diterapkan. Latihan ini melibatkan seluruh kelas dengan membiarkan siswa mengembangkan argumen, melakukan argumen secara lisan, dan mengkritik berbagai argumen. Siswa juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan teori penilaian sosial dan perannya dalam mengadaptasi pesan ke audiens yang beragam dengan cara yang menarik. Dari pengalaman saya, siswa cenderung menikmati berlatih pengembangan argumen dari sudut pandang yang berbeda, dan siswa lebih mampu menghargai sepenuhnya penerapan teori penilaian sosial dalam tugas pidato masa depan mereka. Sebagai anggota audiens, siswa senang mengekspresikan posisi sikap atau titik "jangkar" mereka sendiri, mengingat berbagai masalah kontroversial.

Penelitian Sembilan belas pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Yuanchun Jiang, And Zhengguang Chen dengan judul “*An Evolution Model of Group Opinions Based on Social Judgment Theory*”. Kami mengintegrasikan teori penilaian sosial dan keyakinan terbatas untuk membangun model berbasis agen untuk mengeksplorasi bagaimana opini kelompok terbentuk dan berkembang. Setiap agen dalam model kami, yang merupakan model Hegselmann– Krause yang diperluas, memiliki kepribadian (keterbukaan dan kebimbangan) dan emosi (opini) sendiri. Dalam kasus homogen, kami menemukan bahwa pendapat agen akan mempertahankan urutan awal mereka. Setelah retak terbentuk antara dua agen pada waktu t , maka retakan akan ada setelah waktu itu. Terlepas dari kenyataan bahwa fungsi kepercayaan berkelanjutan menghasilkan bobot minimum nol, sistem evolusi opini akan menyatu. Simulasi menunjukkan bahwa peningkatan tingkat keterbukaan atau kebimbangan dapat menyebabkan kelompok untuk mencapai konsensus dengan mudah. Secara khusus, semakin tinggi tingkat keterbukaan agen, semakin besar jumlah cluster; dan semakin tinggi tingkat kebimbangan seorang agen, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan

untuk menyatukan pendapat kelompok. Meskipun pendapat awal didistribusikan secara acak, agen dengan tingkat kebimbangan dan keterbukaan yang sama cenderung terkonsentrasi selama proses evolusi. Artikel ini menggunakan metode eksperimen. Pada bagian ini, kami memperkenalkan model berbasis agen baru di bawah kerangka kepercayaan terbatas. Kami meninjau model HK klasik dan mempertimbangkan populasi n agen yang diindeks dalam set $I = \{1, 2, \dots, n\}$. Setiap agen memiliki opini real-valued bergantung waktu $x_i(t)$.

Model kami disajikan berdasarkan teori penilaian sosial dan prinsip keyakinan terbatas dan merupakan perpanjangan dari model HK. Setiap agen memiliki kepribadian (keterbukaan dan kebimbangan) dan emosi (opini) sendiri. Di bawah asumsi homogen, pendapat kelompok akan memiliki beberapa sifat seperti pelestarian ketertiban dan konvergensi. Terlepas dari kenyataan bahwa fungsi kepercayaan berkelanjutan menghasilkan bobot minimum nol, sistem evolusi opini akan tetap menyatu. Simulasi menunjukkan bahwa sensitivitas proses evolusi opini terhadap kedua parameter tersebut berbeda. l menentukan pola interaksi, dan k mencerminkan pengaruh timbal balik individu. Oleh karena itu, dampak pola interaksi pada evolusi opini lebih penting daripada pengaruh faktor lainnya.

Kami mengamati bahwa tingkat keterbukaan atau kebimbangan agen yang tinggi dapat membuat kelompok mencapai konsensus dengan lebih mudah. Semakin tinggi tingkat keterbukaan suatu agen, semakin banyak cluster yang bisa diperoleh; dan semakin tinggi tingkat kebimbangan seorang agen, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyatukan pendapat kelompok. Meskipun pendapat awal didistribusikan secara acak, agen dengan kebimbangan dan keterbukaan yang sama cenderung berkumpul bersama selama proses evolusi. Hasil ini dapat membantu kita untuk lebih memahami bagaimana kepribadian memengaruhi evolusi opini. Jika kita

ingin mufakat cepat tercapai, maka harus ada keterbukaan yang tinggi antar anggota kelompok. Selain itu, mereka harus memercayai dan menerima pendapat orang lain.

Penelitian kedua puluh dengan judul *“The Legitimacy of Inequality: Integrating the Perspectives of System Justification and Social Judgment”* pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Patrick Haack & Jost Sieweke. Artikel ini menjelaskan legitimasi ketidaksetaraan di antara anggota suatu sistem sosial, kami memadukan teori pembenaran sistem dan teori penilaian sosial. Kami mengidentifikasi adaptasi dan penggantian sebagai dua mekanisme utama legitimasi ketidaksetaraan dan menguji pengaruhnya dalam pengaturan unik dari eksperimen alami, penyatuan kembali Jerman Timur yang sosialis dan Jerman Barat yang kapitalis. Kami menunjukkan bahwa anggota baru masyarakat di mana ketidaksetaraan didukung secara luas dan dianggap bertahan lama akan beradaptasi dengan persepsi ini dan mulai melihat ketidaksetaraan sebagai hal yang dapat diterima. Proses adaptasi ini mencerminkan pengaruh legitimasi kolektif yang halus namun kuat terhadap persetujuan diam-diam individu atas ketidaksetaraan. Ketimpangan juga menjadi sah karena kelompok yang lebih tua digantikan oleh kelompok yang lebih muda; namun, efek ini lebih lemah daripada efek adaptasi. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif dan paradigma post-positivis. Hasil penelitian menunjukkan berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa mengembangkan dan menguji teori tentang bagaimana ketidaksetaraan dilegitimasi dapat memberikan wawasan baru ke dalam ideasional ketidaksetaraan.

Penelitian kedua puluh satu dengan judul *“Leveraging Social Judgment Theory to Examine the Relationship between Social Cues and Signals in Human-Robot Interactions”* yang dilakukan oleh Travis J. Wiltshire, Sierra L. Snow, Emilio J. C. Lobato dan Stephen M. Fiore pada tahun 2014. Penelitian interaksi manusia-

robot (HRI) membutuhkan teknik baru untuk memahami dinamika sosial yang terjadi pada antarmuka antara manusia dan robot. Pekerjaan sebelumnya telah difokuskan pada penggabungan isyarat sosial dan perbedaan sinyal sosial dari bidang pemrosesan sinyal sosial dan melengkapi ini dengan kemajuan terbaru dalam memahami kognisi sosial manusia yang menentukan dua jenis utama proses kognitif. Akun terkait, yang berasal dari Teori Penghakiman Sosial (SJT), menentukan Model Lensa yang isyaratnya dapat ditafsirkan serta kondisi tugas yang akan menginduksi salah satu jenis proses kognitif. Anehnya, penelitian berbasis SJT belum meneliti hubungan isyarat dan sinyal sosial. Kami berpendapat ini memberikan jalan yang ideal ke depan untuk penelitian semacam itu dan kami mengintegrasikan disiplin studi terkait ini untuk memberikan akun yang diturunkan secara teoritis yang dapat berguna untuk desain eksperimen manusia-manusia dan HRI yang berfokus pada dinamika interaksi sosial. Artikel ini menggunakan metode eksperimen.

Sementara klaim tentang sejauh mana data dari jenis eksperimen ini dapat menginformasikan sistem kognitif sosial robot adalah spekulatif, pekerjaan saat ini di bidang ini menjanjikan. Misalnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mesin menjadi lebih mahir dalam mendeteksi emosi yang disampaikan manusia melalui isyarat wajah secara akurat daripada manusia sebenarnya. Ide kuncinya di sini adalah, agar robot dapat berinteraksi dengan manusia, dan suatu hari bekerja bersama mereka sebagai rekan satu tim, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengamati isyarat sosial, memahami keadaan mental di balik isyarat tersebut dalam konteks tertentu dan kemudian merespons dengan tepat.

Tujuan makalah ini adalah untuk memberikan panduan khusus tentang bagaimana menyelidiki dinamika sosial di HRI. Kami mengusulkan integrasi SJT, dan dengan itu Model Lensa dan CCT, dengan kerangka isyarat dan sinyal sosial

sehingga orang lain dapat menguraikan dan memeriksa ide-ide ini. Artinya, kami telah memberikan latar belakang teoritis dan empiris untuk mempelajari hubungan antara isyarat dan sinyal sosial yang menjelaskan karakteristik situasi sosial dan prediksi yang dapat diuji untuk jenis proses kognitif yang akan terjadi. Kami melihat program penelitian yang diuraikan di sini sebagai penelitian yang bermanfaat dan kaya dan berharap ini akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk memajukan robotika sosial melalui integrasi interdisipliner ini.

Penelitian kedua puluh dua dengan judul *“Using Social Judgment Theory Method to Examine How Experienced Occupational Therapy Driver Assessors Use Information to Make Fitness-to-Drive Recommendations”* dilakukan pada tahun 2015 oleh Carolyn Unsworth, Priscilla Harries, and Miranda Davies. Penelitian ini dilakukan karena orang-orang dengan berbagai disabilitas berusaha untuk meningkatkan mobilitas komunitas mereka, penilai pengemudi terapi okupasi semakin dituntut untuk membuat rekomendasi yang kompleks mengenai kebugaran-untuk-mengemudi. Namun, sangat sedikit yang diketahui tentang bagaimana terapis menggunakan informasi untuk membuat keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan bagaimana bobot penilai pengemudi terapi okupasi yang berpengalaman dan menggabungkan informasi saat membuat rekomendasi kebugaran-untuk-mengemudi dan menetapkan tingkat kesepakatan keputusan mereka.

Penelitian ini Menggunakan metode Social Judgment Theory, penelitian ini meneliti bagaimana 45 penilai pengemudi terapi okupasi berpengalaman dari Inggris, Australia dan Selandia Baru membuat rekomendasi fitness-to-drive untuk serangkaian 64 skenario kasus. Peserta menyelesaikan tugas di situs web khusus, dan data dianalisis menggunakan analisis fungsi diskriminan dan koefisien korelasi intrakelas.

Hasil penelitian menunjukkan terhitung 87% dari varians, isyarat pusat rekomendasi kebugaran-untuk-drive yang dibuat oleh penilai adalah keterampilan fisik klien, keterampilan kognitif dan persepsi, keterampilan kerajinan hukum jalan, keterampilan penanganan kendaraan dan jumlah intervensi instruktur mengemudi. Kesepakatan (konsensus) antara rekomendasi fitness-to-drive sangat tinggi: koefisien korelasi intraclass 1/4 .97, interval kepercayaan 95% .96-.98).

Penelitian kedua puluh tiga dengan judul “*Social-Judgment Comparisons in Daily Life*” yang dilakukan oleh Sabrina Thai & Penelope Lockwood pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki empat fokus. Pertama, kami berusaha untuk menentukan frekuensi dan karakteristik perbandingan penilaian sosial (yaitu, dari satu orang ke orang lain) dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa individu membandingkan berbagai kontak reguler mereka dengan orang lain. Kedua, kami memeriksa apakah tingkat kedekatan dengan kontak akan menentukan sejauh mana individu terlibat dalam proses termotivasi ketika membandingkan kontak mereka dengan orang lain; yaitu, kami menilai apakah individu akan termotivasi untuk terlibat dalam proses perbandingan yang akan meningkatkan persepsi mereka tentang orang lain yang dekat. Ketiga, kami menguji apakah perbandingan penilaian sosial memiliki implikasi bagi hubungan individu dengan kontak yang mereka bandingkan; secara khusus, mengetahui bahwa suatu kontak lebih unggul atau lebih rendah daripada orang lain dapat berimplikasi pada kedekatan seseorang dengan kontak tersebut dan kepuasan dengan hubungan tersebut. Keempat, kami memeriksa apakah perbandingan penilaian sosial memiliki hasil jangka panjang yang kumulatif; membandingkan kontak harian dengan orang lain mungkin memiliki efek agregat yang membentuk kedekatan seseorang dengan kontak ini, memperpanjang bulan ke masa depan.

Penelitian ini menggunakan desain pengambilan sampel pengalaman 7 hari (Npeserta = 93; Nsurveys = 3960) dengan tindak lanjut akhir minggu dan enam bulan, untuk memeriksa bagaimana individu membuat perbandingan penilaian sosial dalam kehidupan sehari-hari serta dampak kumulatif dari perbandingan ini dari waktu ke waktu. Peserta membandingkan kontak dekat (vs. jauh) lebih sering dan membuat lebih banyak perbandingan ke bawah daripada ke atas. Selanjutnya, ke bawah, relatif ke atas, perbandingan memprediksi persepsi yang lebih positif dari kontak, kedekatan yang lebih besar dengan kontak, dan kepuasan hubungan yang lebih besar. Perbandingan ke bawah yang lebih sering melibatkan kontak tertentu juga meramalkan kedekatan yang lebih besar satu minggu dan enam bulan kemudian. Ketika peserta membuat perbandingan ke atas, mereka termotivasi untuk melindungi kontak dekat, tetapi tidak jauh, dengan mengecilkan kepentingan domain, dan terlibat dalam strategi perlindungan ini memprediksi kedekatan yang lebih besar dengan kontak satu minggu kemudian. Penelitian menunjukkan tentang perbandingan penilaian sosial dipandu oleh teori tentang perbandingan diri dengan orang lain.

Penelitian kedua puluh empat yang berjudul *“Agency and Communion as Fundamental Dimensions of Social Judgment – and Bogdan Wojciszke’s Brilliant Idea on Perspective”* yang dilakukan oleh Andrea E. Abele pada tahun 2022. Dimensi fundamental dari penilaian sosial dan evaluasi sosial, yang disebut agensi dan persekutuan, merupakan konstruksi menyeluruh di banyak bidang psikologi. Agensi terkait dengan pencapaian tujuan dan “maju”, komuni terkait dengan pembentukan ikatan dan “kebersamaan”. Dimensi ini digunakan baik untuk menafsirkan perilaku, dan untuk mengevaluasi target. Bogdan Wojciszke adalah orang pertama yang menghubungkan dimensi-dimensi ini dengan perspektif, dan menunjukkan bahwa perspektif aktor lebih terkait erat dengan agensi, sedangkan perspektif pengamat lebih

erat terkait dengan persekutuan. "Model Perspektif Ganda" menggabungkan dimensi mendasar dari penilaian dan evaluasi sosial dengan perspektif dan mengarah ke sejumlah hipotesis luas tentang interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan pendekatan historis-sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan model ini telah mengilhami penelitian di berbagai bidang psikologi, seperti evaluasi merek, stereotip kelompok, evaluasi pemimpin politik, penelitian gender, penelitian keinginan sosial, evaluasi diri, postur tubuh dalam interaksi sosial, dan lain-lain. Ini telah dikembangkan lebih lanjut menjadi teori luas yang berlaku untuk banyak fenomena dalam psikologi (sosial). Bogdan Wojciszke menjalani cita-citanya dan merupakan kesenangan dan kehormatan untuk bekerja sama dengannya.

Penelitian kedua puluh lima dengan judul Analisis Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X oleh Rizani tahun 2019. Secara umum, dalam persepsi masyarakat menyatakan tanggapan-tanggapannya mengenai polemik sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam konflik internal keraton Yogyakarta. Dalam hal ini, terdapat tiga golongan masyarakat yaitu masyarakat setuju, tidak setuju dan netral terhadap sabda raja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Adapun bermacam-macam persepsi masyarakat Kota Yogyakarta diberbagai individu, sehingga munculnya persepsi di setiap orang bervariasi. Terdapat sebanyak 32 % menyatakan itu konflik internal, 43% itu konflik masyarakat Yogyakarta, dan 15% tidak terlalu memperdulikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan tersebut terdapat setidaknya empat penelitian tentang Sabda Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, diantaranya; Octastefani dan Azizah (2018) dengan perspektif gender. Rizal (2019) yang mengangkat suksesi takhta Raja.

Tudor dan Bratosin (2020) membahas gender, seksualitas, dan agama di ruang publik. Ratnawati dan Santoso (2021) yang membahas politik takhta raja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini berfokus pada persepsi masyarakat Yogyakarta tentang Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Selain itu terdapat pula penelitian yang membahas teks, naskah, atau lirik dari sudut pandang semiotik diantaranya dilakukan oleh; Long dan Jun He (2021) yang membahas Bahasa dan simbol-simbol budaya. Crespo et.all (2021) yang membahas makna dan opini publik tentang mahkota sebagai simbol. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas teks, naskah, atau bahasa, akan tetapi melihat dari sisi persepsi masyarakat Yogyakarta tentang Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Penelitian lain yang membahas *Power, Authority, dan Legitimacy* dilakukan Gordon & Kornberger (2011) membahas proses legitimasi menjadi bermasalah oleh struktur dominasi yang tertanam dalam sistem sosial organisasi: legitimasi dibingkai oleh kekuasaan dan wacana. Hopfl (2014), manajemen organisasi, kontrol, kepemimpinan, tampaknya begitu banyak eufemisme untuk kekuasaan, dan ini menunjukkan wacana manajemen dan organisasi yang menyebut segala sesuatu dengan nama yang tepat. Hiron (2015) membahas dinamika kekuasaan, otoritas dan legitimasi perusahaan swasta, otoritas tradisional dan lembaga negara kunci dalam mengatur tatanan. Kappler et.all (2015) membahas struktur kekuatan yang mendasari dan melekat pada label ruang. 'Lapangan' dan 'kerja lapangan' tidak alami, tetapi politik, kategori yang mencerminkan jaringan akademisi dan pembuat kebijakan yang memiliki kepentingan implisit untuk mempertahankan hubungan dominasi dan otoritas atas subyek intervensi mereka. Homutiv (2018) Membahas gerakan emulasi

membantu menciptakan legitimasi rezim yang mendasar dan menawarkan kemungkinan kaitan dengan doktrin komunis baru. Tesis menunjukkan dominasi legitimasi, dikombinasikan dengan efek legitimasi dan karisma Ho Chi Minh, membantu menstabilkan rezim DRV. Haack dan Sieweke (2019) menjelaskan legitimasi ketidaksetaraan di antara anggota suatu sistem sosial, kami memadukan teori pembenaran sistem dan teori penilaian sosial. Teridentifikasi adaptasi dan penggantian sebagai dua mekanisme utama legitimasi ketidaksetaraan dan menguji pengaruhnya dalam pengaturan unik dari eksperimen alami. Anggota baru masyarakat di mana ketidaksetaraan didukung secara luas dan dianggap bertahan lama akan beradaptasi dengan persepsi ini dan mulai melihat ketidaksetaraan sebagai hal yang dapat diterima. Singh (2021) membahas cara kerja kekuasaan dan otoritas dapat dipertukarkan dalam masyarakat, atau bagaimana kekuasaan bersifat memaksa. Concha (2022) membahas kerusuhan sosial yang masif melihat interaksi institusi, legitimasi, dan kekuasaan. Masalah legitimasi yang berlarut dapat mengganggu stabilitas tatanan politik. Legitimasi tergantung pada cara kekuasaan didistribusikan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Institusi membangun legitimasi mereka dengan menyediakan sarana bagi warga negara untuk mempengaruhi keputusan dan dengan dasar material untuk menilai kesetiaan mereka. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini berfokus pada bagaimana sikap masyarakat Yogyakarta terhadap *power*, *authority*, dan *legitimacy* tentang Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Selanjutnya beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan *Social Judgment Theory* (SJT) diantaranya dilakukan oleh; Wigton (1996) yang membahas SJT sangat cocok untuk studi penilaian medis. Penilaian medis secara khas melibatkan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian baik kesalahan yang tak

terelakkan dan banyak petunjuk yang salah. dalam kedokteran, seperti di bidang lain. Smith et.all (2006) memprediksi bahwa pesan kampanye yang memberikan informasi normatif yang benar tentang perilaku kesehatan yang disalahpahami secara luas akan mengurangi kesenjangan antara persepsi terdistorsi versus praktik aktual dan akibatnya mengurangi perilaku berdasarkan norma yang dilebih-lebihkan. Evaluasi formatif pesan yang dirancang untuk secara efektif menyampaikan norma-norma yang benar yang diinformasikan oleh teori penilaian sosial (SJT) mengukur batas-batas garis lintang penerimaan, non-komitmen, dan penolakan untuk informasi normatif.

Chau (2014) mengajukan asal usul polarisasi pendapat yang dinamis di dunia nyata adalah topik yang menarik yang mungkin dapat dipahami oleh para ilmuwan fisika. Untuk memodelkan dinamika dengan benar, teori harus sepenuhnya kompatibel dengan temuan psikolog sosial tentang perubahan opini mikroskopis melihat melalui SJT. Shakya (2014) studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk memilih (mengkonsumsi), dan membuang produk dan jasa. Perilaku konsumen menggabungkan ide-ide dari beberapa ilmu termasuk psikologi, biologi, kimia, komunikasi, dan ekonomi. Fiore et.all (2014) membahas kognisi sosial manusia yang menentukan dua jenis utama proses kognitif. Akun terkait, yang berasal dari Teori Penghakiman Sosial (SJT), menentukan Model Lensa yang isyaratnya dapat ditafsirkan serta kondisi tugas yang akan menginduksi salah satu jenis proses kognitif. Anehnya, penelitian berbasis SJT belum meneliti hubungan isyarat dan sinyal sosial. Davies (2015) membahas pemodelkan bagaimana bobot penilai pengemudi terapi okupasi yang berpengalaman dan menggabungkan informasi saat membuat rekomendasi kebugaran-untuk-mengemudi dan menetapkan tingkat kesepakatan keputusan mereka. Salazar (2017) melakukan metode eksperimen untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan argumen persuasif dalam aktivitas teori

penilaian sosial kelas tunggal ini untuk meningkatkan kemampuan mereka mengubah sikap audiens yang resisten.

Jiang dan Chen (2018) menggunakan metode eksperimen dengan memperkenalkan model berbasis agen baru di bawah kerangka kepercayaan terbatas. Kami meninjau model HK klasik dan mempertimbangkan populasi n agen yang diindeks dalam set $I = \{1, 2, \dots, n\}$. Setiap agen memiliki opini real-valued bergantung waktu $x_i(t)$. Thai dan Loockwood (2022) menggunakan desain pengambilan sampel pengalaman 7 hari ($N_{\text{peserta}} = 93$; $N_{\text{surveys}} = 3960$) dengan tindak lanjut akhir minggu untuk memeriksa bagaimana individu membuat perbandingan penilaian sosial dalam kehidupan sehari-hari serta dampak kumulatif dari perbandingan ini dari waktu ke waktu. Abele (2022) membahas dimensi fundamental dari penilaian sosial dan evaluasi sosial, yang disebut agensi dan persekutuan, merupakan konstruksi menyeluruh di banyak bidang psikologi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada bagaimana *power*, *authority*, dan *legitimacy* Max Weber serta sikap masyarakat Yogyakarta terhadap Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi berdasarkan STJ apakah setuju, tidak setuju, atau netral masyarakat Yogyakarta.

Konteks penelitian yang dilakukan saat ini adalah Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Pada masyarakat Yogyakarta, konsep "sabda" memiliki posisi yang penting dan istimewa. Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan sistem kerajaan. Keraton Yogyakarta, yang merupakan istana kesultanan, merupakan pusat kebudayaan dan pemerintahan tradisional di Yogyakarta. Pada konteks Yogyakarta, "sabda dan dawuh" Sultan memiliki makna yang luas. Sabda dan

dawuh Sultan dapat merujuk pada petunjuk, perintah, atau nasehat yang diberikan oleh Sultan kepada rakyatnya. Sabda sultan dianggap memiliki otoritas dan kekuatan khusus karena berasal dari kepala negara yang memiliki status dan kedudukan yang diakui secara tradisional.

Sabda dan dawuh Sultan dianggap sebagai sumber hukum dan panduan bagi masyarakat Yogyakarta. Sultan sebagai pemimpin memiliki wewenang untuk memberikan arahan dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di masyarakat Yogyakarta. Keputusan yang diambil berdasarkan sabda sultan diharapkan ditaati dan dijalankan oleh rakyat sebagai bentuk pengakuan terhadap legitimasi kekuasaan sultan.

Praktiknya, sabda dan dawuh Sultan sering kali diumumkan secara resmi dalam acara atau pertemuan yang melibatkan Sultan dan masyarakat. Sabda tersebut dapat berupa penegasan kebijakan, arahan dalam menjaga tradisi dan budaya, atau nasihat tentang kehidupan bermasyarakat yang dianggap penting bagi kemajuan Yogyakarta.

Sabda dan dawuh dalam konteks sebagai pesan memiliki posisi yang sangat penting dalam masyarakat Yogyakarta. Sabda dan dawuh bukan hanya sekadar pesan verbal biasa, tetapi memiliki kekuatan dan otoritas yang dianggap khusus. Dalam tradisi Yogyakarta, sabda dan dawuh umumnya berasal dari Sultan atau tokoh otoritatif lainnya, seperti Kasunanan dan Kanjeng Pangeran Harya. Sabda dan dawuh ini sering kali berisi petunjuk, instruksi, atau nasihat yang diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait.

Posisi sabda sebagai pesan didasarkan pada keyakinan bahwa sabda dan dawuh tersebut berasal dari pemimpin yang memiliki legitimasi dan otoritas untuk memberikan arahan kepada masyarakat. Masyarakat Yogyakarta menghormati dan

menghargai sabda tersebut karena dianggap sebagai perintah atau petunjuk yang harus diikuti.

Sabda dan dawuh sebagai pesan juga mencerminkan bahwa di dalamnya terdapat hubungan antara pemimpin dan rakyat yang tidak terpisahkan. Sabda dan dawuh diberikan dengan tujuan untuk memberikan pedoman, membimbing, dan memperbaiki tata tertib serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sabda dan dawuh memegang peran penting dalam menjaga keselarasan dan kohesi sosial di masyarakat Yogyakarta.

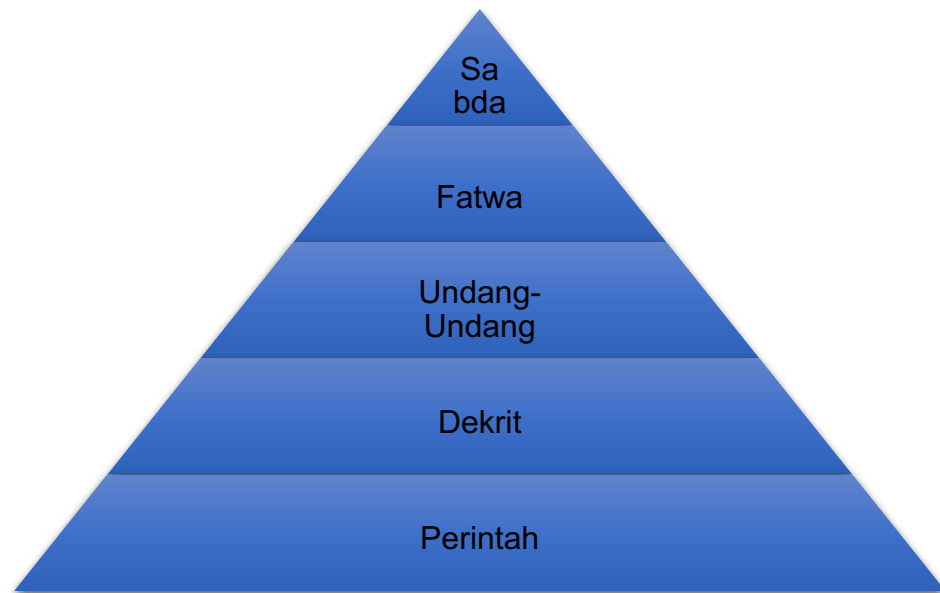
Meskipun Yogyakarta memiliki sistem kesultanan yang masih aktif, peran sabda dan dawuh Sultan dapat berbeda-beda dalam setiap situasi dan konteks. Masyarakat Yogyakarta sendiri memiliki keragaman pandangan dan sikap terhadap sabda dan dawuh Sultan, dan respon terhadap sabda dan dawuh tersebut juga dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pendidikan individu atau kelompok pada masyarakat Yogyakarta.

Selain itu, sabda dan dawuh juga dapat memiliki implikasi dalam konteks kebijakan dan pengambilan keputusan. Sabda dan dawuh Sultan atau tokoh otoritatif lainnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, pengaturan acara, atau tindakan sosial dalam masyarakat Yogyakarta. Sabda dan dawuh dianggap sebagai instruksi yang harus ditaati dan dijalankan dengan penuh rasa hormat dan kesetiaan.

Akan tetapi posisi dan pengaruh sabda dan dawuh sebagai pesan juga dapat berubah seiring dengan perkembangan budaya, ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Masyarakat Yogyakarta juga dapat mengkritisi, menafsirkan, atau mengevaluasi sabda dan dawuh sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat ini.

Stratifikasi antara sabda, fatwa, dekrit, undang-undang, dan perintah dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum, agama, dan pemerintahan yang berlaku

di suatu negara atau komunitas. Berdasarkan pendapat para ahli stratifikasi antara sabda, fatwa, undang-undang, dekrit, dan perintah dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 2.1. Stratifikasi Sabda, Fatwa, Undang-Undang, Dekrit, dan Perintah (Rinpoche, 1998)

Sabda dalam konteks yang umum merujuk pada pesan atau petunjuk yang diberikan oleh seorang pemimpin atau tokoh otoritatif yang dianggap memiliki kekuasaan atau legitimasi khusus. Sabda sering kali terkait dengan ajaran agama, prinsip kehidupan, nasihat, atau arahan yang dianggap memiliki kekuatan otoritatif dan harus dihormati.

Namun, "sabda" juga dapat memiliki makna yang bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti dalam konteks budaya dan tradisi tertentu. Konsep "sabda," dalam tradisi Buddhisme Tibet, guru dianggap sebagai sumber otoritas dan petunjuk spiritual bagi murid-muridnya. Mereka mentransmisikan ajaran-ajaran Buddha secara langsung melalui kata-kata, penjelasan, dan nasihat yang dianggap memiliki kekuatan otoritatif. Murid-murid diharapkan untuk menghormati dan mengikuti sabda (pesan) yang diberikan oleh guru mereka sebagai jalan untuk mencapai pencerahan dan kebijaksanaan (Rinpoche, 1998).

Menurut Epictetus (2004) seorang filsuf Stoik Yunani-Romawi yang hidup pada abad pertama Masehi dan dikenal karena ajaran-ajarannya tentang etika, kebahagiaan, dan kebijaksanaan, dalam konteks filosofi, konsep "sabda" dapat mengacu pada ide bahwa kata-kata memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan. Pada dasarnya, sabda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan ide, nilai-nilai, kebijaksanaan, dan pesan yang dapat mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan orang lain.

Sedangkan sabda menurut Ramadan (2007) secara umum, dalam konteks Islam, sabda merujuk pada perkataan, ajaran, dan nasihat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Sabda Nabi Muhammad dianggap memiliki power, otoritas yang penting dalam Islam, dan sering digunakan sebagai rujukan hukum dan panduan bagi umat islam.

Dalam konteks penelitian ini sabda dan dawuh merujuk pada petunjuk yang diberikan oleh Sultan HBX kepada masyarakat Yogyakarta tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Kemudian fatwa adalah pendapat atau keputusan hukum yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam (mufti) berdasarkan interpretasi hukum Islam terhadap suatu masalah atau pertanyaan yang diajukan. Fatwa adalah bentuk penjelasan hukum yang memberikan pedoman atau nasihat bagi umat Muslim dalam menjalankan agama (Rinpoche, 1998).

Fatwa adalah sumber hukum penting dalam tradisi Islam dan digunakan untuk memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Arabi membahas konsep fatwa dalam konteks sejarah pemikiran hukum Islam dan pandangan para pengambil keputusan dalam islam terhadap institusi fatwa. Arabi memberikan pemahaman tentang peran

fatwa dalam tradisi hukum Islam, proses pengambilan keputusan fatwa, serta pandangan dan perspektif berbagai ulama dan pengambil keputusan terhadap fatwa (Arabi,2013).

Salim (2015) memberikan gambaran fatwa dalam konteks Indonesia, yang memiliki keragaman agama dan sistem hukum, konsep fatwa menjadi relevan dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dan berinteraksi dengan hukum sekuler yang ada. Peran fatwa dalam konteks hukum Islam di Indonesia berkaitan dengan sistem peradilan, hukum positif, dan pluralisme hukum yang ada. Fatwa menghasilkan otoritasnya, dan dampaknya dalam praktik hukum Islam di Indonesia.

Secara umum dalam konteks Islam, fatwa adalah pendapat atau keputusan hukum yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam yang kompeten berdasarkan interpretasi hukum Islam terhadap suatu masalah atau pertanyaan yang diajukan. Fatwa adalah bentuk penjelasan hukum yang memberikan pedoman atau nasihat bagi umat Muslim dalam mengerjakan ajaran-ajaran agama Islam (Ellis, Ahmed, & Emon, 2018).

Berdasarkan interpretasi hukum Islam terhadap suatu masalah, fatwa berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan agama dan memberikan arahan kepada umat Muslim dalam menghadapi situasi atau permasalahan tertentu. Konsep fatwa dalam konteks negara yang diperintah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Duderija menjelaskan konsep fatwa dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam, pengaruhnya terhadap hukum dan kebijakan, serta hubungannya dengan otoritas negara dan sistem hukum yang berlaku (Duderija, 2019).

Stratifikasi selanjutnya adalah undang-undang yang merupakan peraturan atau regulasi rancangan badan legislatif atau lembaga pemerintah yang mempunyai landasan hukum yang baku. Undang-undang adalah instrumen hukum yang secara

formal menetapkan hak dan kewajiban masyarakat, mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, serta mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum (Rinpoche, 1998).

Konsep undang-undang dijelaskan sebagai peraturan hukum yang ditetapkan pemerintah berfungsi sebagai norma hukum yang mengatur tindakan, hubungan, dan kewajiban antara individu dan entitas lain dalam suatu masyarakat.

Cane and Tushnet (2003) dalam bukunya *The Oxford Handbook of Legal Studies* membahas peran undang-undang dalam sistem hukum, pembentukan undang-undang, interpretasi undang-undang, serta interaksi antara undang-undang dengan faktor politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat. Cane and Tushnet memberikan pandangan tentang sifat hukum, otoritas undang-undang, dan seperti apa interaksi undang-undang dan elemen-elemen lain dalam sistem hukum, seperti preseden, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip keadilan.

Levi (2013) dalam buku *An Introduction to Legal Reasoning* mengemukakan peran undang-undang dalam penalaran hukum. Ini mencakup bagaimana undang-undang digunakan sebagai sumber hukum, bagaimana undang-undang diterapkan dalam kasus konkret, dan bagaimana undang-undang berinteraksi dengan faktor-faktor lain dalam proses pengambilan keputusan hukum. Selain itu juga membahas aspek-aspek interpretasi undang-undang, yurisprudensi, preseden, dan pendekatan lain dalam penalaran hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

Berikutnya adalah *Decree* (dekrit) adalah keputusan atau pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. *Decree* sering digunakan dalam konteks pemerintahan untuk mengatur dan mengatur kebijakan, peraturan, atau keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat secara luas (Rinpoche, 1998).

Dekrit adalah perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh seorang penguasa atau otoritas yang memiliki kekuasaan tertinggi. *Decree* dapat memiliki berbagai bentuk dan konteks tergantung pada sistem politik dan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalam konteks politik, dekrit sering digunakan untuk mengatur tindakan atau kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. *Decree* dapat dikeluarkan oleh kepala negara, presiden, atau otoritas eksekutif lainnya dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam konteks Islam, dekrit mengacu pada keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh otoritas agama atau ulama yang kompeten. *Decree* dalam Islam sering terkait dengan penafsiran dan penerapan hukum Islam (syariah) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (urusan dunia), dan masalah sosial (Khan, 2016).

Decree dalam Islam dapat dikeluarkan oleh pemimpin agama, seperti mufti atau ulama yang diakui otoritasnya, atau lembaga yang memiliki wewenang dalam memutuskan masalah hukum. *Decree* sering digunakan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam menjalankan ajaran agama dan untuk memecahkan masalah hukum yang kompleks (Aljimah, 2007).

Stratifikasi terakhir adalah perintah yang merupakan instruksi atau tindakan dari seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memberikan perintah kepada orang lain. Perintah sering digunakan dalam konteks militer, organisasi, atau pemerintahan untuk memastikan kepatuhan, koordinasi, dan pelaksanaan tugas atau kebijakan tertentu (Rinpoche, 1998).

Garcia (2012) mengemukakan konsep perintah dalam konteks komunikasi kepemimpinan. Garcia mengeksplorasi teknik dan strategi komunikasi yang efektif

untuk memberikan perintah, memotivasi orang lain, dan membangun hubungan yang kuat dalam konteks kepemimpinan. Dalam konteks komunikasi dan kepemimpinan, perintah merujuk pada instruksi atau arahan yang diberikan oleh seorang pemimpin atau atasan kepada bawahan atau anggota tim. Perintah biasanya digunakan untuk mengatur tindakan atau perilaku orang lain dalam rangka mencapai tujuan atau menjalankan tugas yang diberikan.

Efektivitas perintah dalam konteks kepemimpinan tidak hanya tergantung pada ketegasan atau kewenangan pemimpin, tetapi juga pada cara komunikasi dan gaya kepemimpinan yang digunakan. Perintah yang jelas, terarah, dan disampaikan dengan sikap yang menghormati dapat membantu membangun kepercayaan, memotivasi anggota tim, dan memperoleh sesuai harapan.

Selanjutnya pendapat dari Laver dan Matthews (2017) dalam bukunya *The Art of Command: Military Leadership from George Washington to Colin Powell* membahas konsep perintah dalam konteks kepemimpinan militer. Dalam kepemimpinan militer perintah digunakan sebagai alat yang penting dalam mengarahkan tindakan dan mempengaruhi perilaku personel militer. Perintah memiliki makna yang khusus dan penting. Perintah adalah instruksi yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada anggota militer untuk melaksanakan tugas atau operasi tertentu. Perintah militer biasanya bersifat tegas, jelas, dan mengikat, dan harus diikuti oleh personel militer yang menerimanya.

Northouse (2018) memberikan pandangan konsep perintah sebagai salah satu aspek dari berbagai gaya atau pendekatan kepemimpinan yang ada. Perintah dapat dilihat sebagai metode yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk memberikan instruksi yang jelas dan tegas kepada anggota tim atau bawahan. Perintah dalam konteks kepemimpinan transformasional, transaksional, situasional, atau gaya

kepemimpinan lainnya. Perintah sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam memberikan instruksi dalam konteks dan situasi yang sesuai, serta implikasi dari penggunaan perintah dalam hubungan antara pemimpin dan bawahan.

Stratifikasi di antara konsep-konsep ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, atau sistem hukum yang relevan. Selain itu, perbedaan dalam kekuatan hukum, tingkat otoritas, dan lingkup pengaruh juga dapat mempengaruhi hierarki atau status relatif dari konsep-konsep tersebut. Dalam hal ini sabda yang dikeluarkan oleh Sultan merupakan pesan yang diberikan secara langsung dari Tuhan kepada Sultan untuk disampaikan kepada rakyatnya.

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.2.1. Teori Organisasi Max Weber

Konsep teori organisasi Max Weber (1978) memiliki fokus pada pemahaman tentang struktur dan dinamika organisasi dalam konteks sosial dan ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang konsep teori organisasi Weber: Pertama Weber memandang organisasi sebagai entitas yang didasarkan pada rasionalitas. Rasionalitas ini terbagi dalam dua kategori, yaitu tujuan yang rasional (*purposeful rationality*) dan nilai yang rasional (*value rationality*). Rasionalitas tujuan menekankan pada pencapaian tujuan yang efisien dan efektif, sementara rasionalitas nilai berkaitan dengan tindakan yang didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang dianggap penting.

Kedua Weber mengakui pentingnya struktur hierarkis dalam organisasi. Organisasi terdiri dari berbagai tingkatan hierarki, dengan pembagian kewenangan serta kejelasan tanggung jawab. Posisi pada sebuah struktur organisasi ditentukan oleh tingkatan hierarki dan otoritas formal.

Ketiga Weber menganggap pembagian kerja dan spesialisasi sebagai unsur penting dalam organisasi. Setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab dan

fungsi yang terdefinisi berdasarkan bidang keahlian dan tugas yang spesifik. Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan produktifitas dan efektifitas organisasi.

Keempat Weber mengidentifikasi otoritas dalam organisasi terdiri dari tiga model, yaitu tradisional, rasional-legal, dan okarismatik. Otoritas tradisional didasarkan pada tradisi dan warisan, otoritas rasional-legal didasarkan pada aturan dan hukum, sedangkan otoritas karismatik didasarkan pada karakteristik pribadi yang menarik dan menginspirasi.

Kelima Weber mengakui peran budaya organisasi dalam membentuk perilaku dan interaksi dalam organisasi. Budaya organisasi berpedoman pada kebiasaan, nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Motivasi, kerjasama, dan inovasi dalam konteks kerja dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi..

Konsep teori organisasi Weber menggambarkan pentingnya rasionalitas, struktur hierarkis, pembagian kerja, otoritas, kewenangan, dan budaya organisasi dalam membentuk dan mengarahkan organisasi. Konsep ini memberikan landasan pemahaman tentang cara organisasi beroperasi, beradaptasi, dan mencapai tujuan mereka dalam konteks sosial dan ekonomi.

Bryan S. Turner (1993) dalam bukunya yang berjudul *Max Weber: From History to Modernity* memberikan tinjauan tentang konsep *power*, *authority*, dan organisasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Turner membahas perjalanan hidup dan pemikiran Weber dalam konteks sejarah dan modernitas. Beberapa gambaran umum tentang konsep tersebut dalam perspektif Weber:

Pertama *power* (kekuasaan), Weber memandang kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tindakan orang lain, meskipun ada resistensi terhadap pengaruh tersebut. Weber mengidentifikasi berbagai sumber kekuasaan,

termasuk kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial. Weber memperhatikan peran kekuasaan dalam membentuk hubungan sosial dan menciptakan ketidaksetaraan.

Kedua *authority* (otoritas), Weber membedakan otoritas dari sekadar kekuasaan. Otoritas adalah bentuk kekuasaan yang diberikan oleh individu atau posisi yang diakui secara sosial atau institusional untuk menjalankan peran dan memerintah orang lain. Weber mengidentifikasi tiga jenis otoritas: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Otoritas legal-rasional memiliki dasar legitimasi pada aturan hukum dan struktur organisasi formal.

Ketiga organisasi, Weber memahami organisasi sebagai entitas sosial yang memiliki struktur, hierarki, dan tujuan tertentu. Weber mengamati peran organisasi dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Weber mempertimbangkan konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang didasarkan pada rasionalitas, aturan hukum, pembagian kerja yang jelas, dan hierarki yang terstruktur.

Berdasarkan pemahaman Weber tentang organisasi, kesultanan berakar pada analisisnya tentang kekuasaan, otoritas, dan legitimasi dalam konteks sosiologi. Kesultanan sebagai salah satu bentuk dari otoritas tradisional yang mencerminkan karakteristik unik dari struktur sosial dan politik dalam masyarakat yang bersangkutan. Di mana kekuasaan dan pengaruh terpusat pada sosok Sultan atau penguasa kesultanan. Otoritas tradisional sebagai salah satu bentuk otoritas yang mendasar dalam masyarakat. Dalam konteks organisasi kesultanan, otoritas tradisional terletak pada sosok sultan atau keluarga kerajaan yang dianggap memiliki warisan kekuasaan dari leluhur mereka.

Legitimacy berdasarkan tradisi, kekuasaan dan otoritas sultan dalam organisasi kesultanan diterima oleh masyarakat berdasarkan tradisi dan keyakinan yang berkaitan dengan status dan warisan kekuasaan keluarga kerajaan. *Legitimacy*

sultan tidak hanya berdasarkan pada kekuatan militer atau kekuatan politik semata, tetapi juga pada norma dan keyakinan tradisional yang memandang sultan sebagai pemegang otoritas yang sah.

Meskipun organisasi kesultanan dapat memiliki struktur hierarkis, pengaturan birokrasi yang terstruktur seperti dalam konsep birokrasi modern tidak terlalu ditekankan. Keputusan dan perintah umumnya berasal dari Sultan sebagai penguasa tinggi, dan diimplementasikan melalui jaringan kerabat atau pejabat yang memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki kesultanan. Kemudian peran agama, dalam kesultanan, agama, seperti Islam, dapat memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi kepada otoritas kesultanan. Sultan dianggap sebagai pemimpin religius dan politik, dan otoritas kesultanan sering kali dikaitkan dengan keabsahan agama dan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks penelitian ini terkait Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX, peneliti tidak berfokus pada kajian organisasi pemerintahan ataupun organisasi kesultanan Yogyakarta. Akan tetapi penelitian ini lebih pada komunikasi sebagai kajian dalam organisasi di kesultanan Yogyakarta yang merupakan organisasi tradisional. Di mana posisi Sri Sultaan HBX sebagai komunikator yang memiliki *Power, Authority, dan Legitimacy* tertinggi di Kesultanan Yogyakarta.

2.2.2. Power

Kekuasaan (*power*) merupakan keahlian seseorang untuk menghadapi atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Biasanya disertai ancaman dan sanksi. Kekuasaan dalam sistem politik apa pun berada di tangan segelintir orang yang menggunakannya untuk memberi penghargaan atau menghukum orang yang mereka anggap pantas.

Secara umum, dalam politik dan ilmu sosial, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang. Power sering dinyatakan sebagai kekuatan ke bawah, pemimpin menggerakkan bawahan. Ketika pemimpin mengerahkan kekuatan ke bawah, maka akan mempengaruhi keputusan bawahan (Greiner & Schein, 1988). Pada konteks ini power di lingkungan kerajaan merupakan keputusan Raja yang tidak bisa diganggu gugat oleh rakyatnya.

Konsep kekuasaan terkait erat dengan realisme, hal ini karena kekuasaan memberikan rasa aman dalam berpegang pada logika bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi pemimpin ketika seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya. Dengan demikian setiap pihak saling berusaha memaksimalkan dan mengkonsolidasikan kekuatannya (Khawaja, 2011).

Penerapan kekuasaan tidak harus dilakukan dengan paksaan melalui suatu tindakan ekstrim. Secara komprehensif dapat ditemukan di Steven Luke's, power merupakan sebuah pandangan radikal di mana power mewacanakan dimensi kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan dapat dilihat sebagai bentuk kendala atas tindakan manusia, tetapi juga sebagai sesuatu yang memungkinkan tindakan, meskipun dalam lingkup yang terbatas. Sebagian besar perdebatan ini terkait dengan karya-karya filsuf Prancis Michel Foucault (1926-1984), yang mengikuti filsuf politik Italia Nicolo Machiavelli (1469 – 1527), melihat kekuasaan sebagai “situasi strategis yang kompleks dalam lingkungan sosial masyarakat tertentu”.

Power sabda Sultan mencerminkan pengaruh dan pengendalian yang dimiliki oleh Sultan terhadap kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Yogyakarta. Melalui sabda atau pernyataannya, Sultan dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku orang-orang di dalam Kesultanan. Sabda dan dawuh Sultan dapat berdampak pada

kebijakan politik, hukum, dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Secara hierarki dan struktur sosial, konsep power sabda dan dawuh Sultan menduduki posisi tertinggi dalam hierarki kesultanan dan memiliki peran sebagai pemimpin politik, religius, dan sosial. Power sabda dan dawuh Sultan dijalankan dalam konteks struktur sosial yang terorganisir, dengan adanya pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas implementasi keputusan Sultan.

2.2.3. Authority

Istilah *authority* (otoritas) sering digunakan secara bergantian dengan kekuasaan. Namun, maknanya berbeda: sementara kekuasaan didefinisikan sebagai "kemampuan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak akan lakukan", otoritas mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk menggunakan kekuasaan itu (Ismail, 2019).

Max Weber (1922) menyatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk menjalankan kehendak seseorang atas orang lain. Pengaruh kekuasaan melebihi hubungan personal; power membentuk dialektika dan dinamika yang lebih besar seperti pemerintahan, organisasi, ataupun kelompok sosial masyarakat.

Herbert A. Simon mendefinisikan otoritas sebagai berada dalam kekuasaan. Kekuatan untuk memerintahkan ketaatan. Menurut Michaels, dalam *Encyclopaedia of Social Sciences*, otoritas adalah kapasitas, bawaan atau diperoleh untuk menjalankan kekuasaan atas suatu kelompok. Ilmuwan lain berpendapat bahwa otoritas merupakan hubungan dan bukan kapasitas. Ini adalah kekuatan yang disetujui dan dilembagakan. Dalam karyanya yang berfokus pada sosiologi dan filsafat, Max Weber (1992) mengamati dan membedakan tiga bentuk dominasi yang sah (disebut sebagai "Herrschaft" dalam bahasa Jerman, yang umumnya merujuk pada 'dominasi' atau

'aturan'). Terkadang dalam terjemahan bahasa Inggris, istilah ini dapat diartikan sebagai jenis otoritas, karena dominasi pada dasarnya bukanlah konsep politik utama. Weber secara eksplisit mendefinisikan dominasi (otoritas) sebagai kemampuan untuk memberikan perintah yang akan dipatuhi oleh sekelompok orang yang dapat ditentukan. Otoritas yang sah, oleh Weber, adalah yang diakui sebagai wewenang yang sah dan diterima baik oleh penguasa maupun yang diperintah.

Menurut konsep Weber, otoritas sabda dan dawuh Sultan dapat dipahami sebagai bagian dari otoritas tradisional. Weber memandang otoritas sebagai kemampuan mengendalikan tindakan orang lain berdasarkan keyakinan bahwa pemegang otoritas tersebut memiliki hak yang sah untuk memerintah atau memberikan petunjuk. Dalam konteks kesultanan, sabda dan dawuh Sultan merujuk pada pernyataan atau instruksi yang dikeluarkan oleh Sultan dan dianggap memiliki otoritas yang sah.

Sabda dan dawuh Sultan merupakan otoritas tradisional, Sabda dan dawuh Sultan didasarkan pada legitimasi tradisional yang diterima oleh masyarakat Yogyakarta. Masyarakat mengakui otoritas Sultan dalam memberikan perintah atau petunjuk karena adanya keyakinan yang terkait dengan tradisi, norma, dan kepercayaan yang berhubungan dengan posisi Sultan sebagai penguasa tradisional.

Kepemimpinan karismatik, dalam pandangan Weber bahwa otoritas dapat berasal dari kepemimpinan karismatik, yaitu kemampuan Sultan untuk mempengaruhi dan memikat masyarakat dengan karisma dan daya tarik pribadinya. Sabda dan dawuh Sultan dapat memiliki pengaruh yang kuat karena kemampuan Sultan dalam menyampaikan pesan dengan cara yang meyakinkan dan menginspirasi pengikutnya.

2.2.4. *Legitimacy*

Secara sederhana, legitimasi adalah penerimaan orang-orang dari otoritas dari mereka yang berkuasa untuk memerintah. Legitimasi adalah memerintah rakyat berdasarkan persetujuan mereka. Jika legitimasi ditafsirkan secara deskriptif, itu mengacu pada keyakinan masyarakat tentang otoritas politik dan kadang-kadang, kewajiban politik. Dalam bidang sosiologi, Max Weber menyajikan penjelasan yang sangat berpengaruh tentang legitimasi dalam teorinya, yang mengabaikan segala kriteria normatif (seperti yang dikemukakan oleh Mommsen pada tahun 1989). Menurut Weber, dalam konteks politik, suatu rezim dianggap sah jika para pesertanya mempercayai adanya legitimasi tertentu terkait dengan rezim tersebut. Weber menggambarkan bahwa dasar dari setiap sistem otoritas, dan oleh karena itu kesediaan untuk tunduk, adalah kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan ini, orang-orang yang memegang otoritas mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kekuasaan mereka (Weber, 1964).

Tidak seperti konsep deskriptif Weber, konsep normatif legitimasi politik merujuk pada kriteria-kriteria yang digunakan untuk menerima atau membenarkan kekuasaan atau otoritas politik, dan mungkin juga melibatkan kewajiban. Secara lebih umum, konsep legitimasi ini menjelaskan mengapa penggunaan kekuatan politik oleh entitas seperti negara, pemerintah, atau kelompok demokratis diperbolehkan, serta mengapa ada kewajiban dalam hal ini. Dalam konteks moral, ada pendapat yang beragam tentang apakah harus mematuhi perintah tersebut atau tidak.

Dalam karya "*Political Liberalism*" (1993), John Rawls menyajikan interpretasi mengenai legitimasi sebagai berikut: ketika kondisi-kondisi legitimasi tidak terpenuhi, institusi politik akan menggunakan kekuasaan secara tidak adil, dan perintah yang dihasilkan oleh institusi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk

dipatuhi. Sebaliknya, John Locke mengemukakan interpretasi tentang legitimasi sebagai suatu kondisi alami di mana semua individu memiliki kesetaraan dalam hal otoritas politik, yang berarti mereka memiliki hak yang sama.

Kekuasaan politik secara umum dianggap sebagai "contoh tertinggi" dalam masyarakat, dan tidak ada otoritas lain yang lebih superior atau dapat menentang keputusannya. Ada berbagai bentuk kekuasaan sosial seperti kekuasaan keluarga (dalam konteks pengaruh pada keturunan), kekuasaan administratif hierarkis, kekuasaan ekonomi, kekuasaan agama (kecuali dalam kasus agama fundamentalis yang meningkat), kekuatan ideologi negara yang memaksa, kekuatan budaya, kekuatan moral, kekuatan militer (kecuali dalam rezim otoriter yang dilindungi oleh militer), kekuatan informasi (termasuk "virus pikiran"). Semua bentuk kekuatan sosial ini, pada tingkat tertentu, tunduk pada kekuasaan politik. Dalam rezim demokrasi, tujuan politik yang dianggap penting telah ditingkatkan menjadi cita-cita politik, dan kekuasaan politik diatur oleh batasan-batasan konstitusional. Ini memberikan kekuasaan politik kekuasaan terakhir dalam situasi ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap keputusannya.

Pada masyarakat modern yang tidak berada di luar kontrol sosial atau independen di hadapan hukum, pemegang kekuasaan politik, legislator dan gubernur, mempunyai fungsi memutuskan atas nama seluruh masyarakat luas, dengan keputusan mereka mengatur semua kekuatan sosial lainnya tanpa terikat untuk mematuhi salah satu dari ini. Masyarakat global adalah kolektivitas tertinggi, yang tidak bergantung pada yang lain, berarti mengatakan bahwa otoritas kolektivitas ini juga tertinggi, dalam hal ini, kekuatan politik adalah yang berdaulat kekuasaan.

Legitimasi suatu aturan keputusan menandakan fakta bahwa orang menganggap keputusan itu bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat. Dengan

demikian mereka selalu siap untuk mengikuti aturan atau keputusan. Demonstrasi Kekuasaan tidak menjadi keharusan selama legitimasi melekat pada kekuasaan (Ismail, 2019).

Karakter tertinggi dari otoritas masyarakat global yang membuat politik kekuasaan berdaulat dalam jenis masyarakat ini mengarah pada pemahaman politik kekuasaan sebagai "kapasitas umum (pada tingkat masyarakat Yogyakarta) keputusan dan kontrol" sebuah kapasitas permanen "yang diwujudkan dalam berbagai cara nyata realisasi kehendaknya (*the will of the* kekuatan politik), diperkuat oleh kekuatan Kesultanan Yogyakarta.

Berdasarkan konsep Weber, legitimasi otoritas sabda dan dawuh Sultan termasuk dalam konteks legitimasi tradisional yang merupakan salah satu tipe legitimasi yang diakui oleh masyarakat. Legitimasi merupakan dasar yang memberikan keabsahan atau kepercayaan pada otoritas Sultan dan memungkinkannya untuk memerintah atau memberikan petunjuk.

Otoritas legitimasi sabda dan dawuh Sultan dalam masyarakat Yogyakarta didasarkan pada tradisi, norma, dan keyakinan yang diturunkan secara turun-temurun. Masyarakat mengakui otoritas Sultan dan mempercayai keputusan atau perintah yang diberlakukannya karena adanya keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat bahwa posisi Sultan secara tradisional memiliki hak untuk memerintah dan memberikan petunjuk.

Legitimasi sabda dan dawuh Sultan juga bergantung pada keyakinan kolektif masyarakat terhadap keabsahan dan kewenangan Sultan. Masyarakat yang menerima dan menghormati sabda dan dawuh Sultan melakukannya karena keyakinan bersama bahwa Sultan memiliki hubungan khusus dengan leluhur, entitas spiritual, atau otoritas yang lebih tinggi, yang memberikan legitimasi pada otoritasnya.

Salah satu aspek penting dalam legitimasi sabda dan dawuh Sultan adalah adanya kontinuitas dan stabilitas dalam tradisi pemerintahan dan tatanan sosial. Ketika masyarakat melihat adanya kelanjutan dari masa lalu yang mapan dan merasa aman dalam struktur hierarki dan otoritas Sultan, mereka lebih cenderung menerima dan melegitimasi sabda Sultan dan begitupula sebaliknya.

2.2.5. Social Judgment Theory

Teori Penilaian Sosial (*Social Judgment Theory*/SJT), yang dikembangkan oleh Muzafer Sherif, difokuskan pada proses pembentukan penilaian terhadap pernyataan yang didengar. SJT bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat mengevaluasi pesan yang diterima dan bagaimana penilaian tersebut mempengaruhi sistem keyakinan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian mengenai pembentukan dan perkembangan opini merupakan topik yang menarik dan penting dalam bidang psikologi sosial.

Banyak eksperimen dan teori telah dilakukan dan diusulkan termasuk model kemungkinan elaborasi, model heuristik-sistematis dan teori disonansi kognitif. Secara khusus, Sherif et. all. mengusulkan teori penilaian sosial yang terkenal (SJT) di tahun 1960-an untuk menjelaskan perilaku mikroskopis tentang bagaimana individu mengevaluasi dan mengubah pendapat mereka berdasarkan interaksi dengan orang lain (Miller, 2005; Littlejohn, 2011; Chau, 2014; Griffin, 2015).

Ide dasar SJT adalah bahwa perubahan sikap individu adalah proses penilaian. Menurut SJT, menggambarkan pendirian individu sebagai titik dalam kontinum pendapat yang mungkin tidak memadai karena tingkat toleransi individu juga penting dalam menentukan responsnya terhadap rangsangan dan bujukan eksternal. Secara khusus, pendapat yang disajikan dapat diterima (tidak dapat diterima) oleh seseorang jika dianggap dekat dengan (jauh dari) pendiriannya sendiri (Littlejohn, 2011).

Menurut Teori Penilaian Sosial (*Social Judgment Theory/SJT*), seorang individu melakukan pertimbangan terhadap setiap ide baru dengan membandingkannya dengan sudut pandang mereka saat ini. Tujuannya adalah menentukan posisi ide tersebut pada skala sikap dalam pikiran individu. SJT adalah alam bawah sadar memilah ide-ide yang terjadi pada saat persepsi. Perspektif bahwa orang mengasimilasi informasi baru tentang objek sikap berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui atau rasakan; sikap awal bertindak sebagai kerangka acuan, dan informasi baru dikategorikan dalam standar rentang penerimaan, penolakan, dan netral. Setiap orang berbeda dalam hal informasi yang mereka anggap dapat diterima atau tidak dapat diterima. Mereka membentuk garis lintang penerimaan dan penolakan di sekitar standar sikap. Ide-ide yang termasuk dalam garis lintang akan diterima dengan baik, tetapi ide-ide yang berada di luar zona ini tidak akan diterima.

Tabel 2.2. Rentang Sikap

<i>Latitude of Acceptance</i>	<i>Latitude Rejection</i>	<i>Latitude of Noncommitment</i>
Rentang atau kisaran ide/pesan seseorang dianggap masuk akal atau layak dipertimbangkan untuk diterima	Rentang atau kisaran ide /pesan seseorang dianggap tidak masuk akal atau tidak menyenangkan dan mengalami penolakan	Kisaran atau kisaran ide/pesan seseorang melihat bahwa mereka tidak menerima atau menolak (netral)

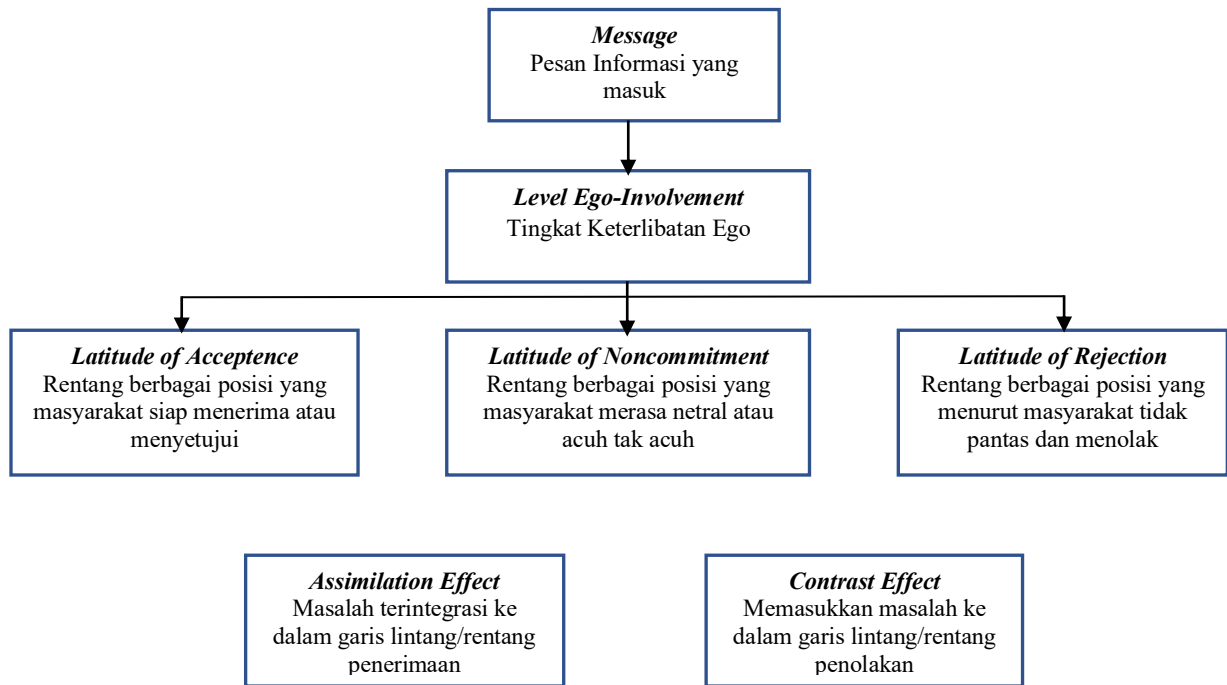
Sumber: (Miller, 2005; Littlejohn, 2011; Chau, 2014; Griffin, 2015)

Sketsa sepintas teori disonansi kognitif, teori tindakan beralasan, dan teori penilaian sosial menunjukkan pentingnya beberapa faktor kunci dalam memahami

proses penerimaan dan pemrosesan pesan. Pertama, teori-teori ini menyoroti pentingnya struktur sikap individu, baik dalam bentuk hubungan perilaku sikap, keyakinan tentang objek sikap dan norma subjektif, atau garis lintang sikap. Kedua, teori-teori ini menunjukkan bahwa berbagai jenis pesan mungkin berfungsi untuk mengubah perilaku (misalnya pesan dari perbedaan yang berbeda, pesan yang mengubah norma atau keyakinan). Ketiga, teori-teori ini menunjukkan proses perbandingan (misalnya antara sikap dan perilaku) dan kombinasi (misalnya sikap dan norma subjektif) dalam memprediksi niat dan perilaku perilaku. Tiga teori yang terus menyoroti beberapa proses ini dan teori-teori ini memiliki koneksi yang lebih terkini pada substansial ke bidang komunikasi. Teori pertama model kemungkinan elaborasi, dikembangkan dalam psikologi sosial tetapi telah menerima banyak pengujian dan kritik oleh ilmuwan lain, terutama di bidang komunikasi. Kedua, teori inokulasi, dikembangkan lagi dalam psikologi tetapi telah digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang banyak masalah komunikasi terapan. Teori terakhir adalah teori integrasi bermasalah, adalah pendekatan yang telah diusulkan dari dalam disiplin komunikasi untuk mengatasi masalah pemrosesan pesan yang lebih luas dalam berbagai konteks (Miller, 2005).

SJT menggolongkan ke dalam tiga kategori yakni menerima pernyataan, menolak pernyataan, dan netral. Kemudian pengelompokan ini disebut dengan istilah rentang; pertama rentang penerimaan (*Latitude of acceptance*) merupakan pernyataan yang menandakan setuju; kedua rentang penolakan (*Latitude rejection*) merupakan rentang yang menandakan tidak setuju; ketiga rentang ketidakterlibatan (*Latitude of noncommitment*) merupakan rentang yang menandakan ketidakterlibatan atau netral (Miller, 2005; Littlejohn, 2011; Chau, 2014; Griffin, 2015)

Tabel 2.3. *Social Judgment Process*



Sumber: (Miller, 2005; Littlejohn, 2011; Chau, 2014; Griffin, 2015)

Masyarakat tidak akan sepenuhnya menerima suatu pesan secara tiba-tiba atau spontan dan tanpa ragu sebelum melakukan penilaian berdasarkan keyakinan yang telah mereka miliki sebelumnya. Perubahan sikap masyarakat terhadap pesan atau isu tertentu adalah hasil dari proses pertimbangan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Proses ini melibatkan evaluasi pesan, isu, atau objek sosial dengan mempertimbangkan tujuan individu yang ada dalam masyarakat.

2.2.5.1. *Latitude of Acceptance*

Latitude of Acceptance merupakan pandangan yang diterima oleh masyarakat, yang memiliki potensi untuk mengubah sikap masyarakat. Garis lintang penerimaan yang terdiri dari item yang digaris bawahi dan lainnya yang masuk dalam lingkaran sebagai ide yang dapat diterima. Rentang ide yang dianggap masuk akal atau layak dipertimbangkan oleh seseorang akan mengalami penerimaan.

Rentang lintang penerimaan, di mana pesan diterima dengan hal positif. Lebih lanjut posisi yang direkomendasikan cenderung diasimilasi jika dipandang cenderung dalam garis lintang penerimaan seseorang, posisi di samping pendirian yang disukai yang secara umum dapat diterima (Sherif et al., 1965; Ganberg&Sarup, 1991; Darity, 2008; Griffin, 2015; Salazar, 2017).

2.2.5.2. *Latitude of Rejection*

Latitude of Rejection merupakan pendapat yang tidak diterima karena bertentangan dengan kerangka sikap dan keyakinan masyarakat. Jika pesan yang disampaikan berlawanan dengan persepsi penerima, maka penerima tidak akan mengubah sikapnya. Garis lintang penolakan, di mana pesan diterima dengan skeptisisme dan hal negative. Penolakan lintang ini terdiri dari pendapat atau ide yang dianggap tidak menyenangkan. Garis lintang penolakan merupakan rentang garis ide yang tidak disetujui oleh individu. Individu yang lebih cenderung pada garis penolakan yang lebih mendominasi, maka akan sulit untuk dibujuk atau menerima. Hal ini dikontraskan jika dilihat cenderung pada garis lintang penolakan, posisi yang menyinggung atau tidak menyenangkan (Sherif et al., 1965; Ganberg&Sarup, 1991; Darity, 2008; Griffin, 2015; Salazar, 2017).

2.2.5.3. *Latitude of Noncommitment*

Latitude of Noncommitment merupakan pendapat yang tidak secara aktif ditolak atau diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat bersikap netral terhadap pesan atau objek tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai kondisi ketika tidak ada tanggapan atau keputusan yang dibuat terkait dengan isi pesan. Garis lintang non-komitmen, di mana pesan diterima dengan netralitas atau kurangnya komitmen, garis lintang ini merupakan rentang ide yang mencakup posisi tidak diterima atau ditolak oleh individu. Mereka mirip atau menandakan ragu-ragu dan cenderung tidak

memiliki pendapat sikap yang jelas. Posisi yang direkomendasikan yang berada di garis lintang non-komitmen diklasifikasikan sebagai tidak dapat diterima atau tidak dapat ditolak dianggap sebagai sikap yang kurang rentan terhadap distorsi (Sherif et al., 1965; Ganberg&Sarup, 1991; Darity, 2008; Griffin, 2015; Salazar, 2017).

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Kekuasaan Keraton Yogyakarta

Pada pandangan filsafat Jawa Keraton Yogyakarta mencerminkan sistem nilai dan kepercayaan yang menjadi landasan budaya di Keraton Yogyakarta, salah satu kerajaan tradisional di Indonesia. Filsafat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, agama, dan tata krama. Filsafat Jawa Keraton Yogyakarta memiliki pengaruh kuat dari agama dan kepercayaan Jawa, seperti kejawen dan kebatinan, serta dipengaruhi oleh konsep-konsep Hindu dan Islam yang terintegrasi dalam tradisi Jawa (Moedjanto, 1987).

Dalam filsafat Jawa Keraton Yogyakarta, terdapat beberapa nilai dan konsep penting, antara lain:

1. Raja sebagai Manifestasi Dewa: Konsep ini menganggap raja sebagai manifestasi atau perwujudan dewa di dunia manusia. Raja dianggap sebagai pemimpin yang memiliki tugas untuk melindungi dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja juga dianggap sebagai pusat kehidupan dan simbol kesatuan dalam masyarakat Jawa.
2. Kebijakan dan Keharmonisan: Filsafat Jawa Keraton Yogyakarta menekankan pentingnya kebijakan dan keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini mencakup hubungan antara manusia dengan sesamanya, alam, dan tuhan. Keharmonisan dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan.

3. Kosmologi dan Alam Semesta: Filsafat Jawa Keraton Yogyakarta melibatkan pandangan kosmologi yang melihat alam semesta sebagai sebuah sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Terdapat keyakinan akan adanya keseimbangan dan hubungan timbal balik antara manusia, alam, dan dunia spiritual.

2.3.2. Ruang Publik

Karya awal Jurgen Habermas (1962) telah menjadi titik awal utama untuk membahas ruang publik dalam studi media dan ilmu politik. Pemikirannya menggambarkan bagaimana, dari waktu ke waktu, ruang publik dapat dipahami kembali. Penjelasan awal Habermas tentang transformasi struktural ruang publik menggambarkan penemuan ruang yang relatif tidak dibatasi untuk wacana publik – lokasi kritis, yang berbasis di masyarakat sipil, tidak ditangkap oleh negara maupun kekuatan politik resmi.

Ekspektasi idealisasi ruang publik modern telah meninggalkan bekas yang dalam bagi masyarakat. Norma-normanya tertanam dalam institusi dan dalam sejarah budaya yang kompleks dari masyarakat demokratis. Habermas (dalam Johnson, 2006) telah menekankan karakter mereka yang terkondisi secara historis dan terletak secara institusional. Asosiasi budaya ini menurut Habermas mengidentifikasi seperangkat harapan untuk menangani klaim orang lain yang nantinya akan membentuk kehadiran di lembaga-lembaga politik demokrasi liberal. Ini adalah mode interaksi di mana para peserta melakukan sendiri tanpa memperhatikan status sosial, percaya otoritas argumen yang lebih baik harus diizinkan menang. Komitmen pada prinsip publisitas menganjurkan keterbukaan untuk diskusi dan kritik yang bebas.

Sifat “publik”, dan “ruang publik”, seperti halnya demokrasi dan masyarakat sipil, menyaksikan keragaman makna yang berbeda. Ruang publik, yang secara

langsung terkait dengan spasialisasi demokrasi atau masyarakat sipil, “secara tradisional dibedakan dari ruang privat dalam hal aturan akses, sumber dan sifat kontrol atas masuknya ruang, perilaku individu dan kolektif yang disetujui dalam ruang tertentu, dan aturan penggunaan”.

Akhirnya, “publik” yang baru muncul ini bersikeras pada prinsip keterbukaan dan inklusi. Idealnya, semua diizinkan untuk berpartisipasi dalam interaksi di mana satu-satunya batasan adalah kemauan dan kapasitas untuk tunduk pada norma-norma wacana argumentatif. Ronda dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Sosial dan Demokrasi Warung Kopi* (2019) mengemukakan, ruang publik juga bersifat politis (dalam arti praktik kekuasaan) jika diskusi ruang publik yang dilangsungkan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut praktik bernegara. Tetapi, ruang publik ini juga dapat menjadi sebuah kekuatan tandingan atas negara, di mana “mediasi” antara masyarakat dan negara dapat terjadi.

Ruang publik merupakan metafora spasial; itu adalah sebuah konstruksi, hasil dari kecerdasan kolektif. Ini digunakan sampai batas tertentu dalam wacana umum; ruang publik memiliki eksistensi material dalam bentuk aktor politik dan kehidupan institusional; ruang publik juga menawarkan posisi normatif di masa-masa sulit. Berdasar tatanan demokrasi, boleh dibilang ruang publik masih menjadi lokus utama komunikasi politik dan strategi serta taktik yang menjadi ciri aktivitas.

2.3.3. Persepsi

Manusia memiliki kapasitas dan peluang untuk berkomunikasi, yang memungkinkan mereka untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Komunikasi ini melibatkan interaksi, sikap, dan perilaku yang saling mempengaruhi. Melalui interaksi tersebut, manusia dapat memperoleh perspektif baru tentang sesama

dan memahami lebih dalam tentang sikap dan perilaku individu masing-masing. Dalam kenyataannya, persepsi manusia sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang dipelajari tentang diri sendiri dan orang lain melalui proses komunikasi.

Persepsi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*perception*" yang mengacu pada kemampuan untuk melihat atau memahami. Desiderato, seperti yang dijelaskan oleh Muchtar T.W, menyatakan bahwa persepsi melibatkan pengamatan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan penafsiran pesan. Menurut Sarlito W. Sarwono, sebagaimana disampaikan oleh Mochamad J. A, persepsi adalah proses kategorisasi di mana organisme menanggapi masukan tertentu (seperti objek, peristiwa, dan sejenisnya) dengan menghubungkannya ke dalam salah satu kategori (golongan) objek atau peristiwa.

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses yang dimulai dengan penginderaan, yaitu penerimaan stimulus oleh individu melalui indera. Namun, proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Secara umum, stimulus tersebut kemudian dikirimkan melalui sistem saraf ke otak sebagai pusat pengolahan saraf, dan proses selanjutnya adalah proses persepsi. Dengan kata lain, proses persepsi tidak dapat terjadi tanpa adanya proses penginderaan, karena penginderaan merupakan langkah awal dalam terjadinya persepsi.

Persepsi, baik yang positif maupun yang negatif, dapat dibandingkan dengan data yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Data tersebut akan muncul saat ada stimulus yang memicunya, seperti kejadian yang memicu kemunculan data tersebut kembali. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk melihat objek yang sama dengan cara yang berbeda. Perbedaan cara pandang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang individu itu sendiri.

Persepsi juga berkaitan dengan cara individu melihat dan menafsirkan suatu objek tertentu melalui penggunaan indera yang dimilikinya.

Tidak dapat dihindari, setiap hari manusia terlibat dalam kegiatan persepsi. Ketika berinteraksi dengan masyarakat, mengurus perizinan, bertemu dengan teman, dan sebagainya, persepsi selalu hadir dalam diri manusia. Dalam garis besar, Dedi Mulyana (2020) menjelaskan bahwa persepsi manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik), yang menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang melibatkan sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Ketika seseorang mempersepsi orang lain, orang tersebut juga mempersepsi kembali. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.
2. Persepsi terhadap manusia melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melibatkan lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih aktif dibandingkan dengan objek-objek lainnya dan lebih sulit untuk diprediksi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pengamatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek dengan melibatkan indera, sensasi, motivasi, dan memori. Selanjutnya, pengamatan tersebut diproses dan dianalisis sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman individu yang melakukan persepsi.

Hal yang sama juga terjadi dalam masyarakat Yogyakarta terkait pelayanan Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX mengenai Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Masyarakat Yogyakarta dapat memiliki cara yang berbeda dalam memahami Sabda dan Dawuh yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HBX, dan perbedaan

tersebut mempengaruhi sikap masyarakat Yogyakarta sesuai dengan pemahaman mereka.

Menurut Sunaryo (2019), terdapat beberapa syarat terjadinya persepsi, yaitu:

a) Adanya objek yang dipersepsi. b) Adanya perhatian sebagai langkah persiapan untuk melakukan persepsi. c) Adanya alat indera atau reseptor yang berfungsi untuk menerima stimulus. Saraf sensorik berperan dalam meneruskan stimulus ke otak, yang selanjutnya memicu respons.

Faktor-faktor berikut mempengaruhi terjadinya persepsi:

a) Faktor-faktor fungsional,

Faktor yang meliputi kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan faktor-faktor personal lainnya. Karakter individu yang melakukan persepsi memengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan suatu objek, termasuk:

- a. Kebutuhan atau motif, yang memprioritaskan informasi yang relevan dengan kebutuhan tersebut.
- b. Sikap, preferensi, dan keyakinan, yaitu sikap individu terhadap informasi yang sudah diyakini sebelumnya, yang membuat mereka lebih memperhatikan informasi tersebut daripada informasi lainnya.
- c. Tujuan, yang memengaruhi persepsi terhadap sesuatu.
- d. Kapasitas, seperti tingkat kecerdasan, kemampuan berbicara, dan kemampuan berbahasa.
- e. Kegunaan, yaitu seberapa pentingnya suatu informasi.
- f. Gaya komunikasi, misalnya orang yang pemalu akan menghindari komunikasi diskusi, dan lain sebagainya.
- g. Pengalaman dan kebiasaan, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan budaya.

b) Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara seseorang mempersepsikan sesuatu, termasuk intensitas rangsangan, ukuran rangsangan, perubahan rangsangan, dan pertentangan rangsangan. Beberapa faktor yang berasal dari rangsangan tersebut meliputi:

- a. Karakteristik fisik stimulus, seperti ukuran, warna, intensitas, dan sebagainya.
- b. Pengorganisasian pesan, yaitu bagaimana pesan tersebut diatur atau disusun untuk mempengaruhi persepsi kita.
- c. Novelty (kebaruan), di mana hal-hal baru cenderung mendapatkan perhatian lebih dibandingkan hal-hal yang rutin atau biasa.
- d. Asal informasi, yang bisa berasal dari lingkungan fisik, diri sendiri, orang lain, media massa, dan lain sebagainya.
- e. Media atau saluran, di mana informasi yang diperoleh melalui berita televisi akan dipandang berbeda dengan informasi yang diperoleh melalui media cetak.

Dalam konteks penelitian ini, persepsi merujuk pada cara masyarakat memberikan makna terhadap Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX mengenai Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Sabda dan Dawuh tersebut memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat Yogyakarta, yang menghasilkan berbagai sikap seperti setuju, tidak setuju, atau netral.

2.3.4. Struktur Masyarakat Yogyakarta

Secara umum, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dan melibatkan interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Istilah "*society*" berasal dari kata latin "*socius*" yang berarti "kawan". Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi dan perkembangan karena adanya pertentangan antar kelompok dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya. Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu entitas objektif yang terpisah dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Masyarakat terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur selama waktu yang cukup lama, dan menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan dan sistem kehidupan bersama. Masyarakat mencakup manusia yang hidup bersama dan dapat diartikan sebagai kehidupan dalam suatu tatanan sosial.

Ralph Linton, sebagaimana dikutip dalam Soekanto (2006), menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari kebiasaan, tata cara, wewenang, kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku, serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Dalam konteks ini, masyarakat adalah kelompok manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka memiliki kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, serta memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Dalam menjelaskan pengertian masyarakat, Ralph Linton juga menyebutkan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan yang telah ditentukan. Ini berarti untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat, mereka harus merupakan kelompok manusia yang telah menetap dan bekerja sama dalam suatu wilayah tertentu. Koentjaraningrat

(2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang terintegrasi berdasarkan sistem adat istiadat tertentu yang berkelanjutan dan terkait oleh suatu identitas bersama.

2.4 Diskusi Antar Teori

Max Weber, seorang sosiolog, menyampaikan bahwa kekuasaan merujuk pada kemampuan suatu entitas atau individu untuk mengontrol atau mengarahkan orang lain, sedangkan otoritas merupakan pengaruh yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Dalam kajiannya tentang kekuasaan dan otoritas, Weber membedakan dua konsep tersebut dan merumuskan sistem untuk mengklasifikasikan jenis otoritas.

Kekuasaan adalah kemampuan, baik dalam skala pribadi maupun sosial, untuk mencapai suatu tujuan — baik itu untuk menegakkan kehendak individu atau untuk mengamankan kehendak kolektif dari kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Sementara itu, legitimasi adalah hak yang dibangun secara sosial dan diterima secara psikologis untuk mempraktikkan kekuasaan. Seseorang dapat memiliki legitimasi tetapi tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Di sisi lain, seseorang juga dapat memiliki kekuasaan yang nyata tetapi tidak memiliki legitimasi. Dalam esensinya, Weber menyoroti perbedaan antara kekuasaan dan otoritas, menggarisbawahi bahwa legitimasi adalah elemen kunci yang membedakan kedua konsep tersebut.

Jadi singkatnya kewenangan adalah kualitas atau kapasitas seseorang, lembaga, aturan atau tatanan yang menjadi penting dalam menentukan apakah otoritas itu benar atau otentik, sehingga orang dapat mengikuti aturan dan peraturan tanpa ragu-ragu. Penggunaan kebijakan resmi Pemerintah, aturan dan peraturan dapat diterima di masyarakat. Otoritas memiliki dua komponen utama: kekuasaan dan legitimasi. Tanpa kekuasaan akan sangat sulit untuk melaksanakan keputusan dan peraturan resmi, tetapi hanya dengan ketakutan akan hukuman atau oleh paksaan

otoritas mungkin tidak akan berhasil sejauh menyangkut manfaat jangka panjang. Bahkan langkah seperti itu menjadi tirani dan berfungsi sebagai katalis untuk pemberontakan.

Setelah melihat konsep; *power*, *authority* dan *legitimacy* dengan maksud untuk melihat bagaimana konsep ini terjalin dan sampai batas tertentu tumpang tindih melihat dari konteks yang berbeda, situasi atau dalam penelitian ini, konsep *power*, *authority* dan *legitimacy* untuk melihat saling keterkaitan atau saling ketergantungannya pada satu sama lain untuk keberadaan sistematis di masyarakat Yogyakarta secara kualitatif.

Sementara itu dasar pendekatan Sherif terhadap sikap dan persuasi adalah gagasan bahwa penilaian rangsangan sosial, seperti komunikasi persuasif, dapat dipindahkan sehubungan dengan rangsangan penahan yang menonjol dengan cara yang mirip dengan perpindahan yang diamati untuk rangsangan fisik. Dengan sikap orang itu sendiri yang berfungsi sebagai jangkar, beberapa komunikasi akan dipindahkan ke pendapatnya sendiri (asimilasi), sedangkan yang lain akan dipindahkan darinya (kontras). Perubahan sikap, menurut teori, tergantung pada bagaimana posisi yang direkomendasikan dalam komunikasi diklasifikasikan oleh penerima: "cara seseorang menilai komunikasi dan merasakan posisinya relatif terhadap pendiriannya sendiri mempengaruhi reaksinya terhadapnya. Secara ringkas, Sherif menyampaikan bahwa ada hubungan antara peningkatan perbedaan dalam penerimaan horizontal (*acceptance*) dengan peningkatan perubahan sikap, sementara peningkatan perbedaan dalam penolakan horizontal (*rejection*) berhubungan dengan penurunan perubahan sikap.

Penerapan SJT ini untuk membantu memahami bagaimana tiga garis lintang relevan dengan isu-isu kontroversial yang berdampak pada kehidupan masyarakat,

dalam hal ini masyarakat Yogyakarta. Teori ini cukup berguna untuk melihat karena tiga alasan utama. Pertama, ini menjelaskan mengapa masyarakat Yogyakarta menjadi sangat gelisah dengan adanya sabda dan dawuh Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Kedua, ini menjelaskan mengapa sabda dan dawuh Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi menuai pro dan kontra. Ketiga, teori ini menawarkan rencana akal sehat yang baik untuk melihat dan mengetahui sikap masyarakat Yogyakarta terhadap adanya sabda dan dawuh Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Perubahan sikap adalah hasil dari evaluasi dan pengaruh yang terjadi pada individu. Pada akhir proses, individu mempersepsikan pesan, membandingkannya dengan posisi saat ini, dan tergantung pada titik acuan, rentang penerimaan, rentang penolakan, dan rentang ketidakterlibatan yang berkaitan dengan tingkat keterlibatan pribadi. Semakin tinggi keterlibatan individu terhadap isu tersebut, rentang penolakan akan semakin luas, sementara rentang ketidakterlibatan akan semakin sempit, sehingga perubahan sikap diharapkan menjadi lebih sedikit. Dalam penelitian ini, Skala sikap (SJT) digunakan untuk secara kuantitatif mengukur sikap masyarakat Yogyakarta terkait dengan sabda dan dawuh Sri Sultan HBX mengenai Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Power atau kekuasaan dalam komunikasi merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku, sikap, atau keputusan orang lain melalui komunikasi. Dalam *Social Judgment Theory*, penilaian sosial individu terhadap kekuasaan dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap pesan komunikasi. Penilaian sosial ini dapat berkontribusi pada penerimaan atau penolakan kekuasaan yang diwakili dalam pesan tersebut.

Authority atau otoritas dalam komunikasi berkaitan dengan pengakuan dan penerimaan kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam *Social Judgment Theory*, penilaian sosial juga memainkan peran penting dalam menerima atau menolak otoritas yang diwakili oleh komunikator. Individu akan membandingkan posisi mereka sendiri dengan otoritas yang diutarakan dalam pesan komunikasi.

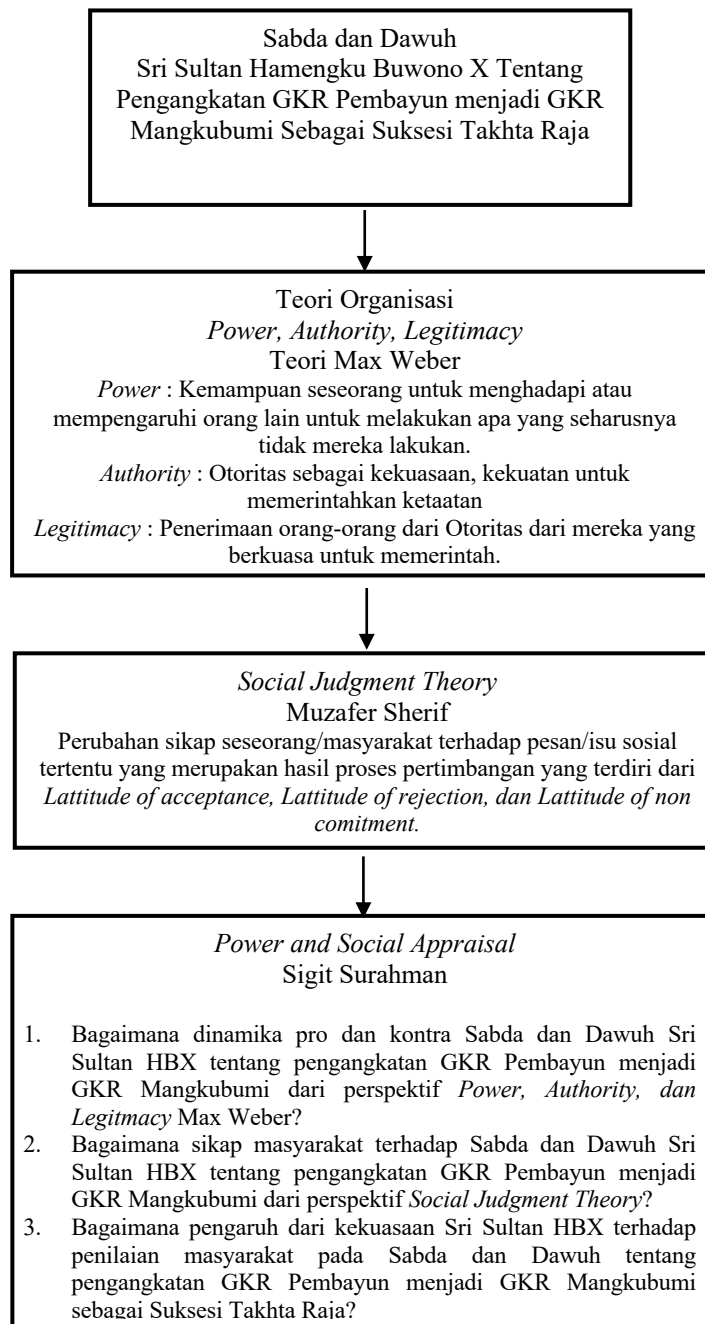
Legitimacy (Legitimasi) dalam komunikasi merujuk pada dasar-dasar yang melegitimasi kekuasaan, otoritas, atau pesan komunikasi tersebut. Hal ini dapat berhubungan dengan norma sosial, hukum, tradisi, atau prinsip-prinsip lain yang diakui secara luas. Dalam *Social Judgment Theory*, penilaian sosial individu juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap legitimasi kekuasaan, otoritas, dan pesan komunikasi. Jika pesan komunikasi dianggap sesuai dengan norma-norma sosial atau prinsip-prinsip yang diterima secara luas, maka legitimasi pesan tersebut akan lebih tinggi.

Dalam konteks sabda dan dawuh Sri Sultan HBX ini, keterkaitan *Social Judgment Theory* dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penilaian sosial individu mempengaruhi persepsi mereka terhadap *Power*, *Authority*, dan *Legitimacy* dalam komunikasi. Konsep-konsep *Power*, *Authority*, dan *Legitimacy* mempengaruhi penilaian sosial individu, sementara penilaian sosial juga memengaruhi persepsi individu terhadap *Power*, *Authority*, dan *Legitimacy* dalam pesan komunikasi yang diterima. Dengan memahami keterkaitan ini, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana interaksi antara kekuasaan, otoritas, legitimasi, dan penilaian sosial dalam konteks komunikasi mempengaruhi pemahaman dan penerimaan pesan komunikasi.

Jika menggabungkan *Power*, *Authority*, dan *Legitimacy* Max Weber dengan *Social Judgment Theory* Muzafer Sherif dalam perspektif komunikasi, bisa

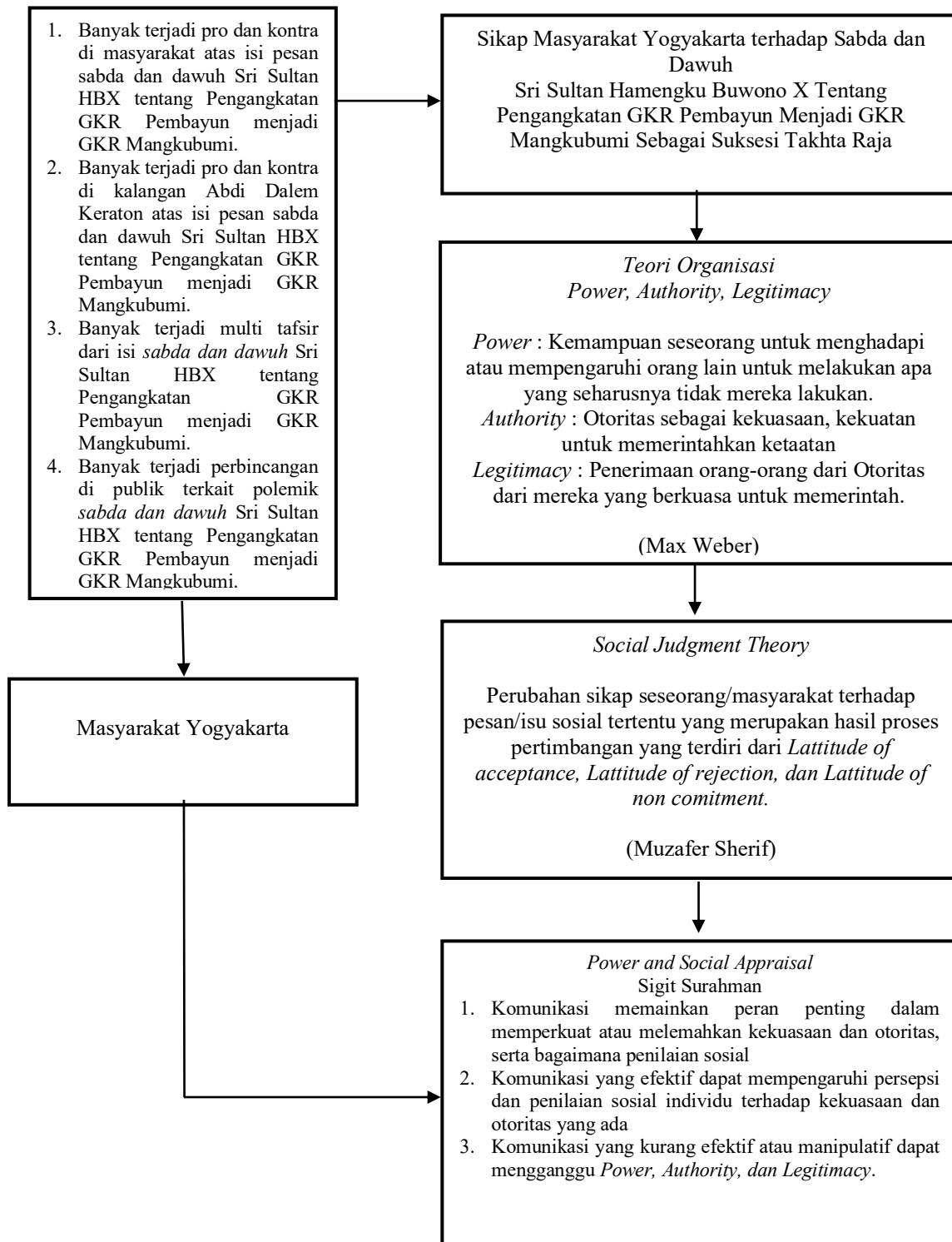
menghasilkan konsep baru yang berfokus pada dinamika komunikasi dalam konteks kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Peneliti dapat menyebut konsep baru ini sebagai “*Power and Social Appraisal*” (Kekuasaan dan Penilaian Sosial). Dalam konsep ini, menganalisis bagaimana *Power, Authority, dan Legitimacy* mempengaruhi proses komunikasi dan bagaimana penilaian sosial dalam komunikasi mempengaruhi persepsi dan penerimaan *Power, Authority, dan Legitimacy* tersebut. Konsep ini dapat menjelaskan bagaimana komunikasi memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan kekuasaan dan otoritas, serta bagaimana penilaian sosial individu dan kelompok mempengaruhi legitimasi kekuasaan dan otoritas tersebut. Konsep ini juga dapat membahas bagaimana komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian sosial individu terhadap kekuasaan dan otoritas yang ada, serta bagaimana komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap kekuasaan dan otoritas tersebut. Konsep ini juga dapat membahas bagaimana komunikasi yang kurang efektif atau manipulatif dapat mengganggu *Power, Authority, dan Legitimacy*. Penyalahgunaan komunikasi atau manipulasi informasi dapat menyebabkan keraguan, ketidakpercayaan, atau penolakan terhadap kekuasaan dan otoritas yang ada.

Tabel 2.4. Bagan Diskusi Antar Teori



Sumber: Diolah oleh Peneliti dari (Weber 1964, Miller, 2005; Littlejohn, 2011; Chau, 2014; Griffin, 2015)

2.5 Kerangka Pemikiran



2.6. Hipotesis

Logika *Power and Social Appraisal* digunakan untuk mengukur sikap masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX. Evaluasi posisi pesan, dalam hal ini kepercayaan norma yang sebenarnya, kisaran penerimaan, penolakan, atau netral sangat penting pada tahap penelitian formatif. Sehingga muncul hipotesis, diduga *Power, Authority, dan Legitimacy* berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi deskriptif yang sangat relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini merupakan gabungan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif, dengan fokus pada analisis deskriptif terkait sabda dan dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai proses suksesi takhta. Pandangan utama metode penelitian campuran tidak hanya merupakan teknik baru yang menarik dan menjanjikan, tetapi juga menimbulkan beberapa pertanyaan tentang statusnya sebagai paradigma penelitian. Campuran metode kualitatif dan kuantitatif memerlukan pendekatan baru yang harus dipahami sebagai paradigma penelitian baru. Kebaruan metode penelitian campuran ini adalah kemungkinan untuk menggabungkan paradigma yang berbeda dalam studi yang sama.

Meskipun perbedaan ini membantu memperjelas beberapa klaim tentang penggunaan paradigma dalam metode penelitian campuran, itu tidak menyelesaikan konflik antara gagasan bahwa metode penelitian campuran memerlukan paradigma baru dan posisi yang menurutnya metode penelitian campuran dapat menggabungkan paradigma. Di satu sisi, bahkan ketika konsep paradigma digunakan dalam satu cara, para peneliti cenderung membahas kedua klaim tersebut (Creswell, 2016; Ghiara, 2020).

Meskipun penelitian ini menggunakan metode campuran, akan tetapi yang dijadikan sebagai metode utama adalah metode kualitatif. Sedangkan metode kuantitatif digunakan sebagai metode pendukung, karena ada data yang tidak bisa didapatkan dengan cara wawancara saja. Pada penelitian ini perlu melakukan survey

kepada masyarakat Yogyakarta, sehingga diperlukan metode kuantitatif sebagai pendukung dalam penelitian ini.

3.2. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan landasan filosofis yang dijadikan sebagai panduan kegiatan penelitian. Paradigma ini juga dipahami sebagai bentuk sistem keyakinan dasar asumsi-asumsi ontologis (*being*), epistemologis (*knowing*), aksiologis (*value*) dan metodologis. Kemudian dari asumsi-asumsi tersebut akan mengarahkan untuk penentuan penelitian komunikasi baik objektif maupun subjektif.

Paradigma juga dapat diartikan sebagai corak pemikiran yang mengarahkan teori-teori tertentu. Corak pemikiran ini mencerminkan cara pandang dan kerangka berfikir yang umum dianut oleh komunitas ilmuwan. Paradigma menyajikan perspektif umum mengenai komunikasi manusia (Klien & White, 1996) dalam West dan Turner (2007).

Paradigma dalam ilmu pengetahuan didasarkan pada metafisika atau sistem pemikiran dan keyakinan utama mengenai ontologi, epistemologi, dan metodologi/aksiologi. Paradigma, dalam filsafat, mencakup pandangan-pandangan awal yang membedakan, menjelaskan, dan mengasah orientasi berfikir individu. Artinya, paradigma memiliki konsekuensi praktis terhadap cara berfikir, interpretasi, dan kebijakan dalam memahami fenomena. Paradigma adalah kerangka interpretatif yang dipandu oleh serangkaian keyakinan dan persepsi tentang dunia yang dipelajari (Chalmers, 1982; Patton, 1990; Guba, 1990; Salim 2006; Liliweri, 2018).

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma post-positivis untuk menjelaskan makna dari suatu tindakan. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti secara aktif dan kreatif, di mana interpretasi menyadari bahwa makna dapat lebih dari apa yang telah dijelaskan oleh pelaku. Paradigma post-positivis pada

penelitian ini bersifat interpretatif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan saling berhubungan antara fenomena yang berinteraksi (*reciprocal*). Jika metode objektif dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk menciptakan standarisasi observasi, maka metode subjektif (penelitian kualitatif) berusaha menciptakan interpretasi (Miller, 2005; Ronda, 2018). Crotty (1998) berpendapat bahwa pernyataan yang jelas peneliti tentang pandangan dunianya tentang pengetahuan adalah kunci untuk membentuknya penelitian seperti itu tercermin setiap aspek penelitian dari pertanyaan penelitian hingga kesimpulan. Desain penelitian beroperasi di bawah asumsi ontologis dan epistemologis peneliti, bahwa realitas dapat dipahami, tetapi hanya dalam bentuk skema mental yang terus berubah secara sosial dan pengalaman, lokal dan secara khusus; konstruksi ini tidak mutlak tetapi relatif, informatif, dan dapat diubah (Guba & Lincoln, 1994).

Realitas adalah bagaimana kita menciptakan cerita tentang pengalaman kita dan menafsirkan itu dan orang lain dalam hal masa lalu, sekarang, dan membayangkan fenomena duniawi (Sikes & Gale, 2006). Kita semua berkontribusi pada pengetahuan kita tentang manusia dengan menggunakan interpretasi. Aplikasi asumsi ontologis mengacu pada realitas pro dan kontra terkait sabda Sultan di masyarakat Yogyakarta. Secara epistemologis peneliti mencari pengetahuan dan pemahaman tentang konsep sabda Sri Sultan HBX, termasuk diantaranya *Power*, *Authority*, dan *Legitimacy* sabda dan dawuh Sri Sultan HBX Tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta. Baik melalui sumber pustaka, tradisi lisan (wawancara) dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya menentukan aksiologi penelitian ini yang mengacu pada nilai-nilai terkait sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tersebut.

3.4. Pendekatan Penelitian dan Metode Campuran (*Mixed Methods*)

Konsisten dengan paradigma penelitian ini dengan metode penelitian campuran, pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah cara yang paling tepat untuk mempelajari topik peneliti karena itu menyelidiki dunia sosial yang kompleks (Lichtman, 2012). Pendekatan deskriptif interpretif dengan metode campuran lebih cocok untuk studi sosial untuk mengukur banyak fenomena kompleks dalam masyarakat. Dengan pendekatan metode campuran peneliti dapat belajar “bagaimana individu mengalami dan berinteraksi dengan dunia sosialnya, makna yang dimilikinya bagi mereka (Merriam, 2002; Creswell, 2016; Ronda, 2018).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan metode campuran. Pendekatan metode campuran adalah suatu metode dalam pengumpulan data, analisis, dan penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Metode penelitian campuran didasarkan pada penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Klaim ini telah dibenarkan dengan mengamati bahwa, meskipun dalam beberapa kasus studi metode penelitian campuran hanya mencampur metode (seperti wawancara dan kuesioner) atau metodologi (seperti dalam kasus studi metode penelitian campuran berdasarkan campuran karya etnografi dan penelitian survei), ada situasi yang lebih kompleks di mana studi metode penelitian campuran dicirikan oleh campuran asumsi ontologis atau epistemologis yang berbeda dan tidak selalu eksplisit (Creswell & Plano Clark: 2016; Ghiara, 2020).

Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif memungkinkan untuk mencapai dua tujuan yang berbeda: di satu sisi mengembangkan narasi kausal dari interaksi kompleks faktor pribadi, sejarah, dan politik yang telah menghasilkan

fenomena spesifik yang diteliti; di sisi lain memberikan penjelasan kausal dari fenomena umum di mana represi dan persepsi dapat mendorong mobilisasi.

Pada penelitian ini secara kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada beberapa nara sumber yang dinilai kompeten dan memiliki pengetahuan cukup tentang sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Sedangkan secara kuantitatif, dalam pencarian data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sebagian masyarakat Yogyakarta yang dilakukan secara acak yang dianggap kredibel dan mewakili unsur masyarakat Yogyakarta.

Tabel 3.1. Rancangan metode campuran *Embedded*



Sumber : (Creswell, 2016)

3.5. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; observasi, wawancara mendalam semi terstruktur, pengumpulan dokumen-dokumen kualitatif, materi audio dan visual kualitatif, *Focus Group Discussion* (FGD), dan juga argumen-argumen yang menyangkut dengan kekuatan dan kelemahan penelitian. Selain itu secara kuantitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Melihat pengumpulan data sebagai interaksi negosiasi kolaboratif (Schulz, Schroeder, & Brody, 1997) dan konstruksi (Josselson, 2011; Nigar 2020).

Peneliti dengan menggunakan metode pengumpulan tersebut, memungkinkan peneliti untuk mencari tahu bagaimana pemaknaan nara sumber di mana pengalaman mereka mewakili bentuk naratif yang akan memberikan data melalui wawancara. Selain itu dengan melalui kuesioner, peneliti akan mengetahui

bagaimana sikap masyarakat Yogyakarta terkait Sabda Dan Dawuh Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR Mangkubumi Sebagai Suksesi Takhta Raja.

3.5.1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai data awal yang belum diproses.

Pengumpulan data primer dalam konteks penelitian ini dilakukan melalui:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan untuk memahami sikap, dan interpretasi masyarakat pada wacana Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. FGD ini dilakukan dengan melibatkan beberapa nara sumber yang dianggap mewakili masyarakat Yogyakarta, diantaranya: Wartawan, Budayawan, Mahasiswa, Akademisi, Abdi Dalem, dan Masyarakat awam. FDG yang direncanakan akan mengangkat isu yang terkait dengan penelitian.
2. Wawancara dengan informan yang dilakukan melalui teknik *snowball sampling*.

Teknik pengumpulan data ini banyak ditemui dalam metode penelitian campuran. Sesuai dengan penamaannya *snowball sampling*, maka teknik penentuan informan atau sampel yan awalnya hanya satu informan kunci, kemudian dari informan kunci dikembangkan berdasarkan rekomendasi yang dianggap kredibel untuk informan berikutnya. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rekomendasi, di mana individu yang menjadi sampel awal diminta untuk merekomendasikan orang lain yang dapat menjadi sampel atau informan selanjutnya (Kriyantono, 2012).

Pada proses pencarian nara sumber dengan *snowball sampling* dengan ketentuan atau kriteria yang dianggap memenuhi syarat dan kredibel untuk dijadikan informan. Berikut kriteria *key informan*:

1. Memahami dan mengikuti informasi atau berita terkait Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mengkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja.
2. *Key informan* berada pada posisi yang netral dan tidak memihak manapun atau netral dalam melihat isu yang ada.
3. Profesional di bidangnya.

Berdasarkan kriteria *key informan* yang sudah ditentukan tersebut muncullah nama Wempi Gunarto., M.I.Kom (wartawan senior di Jogja TV), yang dijadikan sebagai *key informan*, Wempi dijadikan sebagai *key informan* karena merupakan seorang profesional, wartawan senior, memahami dan mengikuti peristiwa tersebut. Kemudian dari beliau muncul tiga nama yang dalam posisi Pro, Kontra, dan Netral dalam melihat polemik Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX. Nama-nama tersebut oleh *key informan* dinyatakan *kredibel* diantaranya; 1) Drs. Achmad Charris Zubair., MA seorang budayawan di Yogyakarta dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang melihat polemik tersebut secara netral; 2) KH. Abdul Muhaimin seorang tokoh masyarakat dan pengasuh pondok pesantren Nurul Hikmah yang melihat polemik tersebut secara kontra/tidak setuju; 3) Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., MH sebagai Dekan FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, Aktivis Perempuan, dan Dewan Pembina Sekretariat Anak Merdeka Indonesia yang melihat polemik tersebut dari sisi pro (setuju).

Berdasarkan perkembangan pencarian informan kemudian dari KH. Abdul Muhaimin ini muncul nama Nardi, M.Pd sebagai abdi dalem yang berperan menjadi

guru tari di Keraton dan Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo yang merupakan adik kandung Sri Sultan HBX. Kedua informan ini sama-sama tidak setuju dengan Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX. Senada dengan KH. Abdul Muhaimin nama yang sama muncul dari Drs. Achmad Charris Zubair., MA, yaitu GBPH Prabukusumo. Selain itu muncul nama Theresia Suharti, S.ST., M.S yang tidak lain merupakan kerabat Sri Sultan HBX yang dalam hal ini melihat polemik Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX secara netral.

Dalam proses pengumpulan data, subjektivitas pasti akan hadir. Dalam penelitian ini, terdapat pemikiran dan tulisan adalah tidak pernah bebas nilai melainkan terletak di dalamnya. Pengumpulan data wawancara akan dipengaruhi oleh pemikiran dan perspektif peneliti serta peran peneliti sebagai partisipan. Berikut data informan penelitian ini:

NO	NAMA	PROFESI
1	Wempi Gunarto., M.I.Kom	Wartawan Senior Jogja TV, Akademisi Komunikasi
2	Drs. Achmad Charris Zubair., MA	Budayawan
3	KH. Abdul Muhaimin	Tokoh Masyarakat dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah
4	Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH., MH	Dekan FH Univ. Atmajaya Yogyakarta, Aktivist Perempuan, dan Dewan Pembina Sekretariat Anak Merdeka Indonesia
5	Nardi., M.Pd	Abdi Dalem
6	GBPH Prabukusumo	Adik Sri Sultan HBX
7	Theresia Suharti, S.ST., M.S	Kerabat Sri Sultan HBX

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah pernah ada, sudah pernah dilakukan, sudah dipublikasikan, atau sudah diuji sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui:

1. Observasi yang dilakukan selama pra penelitian oleh peneliti secara langsung sejak 2019 hingga 2021. Adapun yang peneliti selama observasi melakukan pengamatan di ruang-ruang publik seperti caffe, angkringan, dan juga beberapa perbincangan-perbincangan terkait sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta Raja di masyarakat Yogyakarta.
2. Penyebaran kuesioner kepada sebagian masyarakat Yogyakarta untuk mengetahui sikap masyarakat.
3. Dokumentasi dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen masa lampau, seperti kumpulan-kumpulan berita yang berkaitan baik media cetak maupun elektronik dan artikel-artikel yang berkaitan sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta Raja.

3.6. Objek Penelitian

Kota Yogyakarta memiliki kedudukan sebagai ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang memiliki status Kota, berbeda dengan empat daerah tingkat II lainnya yang merupakan Kabupaten. Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Provinsi DIY dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah timur, Kabupaten Bantul di sebelah selatan, serta Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah barat.

Luas wilayah Kota Yogyakarta lebih kecil dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu sekitar 32,5 km² atau sekitar 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY. Wilayah ini terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan

2.531 RT, dengan jumlah penduduk sekitar 489.000 jiwa dan kepadatan rata-rata sekitar 15.000 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada akhir tahun 1999, jumlah penduduk Kota Yogyakarta mencapai 490.433 jiwa, dan hingga akhir Juni 2000, penduduk Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sekitar 15.197 jiwa per km². Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin adalah sekitar 72,25 tahun untuk laki-laki dan 76,31 tahun untuk perempuan.

Kota Yogyakarta saat ini mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan era tahun 90-an. Kota ini berkembang seiring dengan tuntutan zaman, mirip dengan peradaban dunia yang mengalami transformasi. Ikon Kota Yogyakarta, yaitu "Tugu Yogya dan Malioboro," sekarang hampir tertutup oleh bangunan hotel dan apartemen yang menjulang tinggi di sekitarnya. Banyak pusat perbelanjaan, kafe, dan tempat-tempat nongkrong baru yang muncul menjadi pusat komersial di berbagai bagian Kota Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang cepat tidak dapat dihindari, dan tentunya memiliki dampaknya. Terutama dalam sektor pariwisata, banyak investor yang tertarik untuk menginvestasikan modal mereka. Namun, dampak positif dari pembangunan tersebut tidak selalu dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Pembangunan tersebut dapat menjawab tantangan zaman tanpa menghilangkan akar tradisi yang telah ada.

3.7. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pemilihan dan memperoleh data sebagai sasaran (Arikunto, 2016). Subjek atau fokus dalam penelitian ini adalah *power*, *authority*, serta

legitimacy sabda dan dawuh Sri Sultan HBX dan sikap masyarakat Yogyakarta. Hal tersebut layak dan menarik untuk diteliti karena setelah diumumkan sabda dan dawuh Sri Sultan HBX secara luas, menimbulkan banyak persepsi dan banyak tafsir di ruang publik (masyarakat Yogyakarta).

3.8. Populasi dan Sampel

Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Struktur masyarakat di Yogyakarta memiliki ciri khas tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi Jawa, karena wilayah ini merupakan pusat kebudayaan Jawa yang kaya. Beberapa elemen yang membentuk struktur masyarakat Yogyakarta antara lain: Pertama, Yogyakarta memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana wilayah ini masih dipimpin oleh seorang Sultan yang memiliki peran penting dalam struktur masyarakat. Sultan Yogyakarta dianggap sebagai simbol kesatuan dan identitas masyarakat Yogyakarta. Kedua, meskipun tidak seketat di masa lampau, konsep kasta masih mempengaruhi struktur masyarakat Yogyakarta. Terdapat tiga kasta utama di masyarakat Yogyakarta, yaitu bangsawan (ningrat, keluarga keraton), priyayi (golongan menengah, terpelajar), dan wong cilik (abdi dalem, rakyat biasa) (Widyatmaka, 2016).

Struktur masyarakat Yogyakarta mencerminkan nilai-nilai tradisional, kepemimpinan yang kuat, dan kebanggaan terhadap warisan budaya Jawa. Meskipun mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, nilai-nilai dan tradisi tersebut tetap dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Yogyakarta (Suharyanto, 2012).

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data

penelitian (Bungin, 2011). Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terdiri dari 6 (enam) Kota Kabupaten di DIY antara lain: Kotamadya Yogyakarta, Kota Gede, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, dan Kaputaten Gunung Kidul.

b. Sampel Area

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti, adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini karena memperhatikan luas wilayah dan area populasi. Penulis menggunakan teknik area sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi yang pengambilannya dilakukan secara acak berdasarkan area. Sampel diambil berdasarkan teknik sampel area di mana peneliti memberikan ruang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang dilakukan secara acak berdasarkan area tanpa memperhatikan strata tetapi berdasarkan area yang ada dalam populasi itu sendiri (Bungin, 2019).

Pada penelitian ini peneliti mempersempit populasi yaitu jumlah warga 489.000 orang dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin (Sujarweni & Endrayanto, 2012). Adapun peneliti menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

N = Ukuran jumlah sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir : e = 0,1

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut : nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. Berdasarkan jumlah populasi yang cukup besar maka presisi yang ditetapkan dalam penelitian ini besar jumlah sebanyak 489.000 orang. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang diperoleh penelitian ini dengan nilai presisi yang ditetapkan sebesar 10% adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \\ &= \frac{489.000}{1 + 489.000 \left(\frac{10}{100}\right)^2} \\ &= \frac{489.000}{1 + 489.000 \cdot 0,01} \\ &= \frac{489.000}{4891} \\ &= 99,97 \\ &= \text{dibulatkan } 100 \end{aligned}$$

Dari 100 kemudian dibagi lagi menjadi enam (6) Kota Kabupaten di DIY. Kotamadya Yogyakarta yang merupakan terdekat (ring 1) wilayah Kesultanan Yogyakarta diambil sampel sebanyak 25 responden, kemudian masing-masing wilayah diluar Kotamandya Yogyakarta adalah ring 2. Pada akhirnya ditemukan sampel dari Kota Gede, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulonprogo sebanyak 15 responden.

3.9. Penelitian Formatif Menggunakan *Social Judgment Theory*

Skala alternatif yang dibuat untuk menilai garis lintang penerimaan, penolakan, dan non-komitmen berkaitan dengan sabda dan dawuh Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun Menjadi GKR Mangkubumi. SJT berevolusi dari psikologi Fungsionalis Probabilistik Egon Brunswik digabungkan dengan korelasi berganda dan analisis statistik berbasis regresi. Melalui perangkat representasinya, SJT telah menjadi perspektif berorientasi sistem yang digunakan secara luas untuk menganalisis penilaian manusia dalam keadaan ekologis tertentu. Penilaian diasumsikan sebagai hasil dari integrasi isyarat yang berbeda atau sumber informasi perseptual dari lingkungan. Keuntungan khusus bertambah pada pendekatan SJT ketika nilai kriteria atau nilai yang benar untuk penilaian juga tersedia, karena ini memungkinkan perbandingan proses penilaian dengan proses lingkungan dan mengarah secara alami pada generasi umpan balik kognitif (Cooksey, 2010).

Berbeda dengan pendekatan analisis keputusan yang lebih preskriptif, pendekatan SJT menganalisis penilaian dengan menguraikan proses penilaian setelah penilaian diberikan. Dekomposisi posteriori ini dilakukan dengan pertama-tama menggunakan analisis regresi untuk memulihkan persamaan prediksi untuk penilaian dan sistem ekologi dan kemudian menggunakan persamaan model lensa untuk membandingkan sistem tersebut. Metode SJT menjaga kontak dekat dengan keadaan ekologis dengan menggunakan prinsip desain representatif (yang berfokus pada bagaimana peneliti memperoleh rangsangan untuk penilaian) dan menghindari generalisasi berlebihan yang tidak beralasan dari agregasi nomotetik melalui penggunaan idiografis—statistik analisis.

Melalui *Social Judgment Theory* ini peneliti melakukan identifikasi pesan dalam sabda dan dawuh Sultan: kemudian melakukan analisis isi dan konten dari

sabda dan dawuh Sultan secara rinci. Identifikasi argumen, pernyataan, nilai-nilai, atau pesan-pesan utama yang terkandung dalam sabda tersebut.

Menentukan audiens yang menerima dan menanggapi sabda dan dawuh Sultan. Audiens ini dapat mencakup berbagai kelompok seperti masyarakat umum, anggota keluarga kerajaan, intelektual, atau pengamat politik. Berikutnya melakukan survei atau wawancara untuk mengumpulkan data tentang bagaimana audiens menanggapi sabda dan dawuh Sultan. memberikan kepada responden salinan sabda dan dawuh Sultan atau kutipan yang relevan dan minta mereka mengevaluasi dan menilai pesan tersebut.

Selanjutnya menggunakan skala penilaian: skala penilaian yang sesuai untuk mengukur tingkat penerimaan, penolakan, atau netralitas audiens terhadap pesan dalam sabda dan dawuh Sultan. Skala penilaian tersebut mencakup dimensi-dimensi seperti persetujuan, penolakan, ketertarikan, atau kepercayaan. Setelah itu melakukan analisis data yang telah dikumpulkan dengan membuat visualisasi dari persepsi, sikap masyarakat terhadap pesan dalam sabda dan dawuh Sultan. Identifikasi pola-pola umum, perbedaan-perbedaan, atau kelompok-kelompok yang muncul dalam penilaian mereka. Terakhir menginterpretasikan hasil analisis data dan perhatikan sejauh mana pandangan, sikap masyarakat berbeda-beda terhadap pesan dalam sabda dan dawuh Sultan.

3.10. Analisis Data

3.10.1 Analisis Data Kualitatif

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga langkah. Langkah pertama adalah reduksi data, di mana peneliti memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh di lapangan. Dalam langkah ini, peneliti melakukan seleksi data dari hasil observasi, FGD, dan wawancara dengan informan.

Langkah kedua adalah penyajian data, di mana peneliti mendeskripsikan kumpulan informasi tentang sabda dan dawuh Sri Sultan HBX yang terkumpul. Data-data ini disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Peneliti menyederhanakan data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan proses pencarian makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan sejak awal pengumpulan data. Peneliti mencatat data secara teratur, melihat hubungan kausalitas dan proposisi, serta mengelompokkan dan menyusun data dengan rapi selama proses penelitian. Dalam hal ini, penelitian mengikuti pendekatan yang dijelaskan oleh Salim (2006) mengenai langkah-langkah analisis data.

3.10.2 Analisis Data Kuantitatif

Tipe analisis dalam penelitian terkait erat dengan jenis data yang dikumpulkan. Data dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Data kuantitatif berkaitan dengan angka, jumlah, atau kuantitas, sedangkan data kualitatif berkaitan dengan kata-kata atau gambar. Oleh karena itu, data kualitatif biasanya memiliki skala nominal, sementara data kuantitatif memiliki skala ordinal, interval, atau rasio. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dalam bentuk skala ordinal, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif.

Dalam analisis data pada penelitian ini, digunakan metode analisis statistik. Analisis statistik adalah cara untuk mengolah informasi yang berhubungan dengan data kuantitatif, seperti angka-angka, dengan tujuan mencari, mengumpulkan, dan memproses data sehingga dapat disajikan secara sederhana dan mudah dibaca, serta dapat diinterpretasikan.

3.11. Integrasi Data

Setelah proses analisis data kualitatif dan kuantitatif selesai, kemudian peneliti melakukan integrasi data. Integrasi data ini dilakukan dengan membandingkan data temuan untuk memperkaya interpretasi data kuantitatif dengan penjelasan kualitatif, sehingga mendapatkan hasil kerangka teoritis yang terintegrasi.

3.12. Interpretasi Data

Langkah berikutnya setelah integrasi data adalah melakukan interpretasi data. Pada tahapan ini peneliti melakukan interpretasi data-data kualitatif dan kuantitatif dengan melibatkan pemahaman dan penafsiran hasil analisis data keseluruhan untuk menggabungkan data menjadi gambaran yang komprehensif.

3.13. Penyajian Data

Penyajian hasil penelitian ini dilakukan dalam bentuk narasi, tabel dari hasil pengolahan data statistik sederhana yang bersifat deskriptif atau bisa gabungan dari keduanya.

3.14. Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif, tidak diperlukan keharmonisan yang tetap antara konsep abstrak yang telah didefinisikan dan ukuran yang telah dikalibrasi dengan cermat untuk penampakan empirisnya. Ada beberapa fitur penting dalam proses pengukuran yang berkontribusi terhadap validitas data.

Pertama, validitas data dapat dianggap terpenuhi jika klaim kebenaran peneliti dapat diterima dan cukup masuk akal secara intersubjektif. Masuk akal berarti bahwa data dan pernyataan yang terkait tidak bersifat eksklusif, bukan satu-satunya klaim yang ada, dan bukan satu-satunya penjelasan yang tepat dalam konteks penelitian ini, yaitu sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun

menjadi GKR Mangkubumi. Data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi referensi, arsip, dokumen, wawancara, dan kuesioner yang relevan dengan topik penelitian.

Kedua, validitas data empiris peneliti terbentuk ketika didukung oleh beragam potongan data empiris. Meskipun mungkin ada rincian empiris tertentu yang tampak biasa atau sepele, validitas data muncul dari akumulasi ratusan rincian kecil dan beragam yang secara kolektif membentuk bukti yang signifikan. Dalam konteks penelitian mengenai sabda dan dawuh Sultan, setiap data yang dikumpulkan yang terkait dengan pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian dan membantu menjawab pertanyaan penelitian.

Ketiga, validitas data meningkat ketika peneliti terus-menerus menyelidiki berbagai data yang beragam dan mempertimbangkan hubungan di antara mereka. Data dalam konteks sosial dan alamiah tidak selalu terorganisir dengan rapi dalam konsep ilmiah yang sistematis, melainkan merupakan elemen yang berbeda yang membentuk kesatuan yang dinamis dan kohesif. Dalam penelitian tentang sabda dan dawuh Sultan, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, arsip sejarah, catatan pribadi, penelitian sebelumnya, wawancara, dan kuesioner dengan pihak yang terkait guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dan valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Fokus penelitian ini adalah *power*, *authority*, *legitimacy* dan penilaian sosial pada sabda dan dawuh Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta Raja. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti melalui, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada nara sumber dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesultanan Yogyakarta memiliki status konstitusional sebagai lembaga adat dan budaya di Indonesia. Status ini diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka ini menguatkan Kesultanan Yogyakarta memiliki peran dan tanggung jawab tertentu yang terkait dengan pelestarian budaya dan warisan sejarah Jawa. Kekuasaan politik langsung Kesultanan Yogyakarta telah berkurang dalam sistem politik resmi Indonesia. Sebagai lembaga adat, Kesultanan Yogyakarta memiliki kewenangan yang terbatas dalam upacara adat, kegiatan budaya, tradisi, kearifan lokal dan acara kenegaraan di wilayah Yogyakarta.

Meskipun kekuasaan politik langsungnya telah berkurang, Kesultanan Yogyakarta memainkan peran simbolis yang penting dalam masyarakat. Keraton Yogyakarta merupakan pusat kegiatan Kesultanan Yogyakarta. Terdapat struktur hierarki di dalam keraton yang membagi peran dan tanggung jawab dalam tatanan kesultanan. Sultan Yogyakarta sebagai kepala Kesultanan memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan Sultan Yogyakarta saat ini lebih bersifat simbolis. Sultan memiliki peran penting dalam upacara adat, ritual keagamaan, dan acara kenegaraan. Kehadiran Sultan dan keluarga kerajaan memberikan legitimasi dan

kekuatan simbolis bagi kesultanan. Sultan Yogyakarta masih dihormati sebagai simbol identitas dan warisan budaya Jawa. Sultan juga memiliki peran dalam menjaga dan memelihara tradisi serta kesinambungan budaya di wilayah Yogyakarta.

Kesultanan Yogyakarta menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia melalui berbagai mekanisme. Sultan Yogyakarta memiliki hak-hak tertentu, seperti kebebasan berbicara dan memberikan nasihat kepada pemerintah. Sultan juga dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan pengembangan wilayah Yogyakarta. Selain menjaga tradisi dan budaya, Kesultanan Yogyakarta juga terlibat dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Yogyakarta. Sultan Yogyakarta dan keluarga kerajaan berperan dalam inisiatif pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan di wilayah Yogyakarta.

Kesultanan Yogyakarta mempertahankan otoritasnya sebagai institusi tradisional yang diakui secara resmi di Indonesia. Otoritas Sultan Yogyakarta ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Otoritas ini memberikan wewenang kepada Sultan untuk memimpin dan mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan Kesultanan Yogyakarta. Sultan Yogyakarta memegang otoritas yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan dalam sistem monarki. Otoritas Sultan meliputi wewenang dalam mengambil keputusan politik, administratif, dan budaya yang terkait dengan wilayah Kesultanan Yogyakarta secara legitimasi juga sah.

Legitimasi Sultan Yogyakarta bersumber dari sejarah panjang dan tradisi Kesultanan. Legitimasi ini diperkuat oleh pengakuan pemerintah Indonesia dan dukungan masyarakat Yogyakarta. Sultan Yogyakarta memainkan peran penting dalam memelihara warisan budaya dan sejarah Kesultanan, serta menjadi penjaga dan

pelindung kearifan lokal. Masyarakat, baik di dalam maupun di luar Yogyakarta, mengakui dan menghormati kedudukan Sultan sebagai simbol identitas dan warisan budaya yang penting bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut yang kemudian Sultan Yogyakarta memiliki kekuasaan atau power untuk menentukan arah Kesultanan Yogyakarta.

Kekuasaan Sultan Yogyakarta meliputi berbagai aspek, baik simbolis maupun fungsional. Secara simbolis, Sultan memiliki peran sebagai pemimpin spiritual dan simbol keberlanjutan warisan budaya. Secara fungsional, Sultan memiliki kewenangan dalam pengangkatan pejabat-pejabat tertentu, seperti Gubernur Yogyakarta dan beberapa pejabat tingkat lokal. Kekuasaan Sultan Yogyakarta terkait dengan peran dan fungsi yang diemban dalam sistem politik resmi Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik langsung seperti pada masa lalu, Sultan Yogyakarta memiliki peran simbolis dan seremonial yang penting. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik langsung seperti pada masa lalu, Sultan Yogyakarta memiliki peran simbolis dan seremonial yang penting dalam upacara adat, acara kenegaraan, dan sebagai penjaga tradisi serta kesinambungan budaya Jawa. Selain itu, Sultan juga memainkan peran dalam menjaga harmoni dan kestabilan sosial di wilayah Kesultanan Yogyakarta, termasuk kekuasaan dan otoritasnya untuk mengeluarkan Sabda, Dawuh, ataupun Maklumat.

Gusti Raden Mas Dorijatun, seorang putra kesembilan dari Sri Sultan Hamengku Buwono VIII dan istri kelimanya, Raden Ajeng Kusttilah atau Kanjeng Ratu Alit, yang juga dikenal sebagai Sri Sultan Hamngku Buwono IX (HB IX) pada periode 1940-1988. Dalam catatan sejarah, Sri Sultan HB IX mengambil langkah berani dan tegas. Hanya dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beliau mengirimkan telegram ucapan selamat kepada para proklamator. Kemudian,

pada tanggal 5 September 1945, bersama dengan Paku Alam VIII, Sri Sultan HB IX mengeluarkan maklumat Sabda Pandita Ratu yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, Yogyakarta secara resmi memasuki era modernnya, tidak lagi sebagai entitas negara terpisah, melainkan menjadi bagian dari negara republik. Langkah ini sepenuhnya didukung oleh masyarakat Yogyakarta tanpa ada penolakan, yang kemudian dibuktikan dengan pengabdian mereka. Ketika negara yang baru merdeka dihadapkan pada tekanan dari pemerintah kolonial yang berusaha kembali, Sri Sultan HB IX mengundang para tokoh bangsa untuk bermukim di Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik yang baru terbentuk.

Sabda Pandita Ratu yang tidak ada penolakan dari rakyat Mataram/Kesultanan Yogyakarta itu yang disampaikan oleh Ngerso Dalem Kanjeng Sultan HB IX. Itu dikeluarkan pada saat setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat. Namanya Sabda Pandita Ratu itu tidak sembarangan dikeluarkan dan tidak sebarang orang bisa mengeluarkan. Hanya Raja yang bisa mengeluarkan Sabda Pandita Ratu. (Wawancara dengan Achmad Charis Zubair)

Dalam mendukung Republik, Sri Sultan HB IX juga menunjukkan peranannya melalui dukungan finansial. Selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta, semua kebutuhan pendanaan diambil dari kas keraton. Ini mencakup gaji Presiden/Wakil Presiden, staf, operasional TNI, serta biaya perjalanan dan akomodasi delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan HB IX tidak pernah mengingat atau menghitung jumlah yang telah dikeluarkan. Bagi beliau, ini merupakan bagian dari perjuangan yang harus dilakukan. Bahkan, Sri Sultan HB IX memberikan amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung atau meminta kembali harta keraton yang telah diberikan untuk kepentingan republik. Tindakan ini merupakan bukti dari sabda pandita ratu-nya (Sri Sultan HB IX), yang menunjukkan bahwa beliau siap berada di

belakang kepemimpinan Paduka Yang Mulia dengan dukungan dari seluruh rakyatnya (Keratonjogja.id).

Sabda dan dawuh dapat mengalami pergeseran dalam konteksnya. Perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi seiring waktu dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan sabda dan dawuh dari pemimpin atau tokoh spiritual dalam hal ini Sri Sultan. Terdapat masa yang berbeda antara Sri Sultan HB IX (1940-1988) dengan Sri Sultan HBX (1989-sekarang). Sabda dan dawuh yang diberikan oleh pemimpin masa lalu dapat diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman yang berbeda. Sabda dan dawuh yang relevan pada masa lalu tidak selalu memiliki kesesuaian langsung dengan tantangan dan perubahan zaman saat ini.

Sri Sultan Hamengku Buwono X lahir pada tanggal 2 April 1946 dengan nama kecil Bendara Raden Mas (BRM) Herjuno Darpito. Setelah dewasa, BRM Herjuno Darpito diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi. Setelah menjadi putra mahkota, beliau mendapatkan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Pada tanggal 7 Maret 1989, saat penobatannya sebagai Raja, beliau diberi gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngalaga Abdurahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat, dan selanjutnya dikenal sebagai Sri Sultan HBX. Sri Sultan HBX adalah putra sulung dari Sultan HB IX dan istri keduanya, RA Siti Kustina.

Sri Sultan HBX menikah dengan Tatiek Drajad Suprihastuti pada tahun 1968. Mereka memiliki lima anak perempuan, yaitu GRA Nurmalita (GKR Pembayun/GKR Mangkubumi), GRA Nurmagupita (GKR Condrokirono), GRA Nurkamnari Dewi

(GKR Maduretno), GRA Nurabra Juwita (GKR Hayu), dan GRA Nurastuti Wijareni (GKR Bendoro).

Sultan Hamengku Buwono X menghadapi masalah terkait penerusnya karena tidak memiliki putra, melainkan hanya memiliki putri-putri. Isu ini muncul saat pembahasan Raperda Istimewa tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Maka, pada tanggal 6 Maret 2015, Sultan Hamengku Buwono X secara tiba-tiba mengeluarkan Sabdatama pertama. Dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 18 ayat (1) huruf m menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah "menyerahkan daftar riwayat hidup yang mencantumkan riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung istri, dan anak", yang dianggap hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk menjadi kandidat Sultan selanjutnya.

Akhirnya, pada tanggal 30 April 2015, Sri Sultan HBX mengeluarkan Sabdaraja yang mengubah nama gelarnya menjadi Hamengkubawana. Kemudian, pada tanggal 5 Mei 2015, beliau mengangkat GKR Pembayun sebagai GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawana Langgeng ing Mataram berdasarkan Dhawuh Raja.

Diumumkannya sabda dan dawuh oleh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi memunculkan berbagai respon dari berbagai kalangan, keluarga, tokoh masyarakat, akademisi, dan juga masyarakat. Sabda dan dawuh tersebut menjadi polemik tersendiri di Yogyakarta. Baik secara tradisi simbolik, mitologi, bahkan teologi.

Dari tradisi simbolis ketika sultan itu duduk di Bangsal Manguntotakil, di kursi singgasana biru lengkap dengan busana juga biru lengkap meghadap utara. Itu depannya semua miniatur hewan laki-laki, ada merak, kijang, ada macam-macam, danitu laki-laki semua. Karena Sultan itu harus Cemani Jalujati, artinya Sultan harus laki-laki sejati. Dan itu omongan Sultan sendiri di depan mata saya, ketika saya mencoba cerita tentang Ngasro Dalem Sampeyan Dalem Ingkah Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin ing

Pranotogomo Khalifatullah Ingkang Jumeneng ing Tanah Jowo. Juga di masjid keraton, sebelah kanan mimbar itu namanya Mesuro dalam Bahasa arab Maksuro, itu tempat terbatas. Di majid demak juga ada, itu tempat duduknya khusus Sultan untuk Jumatan, Haning sesok nek wedok terus pripun? Nanti kalau idul fitri kan ada sungkeman, terus Rayi Dalem, Sentono Dalem kon Ngambung Dengkule Sultan Wedok. Jadi secara simbolik nggak ada satupun, yang menunjukkan sultan itu perempuan (Wawancara dengan KH Muhaimin).

Secara mitologi, ketika Sultan itu dinobatkan, dia akan memakai keris, simbol keturunan Sultan namanya Joko Piturun, opo sesok jadi Perawan Piturun? Dewi Piturun? Ya ini kan lucu, bukan masalah Gender. Terus Piandel Keraton itu Kyai Sengkelt dan Ki Ageng Gopek, opo sesok terus ganti Nyai Sengkelat karo Nyai Gopek. Terus Mamayu Hayuning Buwono itu ada tombak Namanya Ki, Kyai Pleret, terus sesok Nyai Pleret. Nggak ada mitologi yang mencintrakan bahwa sultan itu perempuan (Wawancara dengan KH Muhaimin).

Secara teologis Sultan itu punya gelar KHALIFATULLAH, dalam sejarah belum ada khalifah itu perempuan, sejak Khulafaurosidin yang ada 4, Muawiyah ada 9, Abu Abbasah, Ismailiah, Mogul, sampai Usmaniah 39 kali, semua laki-laki, kok tiba-tiba ini mau dikasih perempuan. Jadi ini bukan masalah Gender (Wawancara dengan KH Muhaimin).

Polemik dan kontroversi terkait sabda Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi telah menimbulkan perdebatan dan pandangan yang beragam di masyarakat. Pengumuman ini menjadi perhatian publik karena keputusan ini merupakan hal penting dalam konteks kepengurusan kerajaan. Polemik ini terus berkembang seiring dengan adanya perdebatan, opini publik, dan kemungkinan adanya langkah-langkah penyelesaian atau mediasi. Perkembangan selanjutnya tergantung pada faktor-faktor seperti dukungan masyarakat, respon pemerintah, keputusan lembaga terkait, dan dinamika politik dan sosial yang ada.

Polemik ini menjadi perhatian media nasional dan lokal, mengingat pentingnya peran kerajaan dalam konteks budaya dan politik di Yogyakarta. Kontroversi dan perdebatan berkembang dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di media, forum publik, dan jejaring sosial. Kontroversi ini dapat terkait dengan pertanyaan tentang

legitimasi Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi berdasarkan sabda dan dawuh Sultan Hal ini dapat mencakup pertimbangan apakah sabda dan dawuh Sultan memiliki kekuatan hukum yang sah, apakah ada prosedur tradisional yang harus diikuti, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan Sultan dalam masalah ini.

Yang dimasalahkan sebetulnya bukan hal-hal yang prinsip. Bukan Sultan harus jadi gubernur, tetapi berkaitan dengan sabda dan dawuh raja itu kan yang dimasalahkan itu karena pengangkatan puteri mahkota. Istilahnya saja Sultan, kalau dengan puteri mahkota kan berarti Sultanah. Terus kemudian pergantian nama dari Hamengku Buwono, menjadi Hamengkubawono. Padahal secara eksplisit UUK menyebut yang tersurat Hamengku Buwono yang bertakhta. Kalau Hamengkubawono kan batal demi hukum, nah hal-hal seperti itu yang dimasalahkan. Tetapi secara substantif Sultan jadi gubernur itu sudah jadi kesepakatan UU, tapi juga didukung oleh rakyat (Wawancara dengan Achmad Charis Zubair).

Setelah pengumuman tersebut, muncul beberapa kubu yang berbeda pendapat, yaitu kubu pro, kubu kontra, dan kubu netral. Kubu pro menyatakan dukungan dan legitimasi terhadap keputusan Raja, menganggapnya sebagai langkah yang tepat sesuai tradisi dan ketentuan yang berlaku. Kubu pro menganggapnya sebagai keputusan yang sah dan sesuai dengan tradisi. Mereka melihat keputusan ini sebagai pemeliharaan warisan budaya dan kontinuitas kekuasaan kerajaan. Pendukung Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi menganggapnya sebagai langkah yang relevan dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya dan kearifan lokal. Tradisi dan konservasi budaya menjadi salah satu alasan yang sering diutarakan oleh kubu pro adalah pemeliharaan tradisi dan konservasi budaya. Mereka berpendapat bahwa Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi merupakan bagian dari warisan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad di Yogyakarta. Menurut mereka, menjaga kontinuitas suksesi kerajaan dan mempertahankan tradisi keluarga kerajaan adalah cara untuk melestarikan identitas budaya dan nilai-nilai yang melekat

pada masyarakat Yogyakarta. Kubu pro percaya bahwa Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi adalah langkah yang penting dalam memelihara tradisi dan keberlanjutan sejarah kerajaan Yogyakarta. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan dan keberlanjutan tradisi kerajaan.

Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi juga dianggap penting dalam konteks simbolis dan legitimasi kekuasaan kerajaan dan Sri Sultan HBX. Kubu pro meyakini bahwa keberadaan puteri mahkota sebagai pewaris takhta memberikan stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan yang diperlukan bagi kekuasaan kerajaan. Mereka berpendapat bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap otoritas Raja dan tradisi kerajaan akan memperkuat legitimasi kerajaan di mata masyarakat. Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dipandang sebagai tanda kehormatan dan simbol kebanggaan bagi kerajaan Yogyakarta. Kubu pro menganggapnya sebagai upaya untuk memperkuat identitas budaya dan menghormati leluhur serta sistem monarki yang telah ada sejak dahulu kala. Mereka berpendapat bahwa Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi akan memperkaya nilai-nilai budaya dan melindungi warisan kerajaan.

Kubu pro juga berpendapat bahwa Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dapat menjaga stabilitas sosial dan politik di Yogyakarta. Mereka percaya bahwa kehadiran puteri mahkota sebagai penerus takhta akan meminimalisir potensi konflik suksesi atau kekosongan kekuasaan yang dapat mengganggu kedamaian dan harmoni di masyarakat. Dalam pandangan mereka, tradisi suksesi kerajaan yang terjaga dengan baik akan memberikan kepastian dan stabilitas dalam kepemimpinan lokal. Mereka meyakini bahwa kontinuitas kepemimpinan kerajaan melalui pewarisan puteri mahkota dapat meminimalisir ketidakpastian politik dan konflik yang mungkin timbul dalam pergantian kepemimpinan.

Selain itu kubu pro juga mengakui otoritas dan legitimasi Raja dalam mengambil keputusan terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka berpandangan bahwa sebagai pemimpin kerajaan, Raja memiliki hak prerogatif untuk menentukan pewaris takhta berdasarkan pertimbangan yang dianggapnya tepat. Mereka meyakini bahwa keputusan Raja adalah sah dan harus dihormati oleh masyarakat.

Alasan lain yang sering diungkapkan oleh kubu pro adalah kepentingan keluarga kerajaan. Mereka berpendapat bahwa Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan peran keluarga kerajaan dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan. Dukungan mereka terhadap sabda dan dawuh Raja dipengaruhi oleh pertimbangan loyalitas terhadap keluarga kerajaan dan kepentingan keluarga tersebut dalam mempertahankan kedudukan mereka.

Sementara itu, kubu kontra menentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dengan berbagai alasan, seperti ketidaksinkronan dengan adat dan prinsip kebangsawanan yang lebih tradisional. Beberapa alasan termasuk pertimbangan sejarah, keadilan gender, atau keraguan akan legitimasi keputusan tersebut. Kubu yang kontra merujuk pada sejarah dan tradisi yang telah ada sebelumnya dalam sistem pewarisan takhta di kerajaan tersebut. Mereka berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pewarisan takhta dapat melanggar integritas sejarah dan tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas kerajaan.

Ketidaksetujuan terhadap Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang muncul di beberapa individu atau kelompok masyarakat karena memiliki pendapat yang berbeda mengenai proses atau keputusan pengangkatannya. Mereka memiliki pandangan alternatif atau preferensi yang berbeda terkait suksesi atau

pewaris takhta. Pertimbangan politik atau hukum juga menjadi alasan kontra, beberapa orang atau kelompok memiliki pandangan bahwa Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi melanggar prinsip-prinsip demokrasi atau aturan hukum yang berlaku. Mereka menganggap pengangkatan tersebut tidak sesuai dengan tatanan politik atau konstitusional yang ada.

Selain itu perbedaan pandangan budaya atau agama menyebabkan munculnya kubu kontra terhadap sabda dan dawuh Sultan. Mereka memiliki keyakinan atau nilai-nilai budaya atau agama yang menyebabkan tidak sependapat dengan keputusan atau instruksi Sultan. Bagian dari alasan kontra terhadap sabda dan dawuh Sultan bisa berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau kinerja Sultan secara keseluruhan. Mereka meragukan kompetensi atau legitimasi Sultan dalam mengambil keputusan yang berpengaruh pada Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Kemudian adanya faktor politik atau persaingan di balik alasan kontra terhadap sabda dan dawuh Sultan karena adanya kepentingan atau agenda politik yang berbeda yang menyebabkan mereka menentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Mereka berpendapat bahwa ada pertimbangan lain yang seharusnya diambil dalam proses Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, dan keputusan tersebut dapat memicu perdebatan yang lebih luas tentang peran dan tugas kerajaan yang perlu dipertimbangkan ulang. Selain itu, ada pula kelompok yang berada dalam kubu netral yang tidak berpihak secara tegas pada salah satu sisi. Mereka mungkin berusaha mempertimbangkan argumen dari kedua kubu dan berharap ada penyelesaian yang menghormati nilai-nilai tradisi dan aspirasi masyarakat secara adil.

Beberapa kelompok dan individu memilih untuk tetap netral dan tidak berpihak dalam isu Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi karena mereka

tidak memiliki kepentingan khusus atau afiliasi yang berhubungan langsung dengan hal tersebut. Mereka merasa bahwa isu ini tidak secara langsung mempengaruhi kehidupan atau kepentingan mereka. Sikap netral juga dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi yang dimiliki individu atau kelompok tersebut. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang konteks, proses, atau implikasi dari Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi untuk membentuk pendapat yang kuat.

Kemudian ada juga yang merasa apatis atau tidak peduli terhadap isu Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka memiliki prioritas atau perhatian yang lebih besar terhadap masalah atau isu lain yang dianggap lebih relevan atau penting dalam kehidupan mereka. Terdapat pula yang memilih untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi berkembang sebelum mengambil sikap yang tegas. Mereka ingin melihat perkembangan lebih lanjut, mendengarkan argumen yang berbeda, atau mengamati reaksi dan tanggapan masyarakat sebelum membentuk pendapat yang lebih definitif.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Power Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi

Power (Kekuasaan) mengacu pada kemampuan seseorang atau suatu entitas untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan, tindakan, atau keadaan lainnya. Kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwana X (HBX) adalah sebagai penguasa atau kepala kerajaan Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan HBX merupakan pemimpin tertinggi dan memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan kebudayaan Jawa serta melindungi hak-hak adat dan kepentingan rakyat di wilayahnya. Sri Sultan HBX juga berperan sebagai simbol

persatuan dan identitas bagi masyarakat Yogyakarta. Hal ini selaras dengan pendapat Wempi Gunarto salah satu wartawan senior di Yogyakarta.

Sultan itu Wakil Tuhan, tapi ada juga yang mencoba dimodernkan, sekarang bukan lagi khalifatullah, tetapi ya sipil biasanya. Seperti gubernur, presiden pada umumnya. Jadi doktrin-doktrin mitos jaman dulu itu ya dianggap sudah lewat. Tapi ya aku melihat di keluarga Sultan itu berdiri di dua sisi, satu sisi dia mendukung modernitas, anak-anaknya bahkan Hayu mendorong digitalisasi keraton. Di satu sisinya anak-anaknya ini ingin terus melanggengkan kekuasaan yang berbau feodal itu berbau jaman dulu itu (Wawancara dengan Wempi Gunarto)

Pada konteks sabda dan dawuh raja, kekuasaan merujuk pada otoritas dan kontrol yang dimiliki oleh Sri Sultan HBX untuk mengambil keputusan tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Sebagai kepala kerajaan atau kesultanan, Raja memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengatur urusan internal kerajaan. Kekuasaan Raja Sri Sultan HBX dalam konteks ini merujuk pada kemampuan dan wewenangnya untuk mengambil keputusan terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Sebagai Raja, Sri Sultan HBX memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengendalikan proses pewarisan takhta serta menetapkan siapa saja yang akan dijadikan sebagai suksesi takhta raja Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan HBX memiliki kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun untuk mengambil keputusan terkait suksesi dan pewarisan takhta.

GBPH Prabokusumo (adik Sultan) mengakui kekuasaan Sri Sultan HBX sebagai pemimpin tertinggi di Kesultanan Yogyakarta, tetapi tidak untuk suatu keputusan yang menentang atau melanggar paugeran, seperti pendapatnya dalam wawancara berikut:

Saya mengakui kekuasaan Sri Sultan HBX sebagai pemimpin tertinggi di Kesultanan Yogyakarta. Tetapi tidak untuk sabda dan dawuh tersebut, karena itu tidak sesuai dengan tradisi dan norma-norma yang ada. Malah *Ngerso Dalem* / Sri Sultan HBX mengambil langkah ke Mahkamah Konstitusi. Ketika konstitusi memutuskan, seperti sudah direncanakan untuk (pasal 18 huruf M) gubernur dan wagub wajib menyertakan daftar

riwayat hidup istri dihilangkan. Ini jadi upaya memuluskan putri sulungnya menjadi Sultan selanjutnya (Wawancara dengan GBPH Prabukusumo).

Sebagai kepala kerajaan, Sultan memiliki otoritas untuk mempengaruhi dan mengatur urusan kerajaan, termasuk pewarisan takhta. Kekuasaan ini berasal dari posisinya sebagai pemimpin tertinggi Kerajaan Yogyakarta. Sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi menunjukkan kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh Sri Sultan HBX. Sri Sultan HBX memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Kekuasaan Sultan memungkinkan pengaruh dan kontrol dalam menentukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pewarisan takhta dan suksesi kerajaan. Dalam konteks ini, pengaruh kekuasaan Raja memainkan peran dalam mengatur dan mempengaruhi proses Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi penerus takhta Kesultanan Yogyakarta.

Dalam konsep filsafat Jawa, Raja sebagai manifestasi dewa, artinya Raja dianggap sebagai pemimpin yang memiliki otoritas mutlak karena dianggap sebagai perwujudan dewa di dunia manusia. Hal ini memberikan raja legitimasi yang kuat untuk memerintah dan mengambil keputusan atas nama kehendak dewa. Sejauh ini, Sultan sebagai raja masih memiliki kekuasaan (*power*) dalam beberapa aspek di Yogyakarta. Kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti warisan sejarah, pengaruh budaya, dan peran simbolis yang dipegangnya. Sebagai kepala Kesultanan Yogyakarta, Sultan masih memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar keraton.

Namun, Sultan tidak lagi memiliki otoritas (*authority*) yang mencakup seluruh rakyat Yogyakarta. Perubahan ini terjadi dengan adanya sistem politik resmi di Indonesia, di mana Sultan memegang posisi sebagai gubernur Yogyakarta. Sebagai

gubernur, Sultan memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pemerintahan daerah, termasuk pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya.

Sultan dalam kapasitasnya sebagai gubernur, otoritas Sultan terbatas pada tugas dan wewenang yang terkait dengan pemerintahan daerah. Sultan tidak memiliki otoritas langsung atas seluruh rakyat Yogyakarta, tetapi lebih fokus pada tugas-tugas administratif dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan daerah. Meskipun Sultan masih memiliki kekuasaan yang berasal dari posisinya sebagai raja dan peran simbolisnya, otoritasnya di masyarakat Yogyakarta terbatas pada lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur. Sedangkan sabda dan dawuh Sultan HBX tidak lagi memiliki power bagi sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Saat ini masyarakat Yogyakarta cenderung mengakui atau menganggap hubungan dengan Sultan hanya mencakup penghormatan budaya, pengakuan terhadap tradisi, atau pengaruh simbolis, tetapi tidak secara langsung terikat oleh otoritas politik Sultan dalam pemerintahan daerah.

Penggunaan kekuasaan dalam komunikasi yang dilakukan Sri Sultan HBX melalui Sabda dan dawuh merupakan salah satu bentuk komunikasi kekuasaan. Sultan sebagai pemimpin memiliki kekuasaan yang memungkinkannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Melalui sabda dan dawuh, Sultan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan memainkan peran penting dalam memastikan pesan dalam sabda dan dawuh tersebar secara luas dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, kekuasaan memperkuat dampak komunikasi yang disampaikan melalui sabda dan dawuh.

4.2.2 Authority Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi

Sri Sultan HBX memiliki wewenang secara eksekutif untuk memimpin dan mengelola pemerintahan dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta. Hal ini termasuk mengeluarkan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Sri Sultan HBX juga memiliki wewenang secara legislatif untuk membuat undang-undang, peraturan, dan kebijakan dalam kerangka peraturan yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, Sri Sultan HBX memiliki wewenang yudikatif untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan di wilayahnya.

Sebagai penjaga tradisi dan kebudayaan, Sri Sultan HBX juga memiliki peran dalam menjaga dan mempertahankan tradisi serta kebudayaan Jawa di Kesultanan Yogyakarta. Selain itu juga sebagai simbol persatuan dan identitas bagi masyarakat Yogyakarta. Karena Raja dalam kosmologi budaya Jawa juga sering dikaitkan dengan charisma yang kuat, yaitu daya tarik pribadi atau karunia yang diberikan oleh dewa. Kharisma ini memberikan kekuatan khusus kepada Raja dan membuatnya dihormati oleh rakyatnya.

Authority (Kewenangan) merujuk pada legitimasi atau hak legal untuk mengendalikan dan mengatur suatu wilayah, organisasi, atau institusi Kesultanan Yogyakarta. Sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi mencerminkan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai pemimpin tertinggi Kerajaan Yogyakarta. Kewenangan ini diperoleh melalui tradisi, sejarah, dan sistem pewarisan takhta yang diakui secara budaya dan hukum. Kewenangan Raja Sri Sultan HBX merupakan dasar legal dan tradisional yang memberinya hak untuk memutuskan masalah Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Raja memiliki kewenangan yang diakui oleh

masyarakat dan sistem kerajaan untuk menetapkan pewaris takhta berdasarkan aturan dan tradisi yang ada.

Otoritas ini kalau pendapat saya ya merujuk pada legitimasi atau hak legal untuk mengendalikan dan mengatur suatu wilayah, organisasi, atau institusi dalam hal ini Kesultanan Yogyakarta. Sabda dan dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi ini mencerminkan bagaimana kewenangan yang diberikan Sri Sultan HBX sebagai pemimpin tertinggi di Kesultanan Yogyakarta. Kewenangan ini kan diperoleh secara turun temurun dari HBI, HBII, HBIII, HBIV, HBV, HBVI, HBVII,HBVIII,HBIX, yang sekarang diterima oleh HBX. Ini semua melalui tradisi, sejarah, dan sistem pewarisan takhta yang diakui secara budaya dan hukum tata negara Republik Indonesia juga mengakuinya (Wawancara dengan Theresia Suharti).

Kesultanan Yogyakarta secara kontekstual saat ini, perlu dipahami bahwa kedudukan Sultan sebagai Raja tidak lagi memiliki kekuasaan politik dan otoritas pemerintahan yang sama seperti pada masa lalu. Setelah pembentukan Republik Indonesia, sistem politik resmi mengatur bahwa Sultan Yogyakarta menduduki jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kapasitas ini, Sultan memegang kekuasaan dalam ranah administratif dan pembangunan di wilayah Yogyakarta.

Meskipun Sultan tidak lagi memiliki otoritas politik formal sebagai raja yang mengendalikan seluruh rakyat Yogyakarta, penting untuk memperhatikan bahwa Kesultanan Yogyakarta masih memiliki legitimasi kultural yang kuat di kalangan masyarakat Yogyakarta. Legitimasi kultural merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap tradisi, nilai, dan sejarah yang terkait dengan Kesultanan Yogyakarta.

Kewenangan Raja Sri Sultan HBX berkaitan dengan hak legal dan budaya yang memberikan otoritas kepadanya untuk mengatur dan mengendalikan pewarisan takhta serta proses Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Otoritas ini diberikan melalui sistem monarki yang diakui secara tradisional dan dihormati oleh masyarakat, serta diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Kewenangan Raja Sri Sultan HBX dalam masalah Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi berhubungan dengan legitimasi dan hak hukumnya untuk mengambil keputusan tersebut. Raja memiliki kewenangan berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan sistem pewarisan takhta yang diakui dalam konteks kerajaan. Otoritas Raja diterima oleh masyarakat sebagai landasan legal untuk mengatur suksesi kerajaan.

Sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX memberikan kewenangan dan hak hukum yang diakui oleh masyarakat terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Masyarakat mengakui otoritas yang dimiliki oleh Raja dalam hal ini, menganggapnya sebagai pemimpin yang memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi puteri mahkota. Otoritas ini diakui sebagai landasan yang sah untuk mengatur urusan internal kerajaan, termasuk Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Meskipun hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagian individu atau kelompok mungkin pertanyaan kritis atau menyuarakan pendapat mereka terhadap keputusan Sultan. Ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan diskusi yang ada dalam masyarakat yang demokratis. Seperti dikemukakan oleh KH. Abdul Muhaimin.

Yang namanya eksekutif itu kalau rapat dengan Sultan tidak ada yang berani bersuara, jadi perangkatnya ada, tapi proses-proses demokrasi itu tersumbat oleh hegemoni kharismatik. Hegemoni itupun sebetulnya semu, karena sekarang sebetulnya wibawa Sultan itu sudah habis, nggih to? Karena semua orang takut karena berkait dengan *safety self*, posisioningnya, kepentingannya, nah itu persoalannya (Wawancara dengan KH. Abdul Muhaimin).

Ada kemungkinan bahwa penolakan terhadap sabda atau dawuh Sultan dapat berasal dari perspektif politik atau ideologi tertentu. Individu atau kelompok yang memiliki pandangan atau kepentingan politik atau ideologi yang berbeda dapat menentang atau tidak setuju dengan keputusan Sultan. Terdapat beberapa masyarakat

yang tidak setuju mungkin merasa bahwa proses pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi tidak transparan, adil, atau memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap keputusan tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Wempi Gunarto.

Memperhatikan pertimbangan demokrasi dan partisipasi publik, otoritas Raja haruslah dipertimbangkan dengan melibatkan masyarakat secara luas, sehingga keputusan tersebut mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam otoritas sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX. Saya belum melihat adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan tersebut, termasuk pemahaman yang jelas mengenai alasan dan justifikasi di balik Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi (Wawancara dengan Wempi Gunarto).

Wewenang-wewenang Sri Sultan HBX sebagai Raja tersebut memberikan tanggung jawab yang luas dalam mengelola pemerintahan di wilayah kesultanan, menjaga kebudayaan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kesultanan Yogyakarta. Sebagai Raja, Sri Sultan HBX tidak memiliki otoritas yang mutlak terhadap seluruh masyarakat Yogyakarta. Otoritas penuhya hanya berlaku untuk struktur yang ada di kesultanan Yogyakarta dan sebagian masyarakat yang memiliki ikatan kepentingan secara langsung dengan Sri Sultan HBX sebagai Raja. Penggunaan *authority* dalam komunikasi melalui penyampaian sabda dan dawuh merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki Sri Sultan HBX. Sebagai pemimpin dengan otoritas yang diakui, Otoritas Sri Sultan HBX memungkinkan pesan dalam sabda dan dawuh untuk disebarkan dengan lebih luas. Otoritas yang dimiliki Sri Sultan HBX memainkan peran penting dalam keberhasilan komunikasi dalam kasus sabda dan dawuh. Karena dihormati dan diakui oleh masyarakat, pesan yang disampaikan oleh Sultan memiliki bobot dan kepercayaan yang lebih besar.

4.2.3. Legitimacy Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR

Pembayun menadi GKR Mangkubumi

Legitimacy (Legitimitasi): mengacu pada pengakuan dan penerimaan yang luas terhadap otoritas dan keabsahan suatu kekuasaan atau pemerintahan. Sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi memiliki legitimasi berdasarkan tradisi dan sistem monarki yang diakui dalam konteks Kerajaan Yogyakarta. Legitimitasi ini diperoleh melalui pengakuan masyarakat, keluarga kerajaan, dan pemangku adat. Legitimasi sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi merujuk pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan tersebut. Legitimitasi ini berhubungan dengan pengakuan masyarakat terhadap otoritas dan keabsahan Raja dalam mengambil keputusan pewarisan takhta.

Penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap keabsahan dan keberlakuan keputusan tersebut. Legitimitasi ini didasarkan pada faktor-faktor seperti tradisi, sejarah, norma budaya, dan prinsip hukum yang diakui dalam konteks Kerajaan Yogyakarta. Pada konteks masyarakat, legitimasi Raja sebagai pemimpin dan keputusannya terkait suksesi kerajaan dihormati dan dianggap sah. Legitimitasi ini bergantung pada faktor-faktor seperti tradisi, budaya, dan pengakuan sosial terhadap kedudukan Raja sebagai pemimpin yang sah. Penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap keputusan Raja mencerminkan legitimasi dari sabda dan dawuh tersebut.

Legitimasi formal terkait dengan posisi Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diakui oleh hukum dan sistem politik. Namun, legitimasi kultural berkaitan dengan keyakinan, penghargaan, dan kepatuhan sukarela yang masyarakat Yogyakarta berikan kepada Sultan sebagai pemegang tradisi dan warisan budaya Jawa. Legitimasi kultural ini dapat mempengaruhi cara masyarakat Yogyakarta

memandang Sultan, menghormati sabda dan dawuhnya, serta mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang terkait dengan Kesultanan Yogyakarta.

Di sisi lain, legitimasi kultural berkaitan dengan pengakuan dan penerimaan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan identitas lokal yang dihormati oleh masyarakat Yogyakarta. Legitimasi kultural dalam konteks ini mencerminkan hubungan emosional, sejarah, dan kepercayaan masyarakat terhadap warisan budaya dan tradisi yang terkait dengan kesultanan.

Hubungan antara legitimasi formal dan legitimasi kultural di Yogyakarta dapat saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Legitimasi formal dapat diperkuat oleh legitimasi kultural, karena pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwarisi oleh Sultan dapat memberikan landasan bagi penerimaan dan pengakuan atas peran politik yang diemban. Sebaliknya, legitimasi kultural juga dapat dipengaruhi oleh legitimasi formal. Ketika Sultan memegang peran politik sebagai gubernur dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hal ini dapat memperkuat pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap posisi Sultan secara kultural.

Praktiknya, masyarakat Yogyakarta dapat memberikan legitimasi baik secara formal maupun kultural kepada Sultan. Mereka menghormati Sultan sebagai tokoh yang mewakili tradisi, budaya, dan identitas Yogyakarta, sementara juga mengakui legitimasi formal Sultan dalam peran politiknya sebagai gubernur. Kedua bentuk legitimasi ini dapat berinteraksi dan saling memperkuat, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan identitas budaya dalam konteks masyarakat Yogyakarta. Seperti diungkapkan oleh Ahmad Charis Zubair dalam wawancaranya.

Kalau beliau menggunakan secara resmi maka konsekuensi logisnya ya nggak bisa jadi gubernur, karena secara eksplisit di UUK menyebut Gubernur itu adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta, tidak Hamengkubawono. Jadi akhirnya ya masih setengah hati menggunakan nama Hamengkubawono (Wawancara dengan Ahmad Charis Zubair).

Sebagian masyarakat mengakui dan menghormati tradisi dan sistem monarki yang ada dalam Kerajaan Yogyakarta, mereka cenderung melihat sabda dan dawuh Raja sebagai keputusan yang sah dan memiliki legitimasi. Legitimisasi ini terkait erat dengan pengakuan masyarakat terhadap tradisi, adat, dan norma-norma yang mengatur pewarisan takhta dalam kerajaan. Tidak terlepas juga dari keluarga keraton Yogyakarta, berikut salah satu pendapat dari adik Sri Sultan HBX:

Jadi perlu diketahui bahwasanya *Ngerso Dalem* HBX itu diangkat menjadi Sultan penerus HB IX merupakan dari hasil rapat, dari musyawarah keluarga, bukan karena diangkat oleh HB IX. Mestinya kalau mau diakui oleh semua keluarga dan masyarakat sebelum memutuskan mengangkat Puteri Mahkota ya harus rapat/musyawarah keluarga dulu. Sesuai dengan adat dan aturan hukum Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi itu juga tidak sah, karena sabda dan dawuh sudah ditandatangani dan dinamai yang berbeda-beda oleh *Ngerso Dalem*. Akhirnya pada prinsipnya biarlah bagaimana pengakuan dari masyarakat saja, masalah kekuasaan, otoritas, sama legalitas sabda dan dawuh itu (Wawancara dengan GBPH Prabukusumo).

Legitimisasi Sri Sultan HBX didasarkan pada sejarah dan tradisi yang mengakui keluarga Keraton Yogyakarta sebagai pemimpin dan penguasa yang sah di Kesultanan Yogyakarta. Berikut adalah faktor-faktor yang berkontribusi pada legitimasi Sri Sultan HBX:

Pertama karena garis keturunan, Sri Sultan HBX adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan Kesultanan Yogyakarta yang telah memerintah selama berabad-abad. Garis keturunan ini memberikan dasar keabsahan secara tradisional dalam sistem pemerintahan kerajaan. **Kedua** adalah adat dan tradisi, Sri Sultan HBX diakui sebagai pemimpin yang memegang teguh adat dan tradisi Jawa. Kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun memberikan legitimasi yang kuat di mata masyarakat Yogyakarta. **Ketiga** adalah pengakuan pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi mengakui dan memberikan legitimasi kepada Sri Sultan HBX sebagai pemimpin Kesultanan Yogyakarta dan disahkan melalui UU No 13 Tahun

2012. Pengakuan ini diberikan melalui peraturan hukum dan perjanjian yang mengakui kedaulatan dan wewenang kerajaan. **Keempat** adalah pada umumnya masyarakat Yogyakarta memberikan dukungan dan pengakuan kepada Sri Sultan HBX sebagai pemimpin mereka. Peran dan keterlibatan Sultan dalam kegiatan sosial, budaya, dan kesejahteraan rakyat juga memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat.

Dalam konteks sabda dan dawuh Sri Sultan HBX, *legitimacy* berkaitan dengan kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap otoritas dan kekuasaan Sultan sebagai pemimpin. *Legitimacy* ini memainkan peran penting dalam komunikasi, di mana pesan yang disampaikan oleh Sultan dianggap sah dan relevan karena berasal dari pemimpin yang diakui secara sosial dan budaya. *Legitimacy* Sultan sebagai pemimpin memberikan kekuatan pada pesan yang disampaikan dalam sabda dan dawuh. *Legitimacy* memainkan peran penting dalam mempengaruhi penerimaan dan respon terhadap pesan komunikasi yang disampaikan oleh Sri Sultan HBX. Komunikasi dalam sabda dan dawuh Sri Sultan HBX berkaitan dengan pembenaran kekuasaan dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut memberikan pembenaran atas penggunaan kekuasaan Sri Sultan HBX.

4.3. Persepsi Masyarakat Yogyakarta

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti melalui penyebaran kuesioner dengan metode pengambilan sampel secara acak dan berjenjang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kotamadya Yogyakarta sebanyak 25 responden, Kota Gede sebanyak 15 responden, Kabupaten Sleman 15 responden, Kabupaten Kulonprogo 15 responden, Kabupaten Bantul sebanyak 15 responden, dan Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 15 responden, jadi total terdapat 100 responden. Dari 100 responden tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Berdasarkan Jenis Kelamin

1 = L	62	62%
2 = P	38	38%
1= U 17-40	57	57%
2= U 41 keatas	43	43%

Pendidikan

1 = SD	3	3%
2 = SMP sederajat	4	4%
3 = SMA sederajat	30	30%
4 = S1 sederajat	55	55%
5 = S2	8	8%
6 = S3	0	0%

Pekerjaan

1 = PNS	11	11%
2= swasta	34	34%
3= buruh	2	2%
4= abdi dalem	5	5%
5=lain2	48	48%

4.3.1 Pertanyaan Pengetahuan Responden pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja

Apakah saudara/i mengetahui Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi?		
1 = a = Mengetahui	99	99%
2 = b = Tidak Mengetahui	1	1%

Dari mana saudara/i mengetahui berita tersebut?		
1 = a = Media Berita	58	58%
2 = b = Mulut ke mulut	42	42%

Apakah saudara/i mengikuti perkembangan isu tersebut?		
1 = a = Mengikuti	32	32%
2 = b = Tidak mengikuti	67	67%

4.3.2 Pernyataan Sikap Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *Power* Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta.

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Memiliki power di masyarakat Yogyakarta

1 = Setuju	56	56%
2 = Tidak Setuju	20	20%
3 = Netral	24	24%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Memiliki pengaruh pada perubahan kekuasaan Raja

1 = Setuju	74	74%
2 = Tidak Setuju	10	10%
3 = Netral	16	16%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Memiliki pengaruh pada sikap masyarakat Yogyakarta

1 = Setuju	75	75%
2 = Tidak Setuju	9	9%
3 = Netral	16	16%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Memiliki pengaruh pada kepatuhan masyarakat Yogyakarta

1 = Setuju	58	58%
2 = Tidak Setuju	13	13%
3 = Netral	23	23%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi tidak boleh ditolak oleh masyarakat Yogyakarta

1 = Setuju	21	21%
2 = Tidak Setuju	56	56%
3 = Netral	23	23%

4.3.3. Pernyataan Sikap Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *Authority Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX* tentang Pengangkatan GR Pembayaran menjadi GKR Mangkubumi

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayaran menjadi GKR Mangkubumi menjadi tindakan yang benar untuk masyarakat Yogyakarta

1 = Setuju	14	10%
2 = Tidak Setuju	53	57%
3 = Netral	33	33%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayaran menjadi GKR Mangkubumi menjadikan masyarakat Yogyakarta taat dan patuh

1 = Setuju	10	55%
2 = Tidak Setuju	57	18%
3 = Netral	33	27%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayaran menjadi GKR Mangkubumi dijadikan cara melanggengkan kekuasaan

1 = Setuju	55	55%
2 = Tidak Setuju	18	15%
3 = Netral	27	30%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayaran menjadi GKR Mangkubumi dijadikan tindakan untuk kepentingan individu penguasa

1 = Setuju	55	55%
2 = Tidak Setuju	15	15%
3 = Netral	30	30%

Sri Sultan HBX menggunakan kekuasaan untuk membenarkan segala yang disampaikan melalui Sabda dan Dawuh Raja

1 = Setuju	50	50%
2 = Tidak Setuju	18	18%
3 = Netral	32	32%

4.3.4. Pernyataan Sikap Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap *Legitimacy* Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi

Saudara/i sukarela menerima Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi

1 = Setuju	17	17%
2 = Tidak Setuju	55	55%
3 = Netral	28	28%

Saudara/i sukarela mematuhi Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi

1 = Setuju	18	18%
2 = Tidak Setuju	48	48%
3 = Netral	34	34%

Saudara/i menganggap Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta

1 = Setuju	13	13%
2 = Tidak Setuju	50	50%
3 = Netral	37	37%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi merupakan realisasi keinginan masyarakat Yogyakarta yang diperkuat Kesultanan Yogyakarta

1 = Setuju	17	17%
2 = Tidak Setuju	57	57%
3 = Netral	26	26%

Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi mengarah pada kekuasaan, otoritas, dan legitimasi Sri Sultan HBX sebagai suksesi penerus Takhta Kesultanan Yogyakarta

1 = Setuju	61	61%
2 = Tidak Setuju	13	13%
3 = Netral	26	26%

4.3.5. Sikap Masyarakat Yogyakarta pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun KGR Mangkubumi.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner tentang sikap masyarakat di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX didapatkan hasil sebagai berikut: sebesar 17% masyarakat menyatakan setuju, 38% masyarakat menyatakan tidak setuju, dan 45% masyarakat menyatakan netral.

1 = Setuju	17	17%
2 = Tidak Setuju	38	38%
3 = Netral	45	45%

4.3.6. Latitude of Accepence Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembaun Mendai GKR Mangkubuni sebagai Suksesi Takhta

Melalui survey yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kuesioner baik yang diberikan secara langsung kepada responden maupun melalui *google form* total sebanyak 100 responden dengan pengambilan sampel acak dan berjenjang.

Tabel 4.1. Data responden:

Berdasarkan Jenis Kelamin

1 = L	62	62%
2 = P	38	38%
1= U 17-40	57	57%
2= U 41 keatas	43	43%

Berdasarkan Pendidikan

1 = SD	3	3%
2 = SMP sederajat	4	4%
3 = SMA sederajat	30	30%
4 = S1 sederajat	55	55%
5 = S2	8	8%
6 = S3	0	0%

Berdasarkan Pekerjaan

1 = PNS	11	11%
2= swasta	34	34%
3= buruh	2	2%
4= abdi dalem	5	5%
5=lain2	48	48%

Responden tersebut terdiri dari 62 laki-laki dan 38 perempuan. Dilihat dari sisi usianya yang berkisar antara 17 - 40 tahun sebanyak 57 responden, sedangkan usia 41 tahun ke atas sebanyak 43 responden. Berdasarkan kriteria jenjang pendidikan terdapat lulus Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat sebanyak 4%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sebanyak 30%, Sarjana Strata Satu (S1) sederajat sebanyak 55%, dan Strata Dua (S2) sederajat sebanyak 8%. Sedangkan dari sisi pekerjaan terdapat 11% responden merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), 34% terdiri dari pegawai swasta, 2% buruh tidak tetap, 5% merupakan abdi dalem, dan 48% pekerjaan lainnya.

Tabel 4.2. Pengetahuan Responden

Apakah saudara/i mengetahui Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi?		
1 = a = Mengetahui	99	99%
2 = b = Tidak Mengetahui	1	1%

Dari mana saudara/i mengetahui berita tersebut?		
1 = a = Media Berita	58	58%
2 = b = Mulut ke mulut	42	42%

Apakah saudara/i mengikuti perkembangan isu tersebut?		
1 = a = Mengikuti	32	32%
2 = b = Tidak mengikuti	67	67%

Pada umumnya 99% dari responden menyatakan mengetahui adanya Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, hanya 1% saja dari responden yang menyatakan tidak mengetahuinya. Dari 100 responden terdapat sebanyak 58% mengetahuinya melalui media, baik berita dari media televisi, radio, cetak, maupun media online. Sedangkan 42% mengetahui melalui perbincangan mulut ke mulut yang terjadi di ruang publik, baik pasar, kampus, angkringan, pangkalan becak, ojek, dan lain sebagainya. Adapun masyarakat yang mengikuti perkembangan berita tentang Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX ini sebanyak 32% dan yang tidak mengikutinya sebanyak 67%. Hal ini menunjukkan meskipun sudah 8 tahun sejak diumumkannya Sabda dan Dawuh Raja tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi ini masih menyisakan polemik dan menjadi perbincangan di masyarakat Yogyakarta khususnya.

Beragam respon, tanggapan, dan persepsi muncul dari responden yang telah bersedia mengisi kuesioner terkait Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Pada Masyarakat Yogyakarta ini. Ada yang menerima begitu saja tanpa melakukan tindakan apapun. Terdapat juga yang menolak dengan berbagai alasan. Terdapat pula sebagian masyarakat yang memilih menyatakan netral dan cenderung menganggap itu merupakan permasalahan internal Kesultanan Yogyakarta.

4.3.7 Latitude Acceptance pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi

Mengacu pada pemikiran (Sherif et al., 1965; Ganberg&Sarup, 1991; Darity, 2008; Griffin, 2015; Salazar, 2017). Di mana *latitude of acceptance* ini merupakan rentan penerimaan positif atau dapat diterima di masyarakat.

Tabel 4.3. *Latitude of Acceptence* Sabda dan Dawuh Sultan dari *Power*

Masyarakat setuju Sabda dan Dawuh Sultan memiliki Power	56%
Setuju Sabda dan Dawuh Sultan memiliki pengaruh pada perubahan kekuasaan Raja	74%
Setuju Sabdan dan Dawuh Sultan memiliki pengaruh pada perubahan sikap masyarakat Yogyakarta	75%
Setuju Sultan dan Dawuh Sultan memiliki pengaruh pada kepatuhan masyarakat Yogyakarta	58%
Setuju Sabda dan Dawuh Sultan tidak boleh ditolak	21%

Berdasarkan data dilihat dari sisi *power* persepsi masyarakat menunjukkan 56% setuju jika sabda ini memiliki *power* di masyarakat Yogyakarta. Sebanyak 74% setuju sabda dan dawuh memiliki pengaruh pada perubahan kekuasaan Raja. Sebesar 75% setuju sabda dan dawuh ini memiliki pengaruh pada perubahan sikap masyarakat Yogyakarta. Kemudian 58% setuju sabda dan dawuh ini memiliki pengaruh pada kepatuhan Masyarakat, serta 21% setuju sabda dan dawuh tidak boleh ditolak oleh masyarakat.

Tabel 4.4. *Latitude of Acceptence* Sabda dan Dawuh Sultan dari *Authority*

Setuju Sabda dan Dawuh Sultan menjadikan masyarakat Yogyakarta taat dan patuh	55%
Tidak Setuju Sabda dan Dawuh Sultan dijadikan cara untuk melanggengkan kekuasaan	15%
Tidak Setuju Sabda dan Dawuh Sultan dijadikan untuk kepentingan penguasa	15%
Tidak Setuju Sultan dan Dawuh Sultan menggunakan kekuasaan untuk membenarkan Sabda	18%

Tabel 4.5. *Latitude of Acceptence* Sabda dan Dawuh Sultan dari *Legitimacy*

Tidak Setuju Sabda dan Dawuh Sultan mengarah pada Power, Authority, Legitimacy sebagai suksesi takhta kesultanan	13%
--	-----

Dari sisi *authority* terdapat 55% setuju sabda dan dawuh ini menjadikan masyarakat Yogyakarta taat dan patuh dengan Kesultanan. Sebesar 15% tidak setuju sabda dan dawuh ini dijadikan cara untuk melanggengkan kekuasaan. Kemudian 15% tidak setuju sabda dan dawuh dijadikan untuk kepentingan individu penguasa, dan 18%

tidak setuju Sri Sultan HBX menggunakan kekuasaan untuk membenarkan segala yang disampaikan melalui sabda dan dawuh tersebut. Sedangkan dari *legitimacy* terdapat 13% tidak setuju sabda dan dawuh mengarah pada kekuasaan, otoritas, dan legitimasi Sri Sultan HBX sebagai suksesi Takhta Raja.

Melihat data-data tersebut maka tergambar persepsi masyarakat menyatakan sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX memiliki kekuasaan yang cukup besar di masyarakat Yogyakarta, akan tetapi sebagian kecil masyarakat menyatakan kalau keberadaan sabda dan dawuh ini tidak boleh ditolak oleh masyarakat Yogyakarta. Secara kewenangan juga hanya sebagian kecil masyarakat menyatakan sikap dukungan terhadap sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX. Sedangkan legitimasi yang hanya sebagian kecil menyatakan dan memberikan respon positif serta dukungan terhadap sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX.

Tanggapan masyarakat terhadap sabda dan dawuh tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang diumumkan oleh Sri Sultan HBX cenderung mencerminkan penghormatan terhadap keputusan dan tradisi kerajaan. Banyak masyarakat Yogyakarta yang menghormati keputusan Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka melihatnya sebagai kelanjutan dari tradisi dan tatanan kerajaan yang telah ada selama berabad-abad. Jika puteri yang dipilih dianggap memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan disukai oleh masyarakat, tanggapan masyarakat cenderung lebih positif. Pengumuman Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi oleh Sri Sultan HBX juga dapat membangkitkan rasa bangga dan kebangsaan di kalangan masyarakat Yogyakarta. Masyarakat melihatnya sebagai bagian dari identitas mereka dan sebagai simbol kontinuitas tradisi kerajaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan konsep *Social Judgment Theory* dalam penerapannya membutuhkan konfirmasi tindakan (*action*) atas sikap setuju dari masyarakat untuk mengetahui sejauhmana reaksinya. Dari sikap *latitude of acceptance* ini masyarakat Yogyakarta cenderung taat dan patuh mengikuti aturan Sri Sultan HBX, karena Sri Sultan HBX sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta saat ini yang memiliki kewenangan penuh.

Meskipun tidak pernah tercatat dalam sejarah kerajaan Yogyakarta bahwa seorang putri mahkota diangkat sebagai penerus takhta, Sri Sultan HBX memegang peran kunci dan berwenang dalam pengambilan keputusan di bidang budaya melalui sabda dan dawuh raja. Di sisi dimensi modernitasnya, Sri Sultan HBX menganjurkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, meskipun kenyataannya Sultan yang berkuasa tidak memiliki seorang putra sebagai penerus.

Sebagian masyarakat yang setuju tentu saja memberikan dukungan dan menyatakan tidak ada salahnya Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang Perempuan. Sebagai rakyat dari kesultanan Yogyakarta tindakan *sendiko dawuh* yang artinya tunduk dan patuh pada perintah Raja itu sudah menjadi langkah dan tindakan yang nyata bagi masyarakat yang menyatakan mendukung adanya penerus takhta perempuan di Kesultanan Yogyakarta.

Tindakan (*action*) dukungan masyarakat terkait sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi merupakan penghargaan dan apresiasi. Sebagian masyarakat yang setuju secara terbuka menyatakan dukungan mereka dan menghormati otoritas dan legitimasi Sri Sultan HBX dalam memilih puteri mahkota. Selain itu dukungan masyarakat juga dapat tercermin melalui penyelenggaraan acara dan perayaan yang merayakan Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Beberapa masyarakat yang mendukung

keputusan tersebut akan aktif berpartisipasi dalam proses pelantikan atau acara yang terkait dengan Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka dapat memberikan kontribusi dalam bentuk waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya untuk memastikan suksesnya acara tersebut.

Sebagian masyarakat yang mendukung sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX menggunakan media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi positif tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka berbagi cerita, foto, atau video yang menunjukkan dukungan mereka dan menginspirasi orang lain untuk memahami dan menghormati keputusan tersebut.

Beberapa kelompok atau organisasi dalam masyarakat dapat menerbitkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan mereka terhadap sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX. Pernyataan ini dapat dikeluarkan oleh lembaga adat, organisasi masyarakat, atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam lingkungan tersebut. Terdapat yang menerima secara penuh karena mendukung keputusan Sultan dan mematuhi instruksi dengan keyakinan dan kesetiaan. Selain itu terdapat juga yang menerima dengan syarat atau pengecualian. Meskipun mereka secara umum mendukung Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, mereka dapat menyatakan kekhawatiran, memberikan saran, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tertentu sebelum sepenuhnya mematuhi instruksi Sultan.

4.3.8. Latitude of Rejection pada Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan KGR Pembaun Menjadi GKR Mangubumi

Latitude of rejection yang mengacu pada konsep pemikiran (Sherif et al., 1965; Ganberg&Sarup, 1991; Darity, 2008; Griffin, 2015; Salazar, 2017) yang berlawanan dengan *latitude of acceptance* yaitu merupakan rentang garis negatif atau sikap penolakan dalam hal ini berseberangan dan tidak sepakat dengan sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX.

Tabel 4.6. *Latitude of Rejection* Sabda dan Dawuh Sultan memiliki Power

Tidak setuju memiliki power	20%
Tidak setuju memiliki pengaruh pada perubahan kekuasaan	10%
Tidak setuju memiliki penaruh pada sikap	9%
Tidak setuju memiliki penaruh pada kepatuhan	13%
Tidak setuju bahwa Sabda dan Dawuh Sultan tidak boleh di tolak	56%

Dari sisi *power* 20% masyarakat menyatakan tidak setuju bahwa sabda dan dawuh ini memiliki *power* di masyarakat Yogyakarta. Sebesar 10% tidak setuju sabda dan dawuh raja memiliki pengaruh pada perubahan kekuasaan Raja. Kemudian 9% tidak setuju sabda dan dawuh ini memiliki pengaruh pada sikap masyarakat. Terdapat sebanyak 13% pendapat tidak setuju sabda dan dawuh ini memiliki pengaruh pada kepatuhan masyarakat. Sebesar 56% persepsi masyarakat menyatakan tidak setuju sabda dan dawuh tidak boleh ditolak masyarakat.

Tabel 4.7. *Latitude of Rejection* Sabda dan Dawuh Sultan dari *Authority*

Setuju Sabda dan Dawuh Sultan merupakan tindakan yang benar	10%
Setuju Sabda dan Dawuh Sultan dijadikan cara untuk melanggengkan kekuasaan	55%
Setuju Sabdan dan Dawuh Sultan dijadikan untuk kepentingan penguasa	55%
Setuju Sultan dan Dawuh Sultan HBX menggunakan kekuasaan untuk membenarkan Sabda	50%
Tidak setuju Sabda dan Dawuh Sultan menjadi tindakan yang benar untuk masyarakat Yogyakarta	57%

Sedangkan dari sisi *authority* 10% setuju responden setuju sabda ini merupakan tindakan yang benar untuk masyarakat Yogyakarta, 55% persepsi masyarakat setuju sabda dan dawuh ini dijadikan cara untuk melanggengkan kekuasaan, 55% persepsi masyarakat setuju ini dijadikan tindakan untuk kepentingan individu penguasa, 50% persepsi masyarakat setuju sultan HBX menggunakan kekuasaan untuk membenarkan segala yang disampaikan melalui sabda dan dawuh raja, dan 57% pernyataan tidak setuju sabda dan dawuh raja sri sultan HBX menjadi tindakan yang benar untuk masyarakat Yogyakarta.

Tabel 4.8. *Latitude of Rejection* Sabda dan Dawuh Sultan dari *Legitimacy*

Sukarela menerima Sabda dan Dawuh Sultan	17%
Sukarela mematuhi Sabda dan Dawuh Sultan	18%
Setuju Sabda dan Dawuh merupakan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat	13%
Setuju Sabda dan Dawuh merupakan realisasi keinginan masyarakat	17%
Setuju Sabda dan Dawuh Sultan mengarah pada Power, Authority, Legitimacy suksesi takhta kesultanan	61%
Tidak Setuju masyarakat secara sukarela menerima Sabda dan Dawuh Sultan	55%
Tidak setuju masyarakat sukarela mematuhi Sabda dan Dawuh Sultan	48%
Tidak setuju Sabda dan Dawuh Sultan memberikan manfaat bagi masyarakat	50%
Tidak Setuju Sabda dan Dawuh Sultan merupakan realisasi keinginan masyarakat	57%

Sedangkan dari sudut *legitimacy* sebesar 17% pernyataan setuju dan menerima secara sukarela sabda dan dawuh Raja. Terdapat 18% pernyataan masyarakat yang setuju sukarela mematuhi, 13% pernyataan menganggap sabda dan dawuh raja sebagai keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta, 17% pernyataan sabda dan dawuh ini merupakan realisasi keinginan masyarakat Yogyakarta yang diperkuat kesultanan Yogyakarta. Ada 61% pernyataan setuju sabda dan dawuh raja mengarah pada *power*, *authority*, dan *legitimacy* Sri Sultan HBX sebagai suksesi Takhta Kesultanan Yogyakarta, 55% pernyataan tidak setuju masyarakat secara sukarela menerima sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX. Kemudian 48% pernyataan tidak setuju dari masyarakat yang secara sukarela mematuhi sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX, 50% pernyataan tidak setuju sabda dan dawuh sebagai keputusan yang memberikan mafaat bagi masyarakat Yogyakarta dan 57% pernyataan tidak setuju sabda dan dawuh merupakan realisasi keinginan masyarakat yang diperkuat oleh Kesultanan Yogyakarta.

Penolakan masyarakat terhadap sabda dan dawuh Raja dalam beberapa kasus yang jarang terjadi. Berbeda dengan sabda dan dawuh tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang menimbulkan banyak reaksi dari keluarga dan dari berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena adanya

pertentangan dengan tradisi dan budaya. Beberapa anggota masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang tradisi dan tata nilai yang mendasari Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Masyarakat percaya bahwa psabda dan dawuh ini melanggar tradisi, aturan (*paugeran*), budaya, dan yang ada atau tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah berlangsung sejak lama secara turun temurun di mana kerajaan monarki selama ini dipimpin oleh seorang Raja bukan Ratu.

Penolakan juga terjadi akibat masyarakat memiliki rasa ketidakpuasan terhadap pilihan puteri mahkota yang diumumkan oleh Sri Sultan HBX melalui sabda dan dawuhnya. Masyarakat memiliki persepsi bahwa calon puteri mahkota yang dipilih kurang memenuhi kriteria atau tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai. Penolakan juga muncul dari kelompok atau individu yang memiliki perspektif politik dan ideologi tertentu. Mereka memandang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai penggunaan kekuasaan dan suksesi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau sistem politik yang mereka anut.

Penolakan juga terjadi di sebagian abdi dalem (pengikut setia dalam lingkungan istana) terhadap sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Abdi dalem umumnya memiliki keterikatan dan ketaatan yang kuat terhadap raja, dan penolakan terhadap keputusan raja itu sangat jarang terjadi. Sebagian abdi dalem menolak karena memiliki ketidaksetujuan terhadap proses pemilihan puteri mahkota. Sebagian abdi dalem merasa bahwa prosesnya tidak adil atau terdapat kekurangan dalam prosedur pemilihan yang mengarah pada penolakan mereka terhadap keputusan tersebut.

Hal ini menjadikan ketidakpuasan terhadap pilihan puteri mahkota. Penolakan terjadi karena abdi dalem tidak puas dengan pilihan puteri mahkota yang diumumkan oleh raja. Mereka memiliki pandangan bahwa calon penerus takhta harusnya laki-laki

bukan perempuan. Penerus takhta jika perempuan itu kurang memenuhi syarat atau tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai, terlebih Sultan itu sebagai simbol. Pada beberapa situasi, abdi dalem yang memiliki peran strategis atau tanggung jawab penting dalam pengambilan keputusan kerajaan memiliki pertentangan atau beda pandangan dengan keputusan Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai arah strategis atau kepentingan kerajaan yang memicu penolakan mereka terhadap keputusan tersebut.

Reaksi penolakan juga muncul dari tokoh agama. Penolakan tokoh agama di DIY terkait kekuasaan, otoritas, dan legitimasi sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX juga terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa factor antara lain: sebagian tokoh agama di DIY memiliki interpretasi agama yang berbeda atau pandangan yang berbeda tentang kekuasaan raja dapat menolak sabda dan dawuh raja berdasarkan pandangan keagamaan mereka sendiri tentang legitimasi atau otoritas yang melekat pada otoritas politik dan kerajaan.

Kemudian penolakan juga muncul karena tokoh agama merasa bahwa sabda dan dawuh raja tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat adanya ketidaksesuaian antara kebijakan atau keputusan yang diambil dan prinsip-prinsip agama yang diyakini. Penolakan terhadap sabda dan dawuh raja juga muncul karena tokoh agama mempertimbangkan faktor sosial atau politik tertentu yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Mereka menganggap bahwa keputusan tersebut tidak memperhatikan kepentingan sosial atau merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pada kasus ini, penolakan terjadi karena perbedaan interpretasi agama, pertentangan nilai-nilai agama, atau pertimbangan sosial dan politik yang memainkan peran penting di dalamnya.

Sikap *latitude of rejection* atau penolakan atas Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX di masyarakat Yogyakarta tercermin dari tindakan-tindakan penolakan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian abdi dalem yang melakukan perlawanan dengan tidak mau menghadiri acara-acara yang di mana ketika terdapat undangan yang dibubuhi tanda tangan Sri Sultan HBX. Sebagian abdi dalem menyatakan dan bertindak hanya *nguri-uri budoyo* artinya memelihara kebudayaan. Terdapat juga sebagian masyarakat yang menolak sabda dan dawuh tersebut akan melakukan aksi demonstrasi jika nanti ada pengukuhan raja perempuan. Tidak sedikit juga sebagian masyarakat yang menolak tidak berani melakukan tindakan-tindakan *frontal* atau terbuka dengan berbagai alasan seperti takut tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan, dipindahkan tempat dinas pekerjaannya. Pada akhirnya meskipun menolak hanya bisa menunggu kalau sabda dan dawuh ini baik yang akan *langgeng*/memberikan kebaikan, kalau buruk akan menimbulkan *congkrah*/pertikaian.

Tidak sedikit pula masyarakat yang terus mewacanakan penolakan terhadap sabda dan dawuh ini melalui diskusi wacana-wacana di ruang publik. Sebagian pelaku seni melakukan tindakan-tindakan melalui karyanya. Salah satunya melalui kesenian wayang kulit, pada saat adegan Punakawan muncul dengan gaya canda menasihati *bendoro*/majikan yang diharapkan itu bisa mengedukasi masyarakat.

Sebagian besar masyarakat yang menyatakan tidak setuju dengan sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX tidak berani melakukan tindakan melawan secara terang-terangan dengan berbagai alasan takut, hanya rakyat biasa, pekerjaan, kepentingan bisnis, dan juga takut terhadap dominasi Sri Sultan HBX. Sedangkan ada juga individu atau kelompok yang secara umum tidak setuju dengan keputusan Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka memiliki pandangan alternatif, pertentangan politik, atau alasan lain yang membuat mereka tidak sepenuhnya

menerima atau mendukung pesan Sultan. Meskipun jarang terjadi, ada kemungkinan adanya penolakan penuh terhadap sabda dan dawuh Sultan tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Individu atau kelompok tersebut tidak hanya menolak, tetapi juga secara aktif menentang dan menolak untuk mematuhi instruksi Sultan.

Tindakan penolakan-penolakan masyarakat terkait sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi ini juga tampak melalui demonstrasi atau protes sebagai tindakan penolakan. Mereka berkumpul secara massal untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka dan mengekspresikan pandangan masyarakat terhadap keputusan tersebut. Beberapa masyarakat yang merasa keputusan Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi tidak sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku dapat mengambil pendekatan hukum. Masyarakat mengajukan gugatan atau meminta klarifikasi dari lembaga hukum terkait untuk meninjau legitimasi keputusan tersebut.

Sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX dapat memilih untuk melakukan boikot atau menolak untuk berpartisipasi dalam acara-acara atau kegiatan yang terkait dengan Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Mereka menghindari partisipasi dalam upacara kesultanan atau acara resmi lainnya sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan tersebut.

Penolakan juga termanifestasi dalam perdebatan publik di media massa, diskusi kelompok, atau forum komunitas. Masyarakat yang memiliki pandangan berbeda mengajukan argumen dan mempertanyakan legitimasi keputusan tersebut, mencari dukungan dan mempengaruhi opini publik. Selain itu juga menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, berbagi informasi, dan memobilisasi dukungan dari masyarakat lainnya.

4.3.9 Latitude of Noncommitment pada Sada dan Dawuh Sri Sultan tentang pengangkatan Puteri Mahkota

Berdasarkan konsep pemikiran Sherif et al., 1965; Ganberg&Sarup, 1991; Darity, 2008; Griffin, 2015; Salazar, 201, *latitude on noncommitment* ini menandakan ragu-ragu dan cenderung tidak memiliki pendapat sikap yang jelas. Posisi yang direkomendasikan yang berada di garis lintang non-komitmen diklasifikasikan sebagai sikap netral.

Tabel 4.9. *Latitude of Noncommitment* Sabda dan Dawuh Sultan dari Power

Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan memiliki power	24%
Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan memiliki pengaruh pada perubahan kekuasaan Raja	16%
Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan memiliki pengaruh pada sikap masyarakat	16%
Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan memiliki pengaruh pada kepatuhan masyarakat	23%
Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan tidak boleh ditolak	23%

Dari sisi *power*, terdapat 24% menyatakan netral bahwa sabda dan dawuh tersebut memiliki power di masyarakat Yogyakarta, 16% menyatakan sabda dan dawuh memiliki pengaruh pada perubahan kekuasaan Raja di masyarakat Yogyakarta, 16% menyatakan netral bahwa sabda dan dawuh memiliki pengaruh pada sikap masyarakat Yogyakarta. Kemudian 23% menyatakan netral bahwa sabda dan dawuh memiliki pengaruh pada kepatuhan masyarakat Yogyakarta, 23% responden menyatakan sabda dan dawuh tidak boleh ditolak oleh masyarakat Yogyakarta.

Tabel 4.10. *Latitude of Noncommitment* Sabda dan Dawuh Sultan dari *Authority*

Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan menjadi tindakan yang benar untuk masyarakat Yogyakarta	33%
Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan menjadikan masyarakat taat dan patuh	27%
Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan dijadikan cara melanggengkan kekuasaan	30%
Menyatakan netral Sabda dan Dawuh Sultan dijadikan untuk kepentingan penguasa	30%
Menyatakan netral Sri Sultan HBX membenarkan segala yang disampaikan melalui Sabda dan Dawuh	32%

Sedangkan dari sisi *authority* terdapat 33% netral bahwa sabda dan dawuh tersebut menjadi tindakan yang benar untuk masyarakat Yogyakarta, 27% sabda dan dawuh ini menjadikan masyarakat Yogyakarta taat dan patuh, 30% sabda dan dawuh dijadikan cara melanggengkan kekuasaan. Kemudian 30% sabda dan dawuh dijadikan tindakan untuk kepentingan individu penguasa, 32% Sri Sultan HBX menggunakan kekuasaan untuk membenarkan segala yang disampaikan melalui sabda dan dawuh.

Tabel 4.11. *Latitude of Noncommitment* Sabda dan Dawuh Sultan dari *Legitimacy*

Sukarela menerima Sabda dan Dawuh Sultan	28%
Sukarela mematuhi Sabda dan Dawuh Sultan	34%
Sabda dan Dawuh Sultan sebagai keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat	37%
Sabda dan Dawuh Sultan merupakan realisasi keinginan masarakat Yogyakarta	26%
Sabda dan Dawuh Sultan mengarah pada Power, Authority, Legitimacy suksesi takhta kesultanan	26%

Dari sisi *Legitimacy* terdapat 28% menyatakan sukarela menerima sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX, 34% menyatakan sukarela mematuhi sabda dan dawuh ini. Kemudian 37% responden menganggap sabda dan dawuh sebagai keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta, 26% responden menyatakan sabda dan dawuh tersebut merupakan realisasi keinginan masyarakat yang diperkuat Kesultanan Yogyakarta, sedangkan 26% responden menyatakan sabda dan dawuh ini mengarah pada *power*, *authority*, dan *legitimacy* Sri Sultan HBX sebagai suksesi penerus Takhta Kesultanan Yogyakarta.

Sikap netral dari masyarakat Yogyakarta terkait kekuasaan, otoritas, dan legitimasi sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX berdasarkan pada individu dan pandangan masyarakat terhadap peran agama, budaya, dan tradisi dalam konteks kesultanan Yogyakarta. Terdapat beberapa alasan sikap netral masyarakat. Masyarakat Yogyakarta yang mengakui kekuasaan raja sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan dan tradisi kerajaan mataram. Masyarakat melihat sabda dan dawuh raja

sebagai otoritas yang berasal dari kedudukan dan warisan spiritual yang diakui dalam kesultanan Yogyakarta. Masyarakat menekankan pentingnya keadilan, etika, dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan kekuasaan dan otoritas. Masyarakat mengharapkan bahwa sabda dan dawuh raja mencerminkan nilai-nilai agama, keadilan sosial, empati, dan kebaikan bersama. Masyarakat memandang peran agama dan kebudayaan sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dan moral dalam kesultanan Yogyakarta. Dalam hal ini, masyarakat cenderung tidak menerima dan juga tidak menolak sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX sebagai wujud dari kekuasaan dan legitimasi yang diberikan oleh tradisi turun temurun yang diyakini dalam konteks kesultanan Yogyakarta.

Sikap netral juga ditunjukkan oleh budayawan di Yogyakarta terkait kekuasaan, otoritas, dan legitimasi sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX. Budayawan Yogyakarta memiliki pemahaman dan penghargaan terhadap tradisi yang mendalam tentang tradisi dan budaya kesultanan Yogyakarta. Mereka menghargai kekuasaan, otoritas, dan legitimasi yang terkait dengan sabda dan dawuh raja sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan dan warisan budaya kesultanan Yogyakarta.

Budayawan melihat kekuasaan, otoritas, dan legitimasi sabda dan dawuh raja sebagai sarana untuk mempertahankan dan melanjutkan nilai-nilai budaya yang kaya di kesultanan Yogyakarta sebagai simbol kebudayaan. Mereka percaya bahwa Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi adalah langkah penting untuk menjaga kelangsungan budaya kesultanan dan melestarikan identitas kultural Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Budayawan DIY berperan dalam menjaga, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya daerah. Dalam hal ini, mereka mengambil sikap netral terhadap kekuasaan, otoritas, dan legitimasi sabda dan dawuh raja Sri Sultan HBX dan menganggap ini sebagai elemen penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan kearifan lokal.

Tindakan netral masyarakat terkait sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi adalah ketika mereka tidak secara tegas mendukung atau menolak keputusan tersebut. Masyarakat netral dapat mengambil sikap tidak berpihak dan memilih untuk tetap mengamati dan mempertimbangkan informasi yang tersedia sebelum membuat keputusan atau pendapat mereka sendiri.

Tindakan masyarakat yang netral cenderung memilih untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX, Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, serta konteks sejarah dan budaya yang terkait. Mereka berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sebelum membentuk pendapat mereka. Masyarakat netral juga cenderung mengikuti perkembangan berita terkait sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX dari berbagai sumber yang berbeda. Mereka memperhatikan berita, laporan, dan komentar yang disampaikan oleh wartawan atau pihak yang terkait untuk memperoleh perspektif yang lebih luas.

Masyarakat yang menyatakan netral memilih untuk mengambil tindakan tetap berpartisipasi dalam diskusi terbuka atau forum yang mempertemukan berbagai pandangan. Dalam lingkungan tersebut, mereka mendengarkan pendapat dan argumen dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun menolak keputusan tersebut, untuk memperluas pemahaman mereka. Menjaga sikap objektif dan tidak memihak dalam perdebatan yang berkaitan dengan sabda dan dawuh Raja Sri Sultan HBX, menghindari menyuarakan pendapat yang jelas mendukung atau menolak, dan lebih memilih untuk tetap terbuka terhadap pemikiran dan informasi baru yang muncul. Masyarakat yang netral cenderung menjaga kerukunan sosial dengan menghormati perbedaan pendapat

yang ada, berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat, tanpa memihak secara eksplisit pada satu sisi.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat menyadari bahwa sabda dan dawuh dapat mengalami pergeseran dalam konteksnya. Perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi seiring waktu dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan sabda dan dawuh dari pemimpin atau tokoh spiritual.

Sebagai bagian dari kesadaran masyarakat akan pergeseran ini, masyarakat perlu memahami bahwa pesan dan petuah yang diberikan oleh pemimpin masa lalu dapat diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman yang berbeda. Sabda dan dawuh yang mungkin relevan pada masa lalu tidak selalu memiliki kesesuaian langsung dengan tantangan dan perubahan zaman yang masyarakat hadapi saat ini. Namun, warisan nilai-nilai yang terkandung dalam sabda dan dawuh tetap berharga sebagai sumber inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan pada dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan yang berbeda. Oleh karena itu, interpretasi sabda dan dawuh haruslah fleksibel dan dapat beradaptasi dengan konteks zaman yang terus berubah.

4.3.10 Pengaruh Kekuasaan dan Penilaian Sosial Masyarakat terhadap Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Sultan memiliki peran dalam membentuk pandangan masyarakat tentang calon penggantinya sebagai penguasa berikutnya. Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang suksesi takhta mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon penerus dan dapat membentuk dukungan dan penerimaan terhadap pengangkatan GKR Pembayun sebagai GKR Mangkubumi.

Dalam keseluruhan, pengaruh kekuasaan Sri Sultan HBX sebagai pemimpin dan penilaian sosial masyarakat terhadap otoritasnya memainkan peran penting dalam pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta raja di Keraton Yogyakarta. Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX menjadi faktor krusial dalam proses suksesi takhta, dan pengaruh dari kekuasaan dan penilaian sosial

masyarakat saling berinteraksi untuk membentuk dukungan, membentuk penolakan, atau membentuk sikap netral.

Dari sisi *power, authority, dan legitimacy*, komunikasi Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai Suksesi Takhta Raja sangat dipengaruhi oleh kekuasaan Sri Sultan HBX sebagai pemimpin, otoritas yang diakui oleh masyarakat, serta legitimasi pesan yang disampaikan. Kombinasi dari ketiga aspek ini memainkan peran penting dalam membentuk penerimaan, penolakan, netral, dan penilaian masyarakat terhadap keputusan suksesi takhta tersebut.

Masyarakat yang setuju, memberikan dukungan moral dan mendukungnya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai calon pewaris takhta Raja. Penting untuk diingat bahwa pengaruh ini tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketika sabda dan dawuh diakui secara luas dan mendapat dukungan masyarakat, hal ini dapat menciptakan stabilitas dan harmoni dalam kepemimpinan keraton serta memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi penerus takhta. Begitupula sebaliknya, ketika sabda dan dawuh ditolak secara luas oleh masyarakat, maka dapat memunculkan konflik yang berkepanjangan di antara masyarakat. Perlu digarisbawahi ketidaksetujuan adalah hal yang wajar dalam proses suksesi takhta atau pengambilan keputusan penting lainnya. Penting bagi Kesultanan Yogyakarta mengelola ketidaksetujuan dengan bijaksana dan membuka dialog yang konstruktif untuk mengatasi perbedaan pandangan dan mencari solusi yang sesuai.

Selain kedua kubu yang sudah disebutkan, masih terdapat satu kubu lainnya yakni bahwa masih ada kehadiran masyarakat yang netral dalam proses suksesi takhta di Kesultanan Yogyakarta. Sikap netral dapat mencerminkan pandangan yang beragam dan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencari solusi yang tepat bagi

kepentingan bersama. Diperlukan ruang bagi masyarakat dan Kesultanan untuk memastikan bahwa proses komunikasi dan dialog terbuka untuk semua pihak.

4.4. Kemungkinan-Kemungkinan Yang Terjadi Jika Kesultanan Yogyakarta Dipimpin Seorang Ratu

Untuk menganalisis sabda dan dawuh dengan mempertimbangkan konteks sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Masyarakat hendaknya memahami pesan yang terkandung dalam sabda dan dawuh sebagai prinsip dan nilai yang dapat diaplikasikan secara relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dalam menjaga kesinambungan dan relevansi sabda dan dawuh, peran pemimpin dan tokoh spiritual juga penting. Mereka diharapkan dapat memberikan panduan yang mempertimbangkan perubahan zaman serta mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan dengan tuntutan zaman.

Sabda dan dawuh tetap merupakan bagian penting dari warisan budaya dan spiritualitas masyarakat. Namun, masyarakat perlu menyadari bahwa interpretasi dan aplikasinya dapat bergeser sesuai dengan perubahan zaman. Dengan sikap terbuka, kritis, dan responsif terhadap perubahan, masyarakat dapat memanfaatkan sabda dan dawuh sebagai sumber inspirasi yang relevan dan berharga dalam menjalani kehidupan yang penuh makna di era zaman yang terus berkembang.

Dimungkinkan muncul beberapa perubahan jika Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang perempuan, Sultan Yogyakarta menjadi Sultanah, beberapa istilah yang mungkin mengalami perubahan penamaan atau sebutan adalah sebagai berikut:

1. Sultan menjadi Sultanah: Istilah ini merujuk pada perubahan gelar kepemimpinan dari Sultan (pria) menjadi Sultanah (wanita). Sultanah adalah gelar yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang perempuan yang memimpin kesultanan.

2. Kesultanan menjadi Kesultanan: Istilah “kesultanan” mengacu pada wilayah yang diperintah oleh seorang Sultan. Jika seorang Sultan menjadi Sultanah, maka wilayah tersebut dapat disebut sebagai "kesultanan" untuk menunjukkan perubahan kepemimpinan yang terjadi.
3. Putra Mahkota menjadi Putri Mahkota: Gelar "Putra Mahkota" mengacu pada pewaris takhta yang merupakan putra dari seorang sultan. Jika sultanah memiliki pewaris, gelar yang tepat akan menjadi "Putri Mahkota" untuk menunjukkan bahwa dia adalah calon penerus yang merupakan putri.
4. Ratu menjadi Sultanah: Jika Sultanah menikah dengan seorang pangeran atau pria dari luar kesultanan, pasangan tersebut dapat diberi gelar "Sultan" dan "Sultanah" untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan kepemimpinan.

Jika Sultan Yogyakarta menjadi Sultanah, kemungkinan perubahan juga bisa terjadi pada beberapa simbol-simbol kesultanan yang berkaitan dengan ritual dan upacara yang selama ini dipimpin oleh sultan. Simbol-simbol tersebut dapat berubah untuk mencerminkan peran dan status baru sebagai seorang Sultanah. Berikut beberapa perubahan yang mungkin terjadi:

1. Mahkota: Mahkota yang digunakan oleh sultan dalam upacara-upacara resmi mungkin akan diubah atau disesuaikan untuk mencerminkan peran sebagai sultanah. Desain, ukuran, atau ornamen mahkota dapat berubah untuk mencerminkan kepemimpinan seorang sultanah.
2. Tongkat Kerajaan: Tongkat kerajaan atau tongkat kekuasaan yang digunakan oleh sultan dalam upacara resmi dapat mengalami perubahan atau penyesuaian. Desain, simbol, atau hiasan pada tongkat kerajaan mungkin akan diubah untuk memperlihatkan peran seorang sultanah.

3. Busana dan Pakaian Adat: Sultanah Yogyakarta mungkin akan mengenakan busana atau pakaian adat yang berbeda dalam upacara-upacara resmi jika tradisi kesultanan membedakan pakaian antara sultan dan sultanah. Ini bisa mencakup warna, desain, atau gaya busana yang sesuai dengan status dan peran seorang sultanah.
4. Lambang Kesultanan: Lambang atau emblem kesultanan yang digunakan dalam berbagai konteks resmi mungkin mengalami modifikasi. Mungkin ada penyesuaian atau perubahan dalam desain atau elemen yang mencerminkan perubahan kepemimpinan dari sultan menjadi sultanah.

Perubahan simbol-simbol tersebut sangat bergantung pada tradisi dan protokol kesultanan Yogyakarta, serta keputusan dan preferensi pihak kesultanan yang baru. Setiap perubahan simbol harusnya tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma yang berkaitan dengan kesultanan Yogyakarta. Selain itu jika Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang Ratu, ada beberapa kemungkinan perubahan yang dapat terjadi terhadap pandangan Kesultanan Yogyakarta:

1. Perubahan dalam warisan kekuasaan: Dalam sistem monarki yang lebih tradisional, kekuasaan sering kali diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Dengan adanya seorang ratu sebagai penguasa, sistem warisan kekuasaan mungkin berubah untuk mengakomodasi penerus perempuan.
2. Perubahan dalam peran dan tanggung jawab: Seorang ratu mungkin membawa perubahan dalam peran dan tanggung jawab kepemimpinan. Ratu tersebut dapat membawa perspektif dan pendekatan baru dalam mengelola pemerintahan, kebijakan, dan hubungan dengan masyarakat.
3. Dampak budaya dan sosial: Kehadiran seorang ratu sebagai pemimpin dapat memiliki dampak budaya dan sosial yang signifikan. Ratu dapat menjadi

simbol kekuatan, kebijaksanaan, atau pemersatu bagi rakyat. Ini juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

4. Perubahan dalam pandangan dunia dan hubungan internasional: Ratu sebagai pemimpin Kesultanan Yogyakarta mungkin menghadapi persepsi dan dinamika yang berbeda dalam hubungan internasional. Pemimpin perempuan dapat memberikan dimensi baru dalam diplomasi dan membawa perubahan dalam cara negara-negara lain berinteraksi dengan kesultanan.
5. Pengaruh terhadap isu-isu perempuan dan kesetaraan gender: Kepemimpinan seorang ratu dapat memberikan platform yang kuat untuk mengadvokasi isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Hal ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya perempuan dalam posisi kepemimpinan dan mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif.

Namun, perubahan yang terjadi akan sangat tergantung pada konteks budaya, tradisi, dan sistem politik yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Setiap perubahan dalam kepemimpinan akan memiliki dinamika dan konsekuensi yang unik.

Pandangan yang berbeda terhadap sabda dan dawuh Raja dapat mengindikasikan beberapa pergeseran dalam pandangan masyarakat terhadap otoritas tradisional dan menggambarkan elemen-elemen "*The Great Disruption*" yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama (1999). Beberapa pergeseran terjadi di masyarakat saat ini meliputi:

1. Perubahan pandangan terhadap sabda dan dawuh mencerminkan pergeseran dalam persepsi masyarakat tentang *power, authority dan legitimacy* Sultan. Sebelumnya otoritas Sultan dianggap mutlak dan tak terbantahkan, akan tetapi kondisi masyarakat Yogyakarta saat ini lebih cenderung terbuka menerima hal

baru dan tidak lagi menganggap *power, authority dan legitimacy* Sultan sesuatu yang mendominasi.

2. Jika masyarakat sebelumnya cenderung mengikuti dan menghormati nilai-nilai yang diwariskan secara tradisional, untuk kondisi saat ini pandangan masyarakat Yogyakarta mengalami pergeseran. Masyarakat kalangan bangsawan (kerabat Sultan) menganggap upaya perubahan tradisi sedang dilakukan oleh Sri Sultan HBX. Masyarakat kalangan priyayi/terpelajar saat ini cenderung bersikap berdasarkan faktor-faktor kepentingan (bisnis, ekonomi, maupun politik). Sedangkan masyarakat biasa cenderung tidak peduli dengan isu perebutan takhta di Kesultanan Yogyakarta dan merasa biasa-biasa saja yang penting masih tetap bisa hidup kecukupan.
3. Kegaduhan yang diakibatkan sabda dan dawuh Sri Sultan HBX memberikan dampak bagi sebagian masyarakat Yogyakarta yang akhirnya terpolarisasi. Sebagian masyarakat merasakan Kesultanan bisa punah, sebagian lain beranggapan Kesultanan semakin besar.

4.5. Refleksi Teoritis

Konteks penelitian yang dilakukan saat ini adalah Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta Raja. Pada masyarakat Yogyakarta, konsep "sabda" memiliki posisi yang penting dan istimewa. Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan sistem kerajaan. Keraton Yogyakarta, yang merupakan istana kesultanan, merupakan pusat kebudayaan dan pemerintahan tradisional di Yogyakarta. Pada konteks Yogyakarta, "sabda dan dawuh" Sultan memiliki makna yang luas. Sabda dan dawuh Sultan dapat merujuk pada petunjuk, perintah, atau nasehat yang diberikan oleh Sultan kepada rakyatnya. Sabda sultan dianggap memiliki

otoritas dan kekuatan khusus karena berasal dari kepala negara yang memiliki status dan kedudukan yang diakui secara tradisional.

Penelitian Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta raja dengan menggunakan teori organisasi Max Weber terkait *Power, Authority, Legitimacy* dan *Social Judgment Theory* dari Muzafer Sheriff terdapat temuan konsep baru untuk melihat dari persepektif komunikasi yang lainnya. Adapun konsep tersebut adalah *Power and Sosial Appraisal* (Kekuasaan dan Penilaian Sosial). Dimana konsep ini memiliki tiga fokus diantaranya: 1) Komunikasi memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan kekuasaan dan otoritas, serta bagaimana penilaian sosial. 2) Komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian sosial individu terhadap kekuasaan dan otoritas yang ada. 3) Komunikasi yang kurang efektif atau manipulatif dapat mengganggu *Power, Authority, dan Legitimacy*.

Pada konteks penelitian Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX tentang Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi sebagai suksesi takhta raja, *Power and Sosial Appraisal* (Kekuasaan dan Penilaian Sosial) ini merujuk pada bagaimana orang-orang menilai dan merespons kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial. Penilaian sosial ini mencakup bagaimana kekuasaan dipandang, apakah dianggap positif atau negatif, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi dan perilaku orang-orang terhadap pihak yang memegang kekuasaan.

Ketika seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan yang dianggap positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat, maka penilaian sosial terhadap mereka akan cenderung positif. Sebaliknya, jika kekuasaan dianggap negatif atau dianggap tidak adil, maka penilaian sosial akan bersifat negatif. Penilaian sosial ini juga dapat

dipengaruhi oleh cara orang tersebut memperoleh dan menggunakan kekuasaan mereka.

Power, Authority, Legitimacy adalah konsep yang saling terkait dalam memahami struktur dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan (*power*) merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau mengendalikan sumber daya tertentu. Otoritas (*authority*) adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk menggunakan kekuasaan tersebut secara sah dan sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Legitimasi (*legitimacy*) adalah kepercayaan masyarakat bahwa otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok adalah sah dan pantas untuk diakui.

Dalam konteks "*Power and Social Appraisal*" cara orang-orang menilai dan merespons kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok akan dipengaruhi oleh apakah kekuasaan tersebut dianggap sah (*legitimate*) berdasarkan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Social Judgment Theory (Teori Penilaian Sosial) merupakan teori yang menggambarkan bagaimana orang-orang melakukan penilaian terhadap orang lain atau peristiwa tertentu berdasarkan pandangan dan norma-norma pribadi mereka. Teori ini menyatakan bahwa penilaian sosial dipengaruhi oleh tiga kategori, yaitu: Penghargaan (*perceived favorableness*): Bagaimana orang menilai sesuatu (termasuk kekuasaan) sebagai positif, negatif, atau netral. Keterlibatan (*perceived involvement*): Sejauh mana orang merasa terlibat atau terpengaruh oleh hal yang dinilai, seperti kekuasaan seseorang. Posisi acuan (*perceived anchor*): Nilai atau pandangan acuan yang digunakan orang untuk melakukan penilaian. Ketiga hal tersebut memunculkan sikap *Latitude of Acceptance*, *Latitude of Rejection*, dan *Latitude of Non Commitment*.

Dalam konteks penilaian terhadap kekuasaan dan otoritas, teori ini menjelaskan bahwa persepsi dan penilaian sosial seseorang terhadap kekuasaan akan dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang apakah kekuasaan tersebut dianggap positif atau negatif, sejauh mana mereka merasa terlibat dalam situasi tersebut, dan pandangan atau norma-norma pribadi yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara "*Power and Social Appraisal*," "*Power, Authority, Legitimacy*," dan "*Social Judgment Theory*" menunjukkan bagaimana penilaian sosial terhadap kekuasaan dipengaruhi oleh persepsi tentang legitimasi dan otoritas, serta pandangan dan norma-norma pribadi yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan tersebut terdapat beberapa penelitian tentang Sabda Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, diantaranya; (Octastefani dan Azizah, 2018) dengan perspektif gender; (Rizal, 2019) suksesi tampuk kepemimpinan; sabda sebagai konflik internal, konflik masyarakat Yogyakarta, dan tidak memperdulikan (Rizani, 2019); (Tudor dan Bratosin, 2020) gender, seksualitas, dan agama di ruang publik; (Ratnawati dan Santoso, 2021) yang membahas politik takhta raja.

Penelitian lain yang membahas *Power, Authority, dan Legitimacy* dilakukan membahas proses legitimasi menjadi bermasalah oleh struktur dominasi yang tertanam dalam sistem sosial organisasi, bagaimana kekuasaan bersifat memaksa (Gordon & Kornberger, 2011); (Hopfl,2014); (Hirons,2015); (Kappler et.all, 2015); (Homutiv, 2018); (Haack dan Sieweke ,2019); (Singh, 2021); (Concha, 2022).

Selanjutnya beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan *Social Judgment Theory* (SJT) memprediksi bahwa pesan kampanye yang memberikan informasi normatif yang benar tentang perilaku kesehatan yang disalahpahami secara luas akan

mengurangi kesenjangan antara persepsi terdistorsi versus praktik aktual dan akibatnya mengurangi perilaku berdasarkan norma yang dilebih-lebihkan (Wigton, 1996); (Smith et.all, 2006); (Chau, 2014); (Shakya, 2014); (Fiore et.all, 2014); (Davies, 2015). Kemudian) *Social Judgment Theory* dengan proses eksperiman untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan argumen persuasif dalam aktivitas teori penilaian sosial kelas tunggal ini untuk meningkatkan kemampuan mereka mengubah sikap audiens yang resisten (Salazar, 2017); (Jiang dan Chen, 2018); (Abele, 2022).

Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada bagaimana dinamika pro dan kontra *power, authority, dan legitimacy* Max Weber serta sikap masyarakat Yogyakarta terhadap Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX terkait Pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi berdasarkan *Social Judgment Theory* apakah setuju, tidak setuju, atau netral masyarakat Yogyakarta. Serta *Power and Social Appraisal* apakah komunikasi memainkan peran penting dalam memperkuat atau melemahkan kekuasaan dan otoritas, serta bagaimana penilaian sosial. Apakah komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian sosial individu terhadap kekuasaan dan otoritas yang ada. Apakah komunikasi yang kurang efektif atau manipulatif dapat mengganggu *Power, Authority, dan Legitimacy*. Hal yang baru dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah konsep *Power and Social Appraisal* (Kekuasaan dan Penilaian Sosial) yang merupakan diskusi antara konsep *Power Authority Legitimacy* dan *Social Judgment Theory*.

Perlu dicatat bahwa "*Power and Social Appraisal*" (Kekuasaan dan Penilaian Sosial) bisa dianggap sebagai hal baru di antara konsep "*Power, Authority, Legitimacy*" (Kekuasaan, Otoritas, Legitimasi) dan "*Social Judgment Theory*" (Teori Penilaian

Sosial). *Power and Social Appraisal* merupakan konsep yang saling terkait dalam konteks analisis kekuasaan dan penilaian sosial dalam kajian komunikasi.

Penilaian sosial terhadap kekuasaan dan otoritas selalu merupakan aspek penting dalam studi sosiologi, psikologi sosial, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Konsep ini bisa menjadi fokus perhatian para peneliti dalam memahami bagaimana kekuasaan dipandang oleh masyarakat dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku serta pandangan mereka terhadap pihak yang memegang kekuasaan.

Pengaruh kekuasaan pada penilaian sosial dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan, respon terhadap pemimpin, dan pandangan tentang kelompok atau individu sebagai komunikator yang berada dalam posisi berkuasa. Sementara "*Power, Authority, Legitimacy*" lebih berkaitan dengan pemahaman tentang struktur kekuasaan dan mekanisme penguasaan, "*Social Judgment Theory*" lebih menekankan pada bagaimana penilaian sosial terjadi dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, "*Power and Social Appraisal*" bisa dipertimbangkan sebagai konsep baru dalam kajian komunikasi kekuasaan dan penilaian sosial, bagaimana komunikator dipandang oleh masyarakat dari berbagai konteks sosial. Kekuasaan dapat menjadi elemen sentral dalam konteks komunikasi, terutama dalam interaksi antara komunikator yang berbeda tingkat otoritas. Penilaian sosial terhadap kekuasaan komunikator dapat mempengaruhi cara orang lain menerima dan merespons pesan.

Penilaian sosial terhadap komunikator yang memiliki otoritas seringkali dinilai oleh masyarakat secara berbeda. Penilaian sosial terhadap komunikator yang berkuasa dapat mempengaruhi legitimasi pesan yang disampaikan dan mempengaruhi efektivitas komunikasi mereka. Komunikasi dapat menjadi alat yang digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dan komunikasi

saling berhubungan akan mempengaruhi dinamika sosial dan penilaian sosial terhadap kekuasaan tersebut.

Pertimbangan konsep tentang "*Power and Social Appraisal*" dalam konteks kajian komunikasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan dan komunikasi saling terkait dalam interaksi sosial. Bagaimana hal itu mempengaruhi penilaian sosial terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan, hal ini penting dalam memahami kompleksitas komunikasi dalam berbagai tingkatan dan konteks sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pendukung Sri Sultan HBX menerima Sabda dan Dawuh sebagai otoritas mutlak karena meyakini adanya kekuasaan spiritual dan kebijaksanaan. Pihak kontra menilai keputusan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Dinamika pro dan kontra dipengaruhi perbedaan interpretasi, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Masyarakat yang memiliki penghormatan terhadap Sri Sultan HBX, cenderung mendukung keputusan pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Masyarakat yang skeptis menolak keputusan karena dianggap melanggar *paugeran*. Masyarakat netral memiliki pandangan terbuka dan mempertimbangkan keputusan Sri Sultan HBX.

Kekuasaan yang dimiliki Sri Sultan HBX memberikan legitimasi pada Sabda dan Dawuh mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat yang bisa menciptakan konsensus sosial. Komunikasi yang dilakukan Sri Sultan HBX mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap suksesi takhta. Komunikasi kekuasaan menciptakan dukungan, ketidaksetujuan, dan sikap netral. Penilaian positif dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap suksesi. Sebaliknya penilaian negatif akan memberikan perlawanan dan penolakan.

5.2. Saran

Implikasi akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori dan pengetahuan dalam kajian ilmu komunikasi. Hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang mekanisme pengangkatan penerus takhta terkait dengan konsep *power*, *authority*, *legitimacy* dan *social judgment theory* dalam perspektif komunikasi. Penggunaan pendekatan *mix methods* digunakan untuk melakukan konfirmasi *theorem*. Melalui

penggabungan dua teori, penelitian ini menghasilkan konsep teoritis baru yaitu “*Power and Social Appraisal*”. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan teori dan pendekatan yang lebih kritis untuk melihat Sabda dan Dawuh Sri Sultan HBX dari internal dan eksternal Kesultanan Yogyakarta.

Implikasi Sosial

Sabda dan dawuh" dalam konteks ini merujuk pada ajaran atau nasihat yang diberikan oleh Sri Sultan HBX (pemimpin agama, spiritual, atau politik) yang dianggap memiliki otoritas. Implikasi ini mencakup aspek kepatuhan, penghargaan, dan identifikasi terhadap otoritasnya. Jika sabda dan dawuh Sri Sultan HBX dianggap memiliki legitimasi yang kuat, hal ini dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengakuan atas struktur kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi konflik internal. Implikasi sosial lain juga bisa melibatkan tantangan dan kontroversi dalam hal legitimasi kekuasaan Sri Sultan HBX dan interpretasi terhadap sabda dan dawuhnya, masyarakat bisa mempertanyakan otoritasnya atau mengalami perbedaan pendapat tentang makna pesan tersebut. Dalam konteks tertentu, penelitian ini dapat menjadi alat untuk lebih memahami bagaimana kekuasaan, otoritas, dan legitimasi seseorang berperan dalam mempengaruhi masyarakat.

Implikasi praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah dan lembaga terkait tentang proses komunikasi pengangkatan pemimpin khususnya kesultanan, umumnya pada sebuah organisasi yang lebih luas. Hal ini dapat membantu dalam mengomunikasikan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks suksesi kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. (2002). Yogyakarta: Manusia dan Lingkungannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abele, A. (2022). Agency and communion as fundamental dimensions of social judgment – and Bogdan Wojciszke’s brilliant idea on perspective. *PsychOpen GOLD*, 8157.
- An Lu , Zhengping Ding, Yezheng Liu, Yaguang Guo, Yuanchun Jiang, And Zhengguang Chen. (2018). An Evolution Model of Group Opinions Based on Social Judgment Theory. Special Section On Artificial Intelligence And Cognitive Computing For Communication And Network . *IEEE Access*.
- Andrea E. Abele. (2022). Agency and Communion as Fundamental Dimensions of Social Judgment – and Bogdan Wojciszke’s Brilliant Idea on Perspective Department of Psychology, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany. *Social Psychological Bulletin*, Vol. 17, Article e8157, <https://doi.org/10.32872/spb.8157>
- Anver M. Emon, Rume Ahmed, and Mark Ellis. (2018). *The Oxford Handbook of Islamic Law*: Oxford University Press
- Arabi, Oussama. (2013). *Islamic Legal Thought: A Compendium of Muslim Jurists*: Brill
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, P. L. (1989). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Binder, M., & Heupel, M. (2021). The Politics of Legitimation in International Organizations. *Journal of Global Security Studies*, 6(3).
- Bukovansky, M. (2009). *Legitimacy and Power Politics: The American and French Revolutions in International Political Culture*. United States: Princeton University Press.
- Bungin, Burhan. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Carey, P & Houben. W. (1986). *Spirited Srikandhis and Sly Sumbadras: The Social, Political and Economic Role of Women at the Central Javanese Courts in the 18th and Early 19th Centuries*. Amazon
- Carles Boix and Susan C. Stokes. (2007). *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press
- Carolyn Unsworth, Priscilla Harries, and Miranda Davies. (2015). Using Social Judgment Theory method to examine how experienced occupational therapy driver assessors use information to make fitness-to-drive recommendations. *British Journal of Occupational Therapy* 2015, Vol. 78(2) 109–120. Reprints and permissions:

- César Guzmán-Concha . (2022). Power, Legitimacy, and Institutions in the October 2019 Uprising in Chile. *Latin American Perspectives*, Issue XXX, Vol. XX No. XXX, Month 201X, 1–18 doi: 10.1177/0094582x2211491
- Clark, A. (1998). Embodied, situated, and distributed cognition. *A companion to cognitive science*, 506-517.
- Chau. H. F., C. Y. Wong, F. K. Chow, and Chi-Hang Fred Fung. (2014). Social Judgment Theory Based Model On Opinion Formation, Polarization And Evolution. arXiv:1308.2042v2 (nlin.AO) hfchau@hku.hk
- Concha, C. G. (2022). Power, Legitimacy, and Institutions in the October 2019 Uprising in Chile. *Journal of Sociology*, 235-290.
- Creswell. J.W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Crotty. (1998). *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. London: SAGE Publications Inc.
- Darity, W. (2008). Social judgment theory. In P. A. O'Keefe, *International encyclopedia of the social sciences* (p. 17). USA: Macmillan Reference.
- Ding, Z., Liu, Y., Guo, Y., Jiang, Y., & Chen, Z. (2018). An Evolution Model of Group Opinions Based on Social Judgment Theory. *IEEE*, 69288 - 69293.
- Duderija, Adis. (2019). *The Contemporary Islamic Governed State: A Reconceptualization*: Palgrave Macmillan
- Donald Granberg & Gian Sarup. (1991). *Social Judgment and Intergroup Relations Essays in Honor of Muzafer Sherif*. New York Berlin Heidelberg London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona Budapest: Springer-Verlag. ISBN-13: 978-1-4612-7698-2 e-ISBN-13: 978-1-4612-2860-8 DOI:10.1007/978-1-4612-2860-8
- Eagleton, T. (1991). *Ideology: an Introduction*. London: New Left Books.
- Edward H. Levi.(2013). *An Introduction to Legal Reasoning*. Chicago: University Of Chicago Press Tom Ginsburg and Rosalind Dixon. (2011). *Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing
- Em, Griffin. (2015). *A first look at communication theory*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Epictetus Sharon Leibel. (2004). *The Art of Living: The Classical Manual on Virtue, Happiness, and Effectiveness*. HarperOne
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. London: Longman.

- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: *Organization Studies* 26(6): 915–939.
- Fairclough, N, Mulderrig J and Wodak R. (2011). *Critical discourse analysis*. In: Van Dijk TA (ed) *Discourse Studies: a multidisciplinary introduction*. London: Sage.
- Fairclough N and Fairclough I.(2012). *Political Discourse Analysis: a Method for Advanced Students*. London: Routledge.
- Fatah, Eep. Saefullah. (2000). *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Fitria, Rini. (2016). Memahami Hermeneutika dalam mengkaji Teks. *Jurnal Syiar*. 16 (2): 33-42.
- Gordon, R., & Kornberger, M. (2011). *Power, Authority and Legitimacy*. Sydney: School of Management University of Technology, Sydney.
- Greiner, L., & Schein, V. (1989). Power and Organization Development: Mobilizing Power to Implement Change. *The Academy of Management Executive*, 3(2), 159-161.
- Guba, & Lincoln. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., Eds., *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Haack, P., & Sieweke, J. (2020). Advancing the Measurement of Organizational Legitimacy, Reputation, and Status: First-order Judgments vs Second-order Judgments—Commentary on “Organizational legitimacy, reputation and status: Insights from micro-level management”. *Academy of Management Discoveries*, 6(1), 153-158.
- Habermas, Jurgen. (1984). *Theory of Communicative Action*. Boston: Beacon
- Hardy, C., & Clegg, S. (1996). *Some Dare Call it Power*. London: The SAGE Handbook of Organization Studies.
- Harry S. Laver and Jeffrey J. Matthews. (2017). *The Art of Command: Military Leadership from George Washington to Colin Powell*. New York: University Press of Kentucky
- Helio Fred Garcia. (2012). *The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead Effectively*. FT Press
- Heather Burnett. (2018). *Signalling Games, Sociolinguistic Variation and The Construction of Style*. Linguistics and Philosophy.
- Hegtedt, K. A., Johnson, C., Gibson, R., Hawks, K., & Hayward, J. I. (2021). Power and Procedure: Gaining Legitimacy in the Workplace. *Social Forces*, 101(1), 176-201.

- Hirons, M. (2015). Trees for development? Articulating the ambiguities of power, authority, and legitimacy in governing Ghana's mineral rich forests. *Social Sciences and Management*.
- Howard. (2000). *Hermeneutika wacana analitik, psikologi, dan ontology*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia.
- Humotiv. (2018). Power, Authority and the State. *Political Parties*, 6-39.
- I Wayan Badrika. (2006). *Sejarah untuk SMA Kelas XI*, Erlangga, Jakarta.
- Ibrahim Ali Aljimah. (2007). *Decrees in Islam: A Juridical Study*. International Institute of Islamic Thought.
- Ismail, I. (2019). Basic Concepts of Political Science. *Bayero International*, 23(2).
- Jones, T. S. (2001). The Language of Conflict and Resolution Emotional Communication in Conflict: Essence and impact. (81-104). Thousand Oaks: Sage.
- Jost Sieweke. (2019). "The Legitimacy of Inequality: Integrating the Perspectives of System Justification and Social Judgment. *Vrije Universiteit Amsterdam: Journal of Management Studies* (DOI: 10.1111/joms.12323). j.sieweke@vu.nl
- Jun He and Fujian Jinshun Long. (2021). Cultural Semiotics and the Related Interpretation, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 586, Proceedings of the 2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences (ICPRSS 2021) Atlantis.
- Leslie. Ramos. Salazar. (2017): Changing resistant audience attitudes using social judgment theory's "anchor" point perspectives. *Communication Teacher*, DOI:10.1080/17404622.2017.1285412
- Lightstone, Jack. N. (1994). *Studies In Christianity and Judaism The Rhetoric Of The Babylonian Talmud, Its Social Meaning And Context*. Canadian Corporation for Studies in Religion / Corporation Canadienne des Sciences Religieuses. Wilfrid: Laurier University Press.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2005). *Teori Komunikasi; Theories of Human Communication Edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Littlejohn, S. W., & Foss., K. A. (2011). *Teori Komunikasi; Theories of Human Communication Edisi 9* . Jakarta: Salemba Humanika.
- Mészáros, I. (2005). *The power of Ideology*. London and New York: Zed Books Ltd.
- Michael. Silverstein. (2003). Indexical Order and The Dialectics of Social Life. *Language and Communication*, 23:193–229.
- Mihaela Alexandra Tudor dan Stefan Bratosin. (2020). Sexuality and Religion in the Public Sphere. Opinions of French Students on Mediatization of Intimate Sphere.

- Université Paul Valéry Montpellier, Zer, Universidad del País Vasco, 25 (49), pp.111-128. 10.1387/zer.21612 . halshs-03080660.
- Miller, K. (2005). *Communication Theories; Perspectives, processes, and Contexts* Second edition. Nort America: McGraw-Hill Companies.
- Moedjanto. (1987). *Konsep Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mommsen, W. J. (1989). *The Political and Social Theory of Max Weber*. Chicago: Polity Press copublished with University of Chicago Press.
- Nardi. (2021, 10 20). *Bagaimana Abdi Dalem Menyikapi Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX*. (Peneliti, Pewawancara)
- Nardi. (2021, 10 20). *Seberapa Besar Penolakan Abdi Dalem Terhadap Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX*. (Peneliti, Pewawancara)
- Nardi. (2021, 10 20). *Seberapa besar penolakannya?* (Peneliti, Pewawancara)
- Nasution, Adnan B. (2018). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Utama Express.
- Neil Amstrong, Ahmad Jafar, and La Aso. (2021). *The Meaning of Denotation, Connotation, and Myth used in Ariana Grande’s “God is a Woman” Song Lyrics*. ELITE: Journal of English Language and Literature, Volume 4:(1).
- Patrick Haack. (2019). *The Legitimacy Of Inequality: Integrating The Perspectives Of System Justification And Social Judgment*. University of Lausanne patrick.haack@unil.ch
- Penelope Eckert. (2008). *Variation and The Indexical Field*. Journal of sociolinguistics, 12(4):453–476.
- Peter G. Northouse. (2018). *Leadership: Theory and Practice*. London, New York: SAGE Publications, Inc
- Peter Cane and Mark V. Tushnet. (2003). *The Oxford Handbook of Legal Studies*. New York: Oxford University Press.
- Poesponegoro, M.D., Notosusanto, N. (editor utama). (1990). *Sejarah Nasional Indonesia, Edisi ke-4, Jilid II*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Pulido Polo, M., Sánchez González, M.a D. del M. and Luque Crespo, L., (2021). *The Representation of the Spanish Crown in the Public Sphere Through Institutional Acts*. Communication & Society, 34(2), 315-332.
- Ramadhan, Tariq. (2007). *The Divine Words: Utterances of Prophet Muhammad*. Serambi Ilmu Semesta: Universitas Syiah Kuala

- Ramesh, Shakya. (2014). The Social Judgment Theory Consumer Behavior , <http://healthyinfluence.com/wordpress/steves-primer-of-practical-persuasion-3-0/feeling/social-judgment-theory/>
- Ray. W. Cooksey. (2010). The Methodology of Social Judgment Theory. *Thinking & Reasoning*. Vol. 2 Issue 2-3. Pages 141-174: Routledge. <https://doi.org/10.1080/135467896394483>
- Richmond, O. P., Kappler, S., & Bjorkdahl, A. (2015). The 'Field' in the Age of Rawls, J. (1993). *Political Liberalism*. Columbia Press, xxiv-401.
- Rinpoche, Patrul. (1998). *The Words of My Perfect Teacher*. Shambhala: Yale University Press
- Ringer, F. (1979). *Max Weber: An Intellectual Biography*. Chicago, Illinois, Amerika Serikat: The University of Chicago Press.
- Rizal, A.N.S., (2019). Succession of King Hamengku Buwono X Ngayogyakarta. *Jurnal Utopia y Praxis Latinoamericana*, 2019, vol. 24, núm. Esp.6.
- Robert. S. Wigton. (1996). *The Social Judgment Theory and Medical Judgment*. Psychology Press, an Imprint of Erlbaum (UK) Taylor & Francis Ltd. <https://www.researchgate.net/publication/240239746>
- Robert Henderson and Elin McCready. (2018). Dogwhistles and The at-issue/not-at-issue Distinction. In Daniel Gutzmann and Katherine Turgay, editors, *Secondary Content*, pages 191–210. Brill.
- Ronald, Dworkin. (1998). *Intervention: Power, legitimacy, and authority versus the 'local'*. Durham Research Online, Law's Empire. Belknap Press
- Ronda, A. M. (2018). *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi*. Tangerang.
- Sabrina Thai & Penelope Lockwood. (2022). Social-judgment comparisons in daily life. Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada awarded to Penelope Lockwood <https://osf.io/cmxxgj/>
- Salazar, L. R. (2017). Changing resistant audience attitudes using social judgment theory's " anchor " point perspectives . *Communication Teacher*, 1-6.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, Arskal. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*: Edinburgh University Press
- Yousaf Khan Khilji. (2016). *Constitutional Decrees in Pakistan: A Comparative Study*. Oxford, Pakistan: Oxford University Press Pakistan
- Santoso, P. and Ratnawati. (2021). Gender Politics of Sultan Hamengku Buwono X in the Succession of Yogyakarta Palace. *Journal Cogent Social Sciences*, Volume 7:1, 1976966, DOI: 10.1080/23311886.2021.1976966.

- Sarup, D. G. (1991). *Social Judgment and Intergroup Relations Essays in Honor of Muzafer Sherif*. New York Berlin Heidelberg London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona Budapest: Springer-Verlag.
- Sikes, & Gale. (2006). *Narrative approaches to educational research*. Calif: Sage Publications.
- Singh, V. (2021). Concept of Power and Authority. *International Journal of Law Management and Humanity*, 4(4), 22-33.
- Smith, R. A., & Khawaja, N. G. (2011). A Review of the accuturation eperiences of international student. *International Journal of Intercultural Relations*, 35(6), 699-713.
- Shakya, R. (2014). The Social Judgment Theory Consumer Behavior. *Journal EMBA*, 3(2), 135-145.
- Sherif, C. W. (1965). *Attitude and Attitude Change: The Social Judgment-Involvement Approach*. Philadelphia: Saunders.
- Sherstha, R. K., & Shakya, R. (2014). *The Social Judgment Theory Consumer Behavior*. KATHMANDU UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT, 1-5.
- Soekmono, R. (1988). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta
- Soeprapto, Soepardi. (2005). *Kota Yogyakarta: Kajian Sejarah Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharyanto. (2012). *Yogyakarta: Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: UPT Penerbitan Universitas Gadjah Mada
- Sumaryono. (1999). *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surahman, S. (2017, 11 30). Bingkai Media pada Program Acara Televisi Satu Indonesia Net.tv Episode Sultan HBX dan Asia Calling Tempo Tv Episode Penerus Takhta Raja Yogyakarta. *Journal of Communication (Nyimak)*, 1(2), 171-187.
- Talbot, M. A. (2003). *Language and power in the modern world*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Taylor, J. R. (2003). *Linguistic Categorization*. Oxford: Oxford University Press.
- Theresia Octastefani and Nur Azizah. (2018). The Dynamics of Women and Political Heritage in Yogyakarta: A Critical Reflection in Welcoming the Next Leader. *Muwazah, Jurnal Kajian Gender*, Volume 10:2, DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1783>
- Tom Ginsburg and Rosalind Dixon. (2011). *Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing

- Travis J. Wiltshire, Sierra L. Snow, Emilio J. C. Lobato and Stephen M. Fiore. (2014). Leveraging Social Judgment Theory to Examine the Relationship between Social Cues and Signals in Human-Robot Interactions. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 2014* 58: 1336 DOI: 10.1177/1541931214581279 <http://www.sagepublications.com>
- Unsworth, C., Harries, P., & Davies, M. (2015). Using Social Judgment Theory method to examine how experienced occupational therapy driver assessors use information to make fitness-to-drive recommendations. *National Library of Medicine*, 109-120.
- Uphoff, N. (1989). Distinguishing Power, Authority & Legitimacy: Taking Max Weber at His Word by Using Resources-Exchange Analysis. *Polity*, 22(2), 295-322.
- Van Dijk T. (1998). *Ideology: a multidisciplinary approach*. London: Sage.
- Van Dijk T. (2001). Critical discourse analysis. In: Hamilton H, Schiffrin D and Tannen D (eds) *Handbook of Discourse Analysis*. Oxford: Blackwell.
- Van Dijk T. (2006). Ideology and discourse analysis, *Journal of Political Ideologies* 11(2): 115-140.
- Weber, M. (1964). *The theory of social and economic organization*. New York: The Free Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). (Original work published 1921). Berkeley: Berkeley: University of California Press.
- Widyatmaka. (2016). *Dinamika Masyarakat Yogyakarta*. Yogyakarta: UPT Penerbitan Universitas Gadjah Mada.
- Wigton, R. S. (1996). Social judgement theory and medical judgement. *Philpapers*, 2(3), 175-190.
- Wiltshire, T. J., Snow, S. L., & Fiore, S. M. (2014). Leveraging Social Judgment Theory to Examine the Relationship between Social Cues and Signals in Human-Robot Interactions. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 1336 - 1346.
- Yunanto. (2014). *Yogyakarta: Kebudayaan dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yousaf, Khan. (2016). *Constitutional Decrees in Pakistan: A Comparative Study*. Khilji: Oxford University Press Pakistan
- Zubair, A. C. (2021, 10 18). *Bagaimana Pandangan Masyarakat Pada Sabda dan Dawuh Raja Sri Sultan HBX*. (Peneliti, Pewawancara)